



LAPORAN KINERJA 2022



KPPBC TIPE MADYA PABEAN C CILACAP

Bea Cukai Cilacap

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai
Tipe Madya Pabean C Cilacap



<https://bccilacap.beacukai.go.id>



08112822281



(0282) 534126



Bea Cukai Cilacap



bccilacap@customs.go.id



@beacukaicilacap



Bea Cukai Cilacap



Jalan Jendral Sudirman (Sleko), Tambakreja,
Cilacap Selatan



(0282) 534126



info@customs.go.id

Laporan Kinerja Bea Cukai Cilacap Tahun 2022 disajikan untuk memenuhi Nota Dinas Direktur Penerimaan dan Perencanaan Strategis Direktorat Jenderal Bea dan Cukai nomor ND-678/BC.11/2023 tanggal 21 Desember 2022 hal Penyusunan Laporan Kinerja Unit Eselon II dan Unit Eselon III Tahun 2021 di Lingkungan DJBC.

Seluruh data berasal dari Bea Cukai Cilacap dan informasi pihak terkait lainnya berasal dari laporan yang diterima. Saat penyusunan laporan ini, kami berupaya menyajikan data terbaru atau sesuai hasil rekonsiliasi. Jika data berubah setelah laporan ini dikirimkan, maka data perubahan ada di Bea Cukai Cilacap

Bea Cukai Cilacap, Januari 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas segala rahmat dan karunia-Nya sepanjang tahun 2022 Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap dapat melaksanakan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan baik. Tahun 2022 merupakan tahun yang penuh tantangan bagi semua pihak, baik masyarakat ataupun pemerintah. Pandemi COVID-19 yang menyerang seluruh sendi kehidupan tidak hanya berdampak kepada aspek kesehatan, tetapi juga perekonomian negara. Oleh karena itu, Bea Cukai Cilacap melalui perannya sebagai *revenue collector*, *trade facilitator*, *industrial assistance*, dan *community protector* tetap menjaga totalitas untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam mengoptimalkan pencapaian kinerja.

Sepanjang tahun 2022, realisasi penerimaan Bea Cukai Cilacap sebesar Rp248.109 miliar dari target Rp205miliar sehingga capaian 121,03%. Di bidang pengawasan, Bea Cukai Cilacap berhasil melakukan penegahan BKC ilegal sebanyak 888.631 batang rokok dan di sektor pelayanan, usaha Bea Cukai Cilacap memberikan pelayanan prima kepada pengguna jasa membuahkan hasil. Berdasarkan hasil Survei Kepuasan Pengguna Jasa Tahun 2022 Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap mengalami penurunan sebesar 0,09 menjadi 4,65 (indeks 5) dengan kategori Sangat Puas. Bea Cukai Cilacap akan selalu berkomitmen dalam menjaga integritas, profesionalisme, serta selalu berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

Seluruh capaian dan penghargaan yang telah diperoleh merupakan bukti kerja keras seluruh jajaran pimpinan dan pegawai di lingkungan Bea Cukai Cilacap dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang perlu kami syukuri bersama. Keberhasilan tersebut tidak akan terwujud tanpa adanya dukungan, kerja sama, kepercayaan dan sinergi dari seluruh *stakeholder* dan masyarakat. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta dan jajarannya atas bimbingan serta arahnya. Semoga sinergi yang telah tercipta dapat terus terjaga, meningkat, dan berkesinambungan.

Kami juga menerima masukan perbaikan dari pihak internal maupun eksternal. Hal ini sebagai salah satu upaya kami dalam mendukung proses transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan menuju perbaikan organisasi. Upaya kami untuk meningkatkan kinerja menjadi yang terbaik merupakan bakti kami kepada negeri dan ibadah kami kepada sang Maha Pencipta. Semoga Tuhan yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan memberikan petunjuk serta lindungan-Nya kepada kita semua.

Mari dukung kami untuk Bea Cukai Makin Baik!

Cilacap, 19 Januari 2023
Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik
Muhamad Irwan

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LAKIN) merupakan alat kendali sekaligus penilai kinerja secara kuantitatif dan sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi DJBC menuju terwujudnya *good governance*, yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. LAKIN merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/sasaran strategis instansi sesuai format dan ketentuan yang telah ditetapkan.

A. SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2022

Dalam rangka memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu atas Laporan Kinerja, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 sebagai wujud pertanggungjawaban atas pencapaian visi dan misi serta sasaran strategis Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap.

Agar dapat mencapai Visi Bea Cukai Cilacap yaitu ***“Menjadi kantor madya pabean terbaik dalam kinerja dan citra”*** dan Misi yaitu ***memberikan pelayanan prima, pengawasan efektif, pembinaan berkelanjutan kepada pengguna jasa, dan peningkatan kemampuan institusi***, maka perlu ditetapkan tujuan dalam jangka waktu satu tahun untuk mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan program, dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Dari sisi pengelolaan anggaran, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap telah merealisasikan penyerapan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

(DIPA) Tahun 2022 sebesar 92.43% atau Rp1.866.622.821 dari total pagu sebesar Rp2.019.498.887. Kualitas pemanfaatan anggaran tidak direfleksikan hanya dari penyerapan pagu anggaran, tetapi juga memperhitungkan ketercapaian output, upaya efisiensi, tingkat konsistensi, serta tata kelola yang sesuai dengan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai *revenue collector*, pada tahun 2022 Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap berhasil menyumbang penerimaan sebesar Rp248.109.316.600 dari target Rp205.000.000.000 sehingga capaian 121.03%. Pertumbuhan realisasi penerimaan di tahun 2022 (YoY) mengalami kenaikan 35.62% atau Rp65.170.197.328 dibandingkan periode tahun 2021. Hal ini disebabkan karena PT HM Sampoerna Tbk Gombong melakukan pelunasan CK-1 Kredit yang jatuh temponya pada Januari 2023 namun dibayarkan pada Desember 2022. Realisasi penerimaan cukai sebesar Rp160.943.592.600 atau 129.36% dari target penerimaan cukai sebesar Rp124.419.753.000 dan mengalami kenaikan 52.73% dibandingkan tahun 2021, sedangkan realisasi penerimaan bea masuk mencapai Rp87.165.724.000 atau 108.17% dari target penerimaan bea masuk

Rp80.580.247.000. Realisasi bea masuk mengalami kenaikan sebesar 12.38% dibandingkan realisasi tahun 2021.

Kegiatan pengawasan selama tahun 2022 menghasilkan 134 (seratus tiga puluh empat) berkas surat bukti penindakan (SBP). Pengawasan peredaran barang kena cukai ilegal dilakukan dengan kegiatan operasi pasar, gempur rokok ilegal, dan penindakan terhadap pengangkut hasil tembakau. Kegiatan pengawasan selama 2022 menghasilkan penegahan 888.631 batang rokok ilegal, TIS 252 gram, MMEA 104.75 ml, Tramadol HCL 1250 butir, Hexymer 2 mg 3006 butir Trihexyphenidyl 600 butir Riklona 51 butir.

Dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan, diperlukan penentuan sasaran yang mencerminkan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap. Sasaran Strategis (SS) tersebut kemudian dipetakan dalam suatu Peta Strategi berupa kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi instansi. Terdapat 12 Sasaran Strategis yang ditetapkan sebagai rincian atas tujuan tersebut dengan 18 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang melengkapi dan diukur sesuai dengan konsep *Balance Skor Card* (BSC). Berdasarkan evaluasi kinerja tahun 2022, secara keseluruhan kinerja Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap sudah baik dimana Nilai Kinerja Organisasi (NKO) yang diperoleh sebesar 113.15 mengalami kenaikan 1.94 dibandingkan dengan 2021. Nilai tersebut

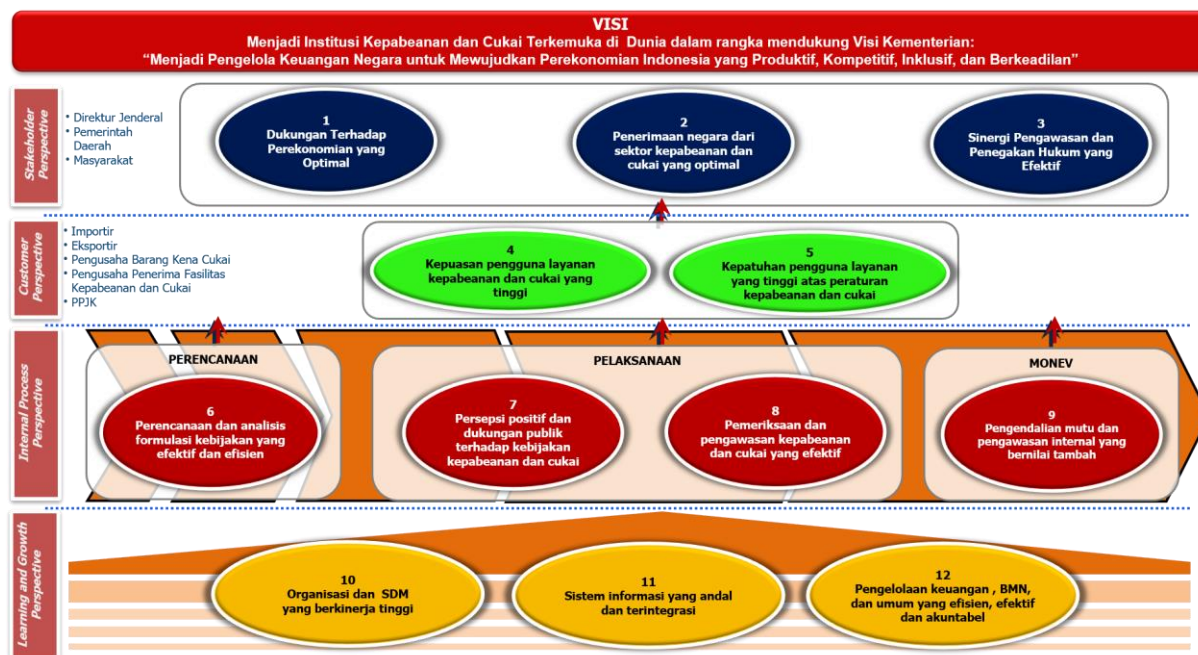
berasal dari masing-masing perspektif yaitu *Stakeholder Perspective* (25%), *Customers Perspective* (15%), *Internal Process Perspective* (30%), dan *Learning and Growth Perspective* (30%). Dari Seluruh IKU yang berjumlah 18 (tujuh belas), 17 (tujuh belas) IKU berstatus warna “hijau” dengan indeks capaian lebih dari 100 dan 1 (satu) IKU berstatus warna “abu-abu” karena tidak ada realisasi yaitu IKU Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional.

Keberhasilan pencapaian kinerja Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan fungsi utama DJBC sebagai fasilitator industri dan perdagangan di bidang kepabeanan dan cukai;
2. Memberikan pelayanan yang cepat efisien, responsif, dan transparan berdasarkan prinsip *good governance*;
3. Meningkatkan hubungan kemitraan dan kepatuhan pengguna jasa; dan
4. Meminimalkan *compliance cost* (biaya pemenuhan kewajiban kepabeanan dan cukai).

Peta Strategi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap Tahun 2022 sebagaimana dalam berikut:

Gambar 1
Peta Strategi



Sumber Data : Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan

Dalam Peta Strategi *Kemenkeu Three* Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap Tahun 2022 telah ditetapkan 12 sasaran strategis dan 18 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan kontrak kinerja antara Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap dengan Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Sasaran Strategis dan IKU
(Penetapan Kinerja dan Rencana Kinerja Tahunan)

KODE	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	KODE	INDIKATOR KINERJA	TARGET
SS-1	Dukungan terhadap perekonomian yang optimal	1a-CP	Persentase Efektivitas Asistensi UMKM Berorientasi Ekspor Dalam Rangka PEN	80%
		1b-N	Persentase Efektivitas Asistensi Perusahaan Rokok dan ekstensifikasi NPPBKC	70,5%
SS-2	Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang optimal	2a-CP	Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai	100%

KODE	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	KODE	INDIKATOR KINERJA	TARGET
SS-3	Sinergi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif	3a-CP	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	78%
SS-4	Kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai yang tinggi	4a-CP	Indeks kepuasan pengguna jasa	4,42 (skala 5)
SS-5	Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas aturan kepabeanan dan cukai	5a-CP	Persentase piutang bea dan cukai yang diselesaikan	94,75%
SS-6	Perencanaan dan analisis formulasi kebijakan yang efektif dan efisien	6a-CP	Persentase kualitas perencanaan dan penyelesaian program PRKC berkelanjutan	75%
SS-7	Persepsi positif dan dukungan publik terhadap kebijakan kepabeanan dan cukai	7a-N	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	85 (skala 100)
		7b-N	Rata-rata persentase realisasi janji layanan kepabeanan dan cukai	106.51%
SS-8	Pemeriksaan dan pengawasan kepabeanan dan cukai yang efektif	8a-CP	Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai	74%
		8b-CP	Persentase efektivitas patroli laut	73%
SS-9	Pengendalian mutu dan pengawasan internal yang bernilai tambah	9a-CP	Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	83%
		9b-N	Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal	90.5%
SS-10	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi	10a-N	Persentase peningkatan kompetensi pegawai	78%
		10b-N	Persentase efektivitas manajemen organisasi	82,5%
		10c-N	Indeks Efektivitas Pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	90,1 (skala 100)

KODE	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	KODE	INDIKATOR KINERJA	TARGET
SS-11	Sistem Informasi yang Andal dan Terintegrasi	11a-N	Persentase pengelolaan layanan TIK	80%
SS-12	Pengelolaan Keuangan, BMN dan Umum yang Efisien, Efektif, dan Akuntabel	12a-N	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,51%

Sumber Data : Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan

Secara umum target IKU *Kemenkeu Three* Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap dapat dicapai dengan baik. Secara rinci data pencapaian target IKU Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap Tahun 2022 dapat disajikan sebagaimana berikut:

Tabel 2
Rincian Data Capaian IKU

KODE	DESKRIPSI	2021		
		TARGET	REALISASI	INDEKS CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
SS-1	<i>Dukungan terhadap perekonomian yang optimal</i>			
1a-CP	Persentase Efektivitas Asistensi UMKM Berorientasi Ekspor Dalam Rangka PEN	80%	94%	117.5
1b-N	Persentase Efektivitas Asistensi Perusahaan Rokok dan ekstensifikasi NPPBKC	70%	120	120
SS-2	<i>Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang optimal</i>			
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai	100%	121.03%	120
SS-3	<i>Sinergi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif</i>			
3a-CP	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	78%	103.94%	120
SS-4	<i>Kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai yang tinggi</i>			
4a-CP	Indeks kepuasan pengguna jasa	4,42 (skala 5)	4.65	105.20
SS-5	<i>Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas aturan kepabeanan dan cukai</i>			
5a-CP	Persentase piutang bea dan cukai yang diselesaikan	94,75%	100%	105.54
SS-6	<i>Perencanaan dan Analisis Formulasi Kebijakan yang Efektif dan Efisien</i>			
6a-CP	Persentase kualitas perencanaan dan penyelesaian program PRKC berkelanjutan	75%	94.08%	120
SS-7	<i>Persepsi positif dan dukungan publik terhadap kebijakan kepabeanan dan cukai</i>			
7a-N	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	85 (skala 100)	89.08%	104.80
7b-N	Rata-rata persentase realisasi janji layanan kepabeanan dan cukai	106.51%	116.3%	109.19

KODE	DESKRIPSI	2021		
		TARGET	REALISASI	INDEKS CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
SS-8	Pemeriksaan dan pengawasan kepabeanan dan cukai yang efektif			
8a-CP	Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai	74%	92.96%	120
8b-CP	Persentase efektivitas patroli laut	73%	75.67%	103.66
SS-9	Pengendalian mutu dan pengawasan internal yang bernilai tambah			
9a-CP	Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	83%	N/A	N/A
9b-N	Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal	90.5%	100%	110.50
SS-10	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi			
10a-N	Persentase peningkatan kompetensi pegawai	78%	105.8%	120
10b-N	Persentase efektivitas manajemen organisasi	82,5%	98.75%	119.70
10c-N	Indeks Efektivitas Pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	90,1 (skala 100)	99.65%	110.60
SS-11	Sistem Informasi yang Andal dan Terintegrasi			
11a-N	Persentase pengelolaan layanan TIK	80%	96.06%	120
SS-12	Pengelolaan Keuangan, BMN dan Umum yang Efisien, Efektif, dan Akuntabel			
12a-N	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,51%	96.4%	100.93

Sumber Data : Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan

B. KENDALA DAN STRATEGI DALAM PENCAPAIAN SASARAN DI TAHUN 2022

Pencapaian kinerja Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap pada Tahun 2022 telah menunjukkan hasil yang memuaskan. Dari sisi penerimaan sebagai salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU), Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap dapat melampaui target yang telah ditetapkan. Pencapaian yang didapat tidak terlepas dengan adanya permasalahan, kendala, dan tantangan. Pada Tahun 2022 terdapat beberapa kendala baik dari faktor internal maupun dari eksternal antara lain:

1. Perubahan jenis produksi PT HM Sampoerna Tbk

Adanya perubahan jenis produksi PT HM Sampoerna Tbk mempengaruhi penerimaan Cukai pada awal tahun hingga pertengahan tahun. Sebelum adanya penggolongan jenis Kelembak Menyan (KLM) Perusahaan tersebut melakukan perubahan produksi dari yang sebelumnya memproduksi Sigaret Putih Tangan (SPT) dengan tarif Rp200,- dan Sigaret Kretek Tangan (SKT) dengan tarif Rp425,- ke KLM yang tarifnya hanya Rp25,-.

2. Banyaknya barang kena cukai ilegal

Peredaran barang kena cukai ilegal masih didapati marak di daerah pengawasan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap. Meskipun disini lain sudah terdapat ekstensifikasi NPPBKC yang telah berhasil dicapai, namun hal tersebut masih tak terhindarkan.

3. Minimnya komoditas barang impor yang dikenakan bea masuk

Importir di lingkungan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap lebih banyak mengimpor komoditi yang nilai Bea Masuknya 0 (nol) rupiah seperti kedelai, gandum, BBM, dll, Pertumbuhan industri yang mendukung penerimaan negara dari sisi Kepabeanan di Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Cilacap relatif stagnan sehingga potensi penerimaan kepabeanan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C masih bergantung pada PT Dharmapala Usaha Sukses. Mengingat perusahaan tersebut adalah perusahaan impor yang berdasarkan kuota maka risiko yang akan timbul adalah ketika perusahaan tersebut mengalami penurunan proses bisnis dan mengakibatkan penurunan kuota yang pada akhirnya mempengaruhi tingkat penerimaan.

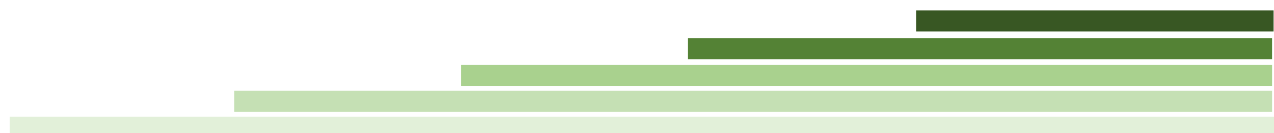
Untuk menghadapi kendala tersebut, guna pencapaian sasaran strategis Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap telah melaksanakan beberapa strategi diantaranya:

1. Melakukan sosialisasi kepada calon Perusahaan Rokok bahwa legal itu mudah dan membantu menyelesaikan setiap permasalahan yang menjadi kendala mereka untuk menjadi legal. Selain itu, Bea Cukai Cilacap juga selalu memberikan asistensi terkait ketentuan di bidang cukai, pencatatan, dan pelaporan kepada Perusahaan Rokok baru;
2. Melakukan kunjungan kepada Pengguna Jasa (*Customs Visit Customer*) untuk menggali setiap potensi yang dapat meningkatkan penerimaan Negara di bidang kepabeanan dan cukai serta membantu mencari solusi untuk segala permasalahan agar proses bisnis Pengguna Jasa tetap berjalan lancar;
3. Melakukan asistensi kepada UMKM untuk dapat meningkatkan kemampuan produksinya sehingga dapat mengembangkan usahanya melalui kegiatan ekspor dan impor;
4. Melakukan kegiatan sosialisasi peraturan terbaru dan pelayanan kepabeanan dan cukai secara virtual apabila tidak dimungkinkan dilakukan secara tatap muka;
5. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia melalui kegiatan pembinaan mental, penguatan integritas, pengembangan kompetensi pegawai, dan *e-learning*/Pendidikan/pelatihan;
6. Meningkatkan kerja sama dan komunikasi antara Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap dengan *stakeholder*, instansi terkait dan masyarakat; dan

Kilas Kinerja



Penerimaan



Rp **160.94**
miliar
penerimaan
cukai



Rp **248.1**
miliar
penerimaan kepabeanan dan
cukai Kantor Pengawasan dan
Pelayanan Bea dan Cukai
Tipe Madya Pabean C Cilacap

Rp **87.16**
miliar
penerimaan
kepabeanan



Pengawasan



888.6
ribu
batang
rokok ilegal



1250 butir *Tramadol HCL*
3006 butir *Hexymer 2 mg*
600 gr *Trihexyphenidyl*
51 butir Riklona



104.75
ml
Minuman
Mengandung
Etil Alkohol



252
gram
Tembakau Iris



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR, GRAFIK, DAN FORMULA	xv
PENDAHULUAN	2
A. LATAR BELAKANG	2
B. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI	3
C. PERAN STRATEGIS ORGANISASI	6
D. SUMBER DAYA ORGANISASI	7
E. SISTEMATIKA PELAPORAN	11
PERENCANAAN	15
KINERJA	15
A. RENCANA STRATEGIS	15
B. PENETAPAN PERJANJIAN KINERJA	20
C. PENGUKURAN KINERJA	21
AKUNTABILITAS	25
KINERJA	25
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	25
B. NARASI EVALUASI ANALISIS IKU	26
Sasaran Strategis 1 Dukungan Terhadap Perekonomian Yang Optimal	26
Sasaran Strategis 2 Penerimaan Negara Dari Sektor Kepabeanan Dan Cukai Yang Optimal	35
Sasaran Strategis 3 Sinergi Pengawasan Dan Penegakan Hukum Yang Efektif	39
Sasaran Strategis 4 Kepuasan Pengguna Layanan Kepabeanan Dan Cukai Yang Tinggi	43
Sasaran Strategis 5 Kepatuhan Pengguna Layanan Yang Tinggi Atas Aturan Kepabeanan Dan Cukai	46
Sasaran Strategis 6 Perencanaan Dan Analisis Formulasi Kebijakan Yang Efektif Dan Efisien	49
Sasaran Strategis 7 Persepsi Positif Dan Dukungan Publik Terhadap Kebijakan Kepabeanan Dan Cukai	51
Sasaran Strategis 8 Pemeriksaan Dan Pengawasan Kepabeanan Dan Cukai Yang Efektif	56
Sasaran Strategis 9 Pengendalian Mutu Dan Pengawasan Internal Yang Bernilai Tambah	61
Sasaran Strategis 10 Organisasi Dan SDM Yang Berkinerja Tinggi	67
Sasaran Strategis 11 Persentase Pengelolaan Layanan TIK	75
Sasaran Strategis 12 Pengelolaan Keuangan, BMN Dan Umum Yang Efisien, Efektif Dan Akuntabel	76
C. REALISASI ANGGARAN	79
D. CAPAIAN KINERJA LAINNYA	79
PENUTUP	95
A. SIMPULAN	96
B. RENCANA AKSI TAHUN 2023	97
LAMPIRAN	98

DAFTAR TABEL

No	Nama Tabel		Halaman
1	Tabel 1	Sasaran Strategis dan IKU	vi
2	Tabel 2	Rincian data Capaian IKU	viii
3	Tabel 1.1	Sarana dan Prasarana	9
4	Tabel 1.2	Pagu Anggaran	11
5	Tabel 2.1	Perhitungan NKO	23
6	Tabel 2.2	Indeks Capaian dan NKO	23
7	Tabel 3.1	Persentase Efektivitas Asistensi UMKM Berorientasi Ekspor Dalam Rangka PEN	28
8	Tabel 3.2	Rincian kegiatan Koordinasi, Sosialisasi, Asistensi dan Hasil Asistensi UMKM Berorientasi Ekspor	29
9	Tabel 3.3	Persentase efektifitas asistensi ekspor dan ekstensifikasi NPPBKC	32
10	Tabel 3.4	Rincian kegiatan asistensi ekspor dan ekstensifikasi NPPBKC	33
11	Tabel 3.5	Persentase realisasi penerimaan bea dan cukai	35
12	Tabel 3.6	Target penerimaan 2018 s.d. 2022	36
13	Tabel 3.7	Target penerimaan kepabeanan dan cukai TA 2022 serta perubahannya	36
14	Tabel 3.8	Capaian penerimaan Tahun 2018 s.d. 2022	36
15	Tabel 3.9	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	40
16	Tabel 3.10	Poin capaian pelaksanaan sosialisasi	41
17	Tabel 3.11	Bobot Tindak Lanjut Penindakan	42
18	Tabel 3.12	Indeks kepuasan pengguna jasa	44
19	Tabel 3.13	Persentase piutang bea dan cukai yang diselesaikan	47
20	Tabel 3.14	Data piutang yang diselesaikan dan jumlah piutang	48
21	Tabel 3.15	Data piutang macet yang telah dilimpahkan ke KPKNL Purwokerto	49
22	Tabel 3.16	Persentase kualitas perencanaan satuan kerja	50
23	Tabel 3.17	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	51
24	Tabel 3.18	Rata-rata persentase realisasi janji layanan kepabeanan dan cukai	54
25	Tabel 3.19	Perubahan maklumat janji layanan	55
26	Tabel 3.20	Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai	57
27	Tabel 3.21	Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai	58
28	Tabel 3.22	Realisasi efektifitas kegiatan patroli dan operasi Kepabeanan dan Cukai Tahun 2020 dan 2021	58
29	Tabel 3.23	Persentase efektivitas patroli laut	59
30	Tabel 3.24	Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	62
31	Tabel 3.25	Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal	63
32	Tabel 3.26	Realisasi kegiatan monitoring dan pengawasan Kepatuhan Internal	67
33	Tabel 3.27	Persentase peningkatan kompetensi pegawai	68
34	Tabel 3.28	Rincian kegiatan peningkatan kompetensi pegawai	70
35	Tabel 3.29	Persentase efektivitas manajemen organisasi	70
36	Tabel 3.30	Indeks Efektivitas Pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	73

No	Nama Tabel		Halaman
37	Tabel 3.31	Pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	74
38	Tabel 3.32	Persentase pengelolaan layanan TIK	75
39	Tabel 3.33	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	77
40	Tabel 3.34	Persentase realisasi pelaksanaan anggaran	77
41	Tabel 3.35	Perubahan Pagu Anggaran	79
42	Tabel 3.36	Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Barang	79
43	Tabel 3.37	Data BC 2.0 (PIB)	80
44	Tabel 3.38	Data PEB	80
45	Tabel 3.39	Data Pelayanan Izin Bongkar, Izin Timbun dan Izin Muar (3D)	82
46	Tabel 3.40	Data P3C dan CK-1	82
47	Tabel 3.41	Data Golongan Pengusaha Cukai Hasil Tembakau	83
48	Tabel 3.42	Data BC.1.1 Masuk (Inward Manifest)	84
49	Tabel 3.43	Data BC.1.1 Keluar (Outward Manifest)	84
50	Tabel 3.44	Daftar Perusahaan Penyumbang Penerimaan	86
51	Tabel 3.45	Dokumen SBP terkait status BDN dan BMN	87
52	Tabel 3.46	Data kegiatan Pemeriksaan Sarana Pengangkut (boatzoeking)	88
53	Tabel 3.47	Data kegiatan Pendisikan dan Pelatihan Pegawai	88

DAFTAR GAMBAR, GRAFIK, DAN FORMULA

No	Nama Gambar	Halaman
1	Gambar 1 Peta Strategi	vi
2	Gambar 1.1 Struktur Organisasi	5
3	Gambar 1.2 Data pegawai berdasarkan jenis kelamin dan tingkat pendidikan	7
4	Gambar 1.3 Data Pegawai berdasarkan golongan	7
5	Gambar 1.4 Komposisi Pegawai per Subbagian/Seksi	8
6	Gambar 1.5 Klasifikasi SDM berdasarkan Usia	8
7	Gambar 2.1 Skala Konversi IKU <i>Minimize</i>	22
8	Gambar 2.2 Skala Konversi capaian dan indeks capaian	22
9	Gambar 3.1 Capaian Kinerja Organisasi	26

No	Nama Grafik	Halaman
1	Grafik 3.1 Target dan realisasi penerimaan Tahun 2018 s.d. 2022 (dalam miliar rupiah)	37
2	Grafik 3.2 Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Tahun 2022	45
3	Grafik 3.3 Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Tahun 2018 s.d. 2022	45
4	Grafik 3.4 Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	53
5	Grafik 3.5 Target dan realisasi IKU Rata-rata persentase realisasi janji layanan kepabeanaan dan cukai Tahun 2018 s.d. 2022	55
6	Grafik 3.6 Persentase kualitas pelaksanaan anggaran dari tahun 2018 s.d. 2022	75

No	Nama Formula	Halaman
1	Formula 2.1 Polarisasi <i>Maximize</i> (realisasi lebih tinggi dari target)	21
2	Formula 2.2 Polarisasi <i>Maximize</i> (realisasi lebih rendah dari target)	21
3	Formula 2.3 Polarisasi <i>Minimize</i> (realisasi lebih rendah dari target)	21
4	Formula 2.4 Polarisasi <i>Stabilize</i>	22
5	Formula 2.5 Perhitungan bobot tertimbang IKU	22
6	Formula 2.6 Perhitungan NSS	22
7	Formula 2.7 Perhitungan Np	23
8	Formula 2.8 Perhitungan NKO	23
9	Formula 3.1 Persentase efektivitas asistensi ekspor dan ekstentifikasi NPPBKC	28
10	Formula 3.2 Perhitungan IKU Persentase efektivitas pengawasan peredaran Barang Kena Cukai ilegal	32

BAB I

PENDAHULUAN

- A. Latar belakang
- B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
- C. Peran Strategis Organisasi
- D. Sumber Daya Organisasi
- E. Sistematika Laporan





PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap sebagai salah satu bagian dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memiliki peranan yang sangat penting dalam mewujudkan perekonomian negara, terutama melalui kegiatan ekspor, impor dan lainnya. Semangat DJBC untuk mewujudkan perannya dengan mendorong perekonomian negara yang mandiri bukan hanya berfokus pada perbaikan pelayanan yang *continuously improved*, namun juga melakukan reformasi untuk menjaga negara dengan melakukan pengawasan secara maksimal diberbagai titik perbatasan.

Sebagai salah satu instansi yang bertanggung jawab dalam penerimaan negara, khususnya dari sektor kepabeanan dan cukai, DJBC perlu menyajikan laporan yang bersifat kredibel dan transparan atas kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi. Oleh karena itu, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu atas Laporan Kinerja, DJBC diwajibkan menyusun pertanggungjawabannya dalam bentuk Laporan Kinerja (LAKIN).

LAKIN Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap Tahun 2022 merupakan suatu wujud pertanggungjawaban atas kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi dalam

rangka pencapaian Sasaran Strategis Tahun Anggaran 2022 serta merupakan realisasi dari Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2022 yang mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) DJBC Tahun 2020-2024.

Laporan ini disajikan secara sistematis sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor SE-11/BC/2021 tentang Penyusunan Laporan Kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai agar dapat memberikan gambaran yang jelas, obyektif, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pimpinan dan publik tentang kinerja Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap, baik dalam hal keberhasilan yang telah dicapai maupun kendala yang dihadapi selama Tahun 2022.

B. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap merupakan instansi vertikal di lingkungan DJBC yang berada di bawah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor **183/PMK.01/2020** tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap memiliki tugas untuk melaksanakan pengawasan dan pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai dalam daerah wewenangannya, yang meliputi Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Kebumen berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap menyelenggarakan fungsi:

- Pelaksanaan pelayanan teknis di bidang kepabeanan dan cukai;
- Pelaksanaan pemberian perizinan dan fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai;
- Pelaksanaan pemungutan dan pengadministrasian bea masuk, cukai, dan pungutan negara lainnya yang dipungut oleh DJBC;

- Pelaksanaan intelijen, patroli, penindakan, dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai;
- Penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai;
- Pelaksanaan pengolahan data, penyajian informasi dan laporan kepabeanan dan cukai;
- Pengelolaan dan pemeliharaan sarana operasi, sarana komunikasi, dan senjata api;
- Pengawasan pelaksanaan tugas dan evaluasi kinerja; dan
- Pelaksanaan administrasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap.

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap terdiri atas:

- Subbagian Umum;
- Seksi Penindakan dan Penyidikan;
- Seksi Perbendaharaan;
- Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai dan Dukungan Teknis;
- Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan; dan
- Kelompok Jabatan Fungsional.

yang mempunyai tugas sebagaimana berikut:

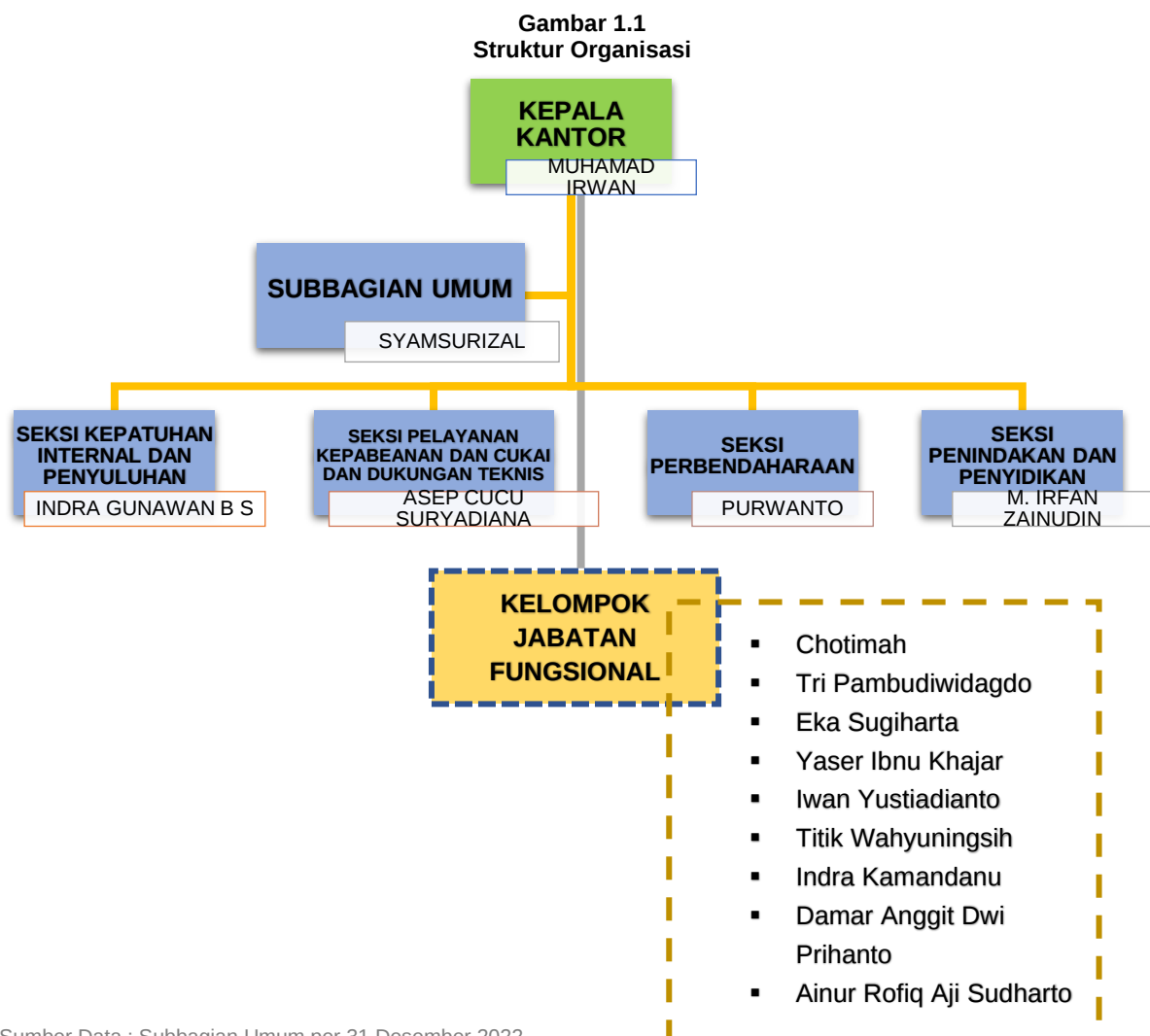
Subbagian Umum
Melakukan urusan: ▪ keuangan, ▪ sumber daya manusia, ▪ ketatausahaan, ▪ kerumahtanggaan, ▪ pengelolaan Barang Milik Negara, dan ▪ pengelolaan kearsipan.
Seksi Penindakan dan Penyidikan
Melakukan kegiatan: ▪ intelijen, ▪ patroli dan operasi pencegahan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai, ▪ penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai, ▪ penatausahaan dan pengurusan barang hasil penindakan dan barang bukti, ▪ pengelolaan dan pemeliharaan sarana operasi, sarana komunikasi dan senjata api.
Seksi Perbendaharaan
Melakukan kegiatan: ▪ pemungutan dan pengadministrasian bea masuk, bea keluar, cukai, dan pungutan negara lain yang sesuai peraturan perundang-undangan dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, ▪ melakukan penerimaan dan penatausahaan rencana kedatangan sarana pengangkut dan jadwal kedatangan sarana pengangkut, ▪ melakukan penerimaan, pendistribusian, penelitian, dan penyelesaian manifes kedatangan dan keberangkatan sarana pengangkut, ▪ memberikan pengangkutan penghitungan pelayanan pemberitahuan barang, dan ▪ melaksanakan denda administrasi terhadap keterlambatan penyerahan dokumen dan sarana pengangkut.

Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai dan Dukungan Teknis
Melakukan kegiatan: ▪ pelayanan teknis, perizinan, dan fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai, serta dukungan teknis di bidang kepabeanan dan cukai, ▪ pengoperasian komputer dan sarana penunjang, pengelolaan dan penyimpanan data dan berkas, pelayanan dukungan teknis komunikasi data, pertukaran data elektronik, ▪ pengelolaan data kepabeanan dan cukai, dan penerimaan, verifikasi kelengkapan dan pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai, dan ▪ menyajikan data kepabeanan dan cukai.
Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan
Melakukan kegiatan: ▪ upaya pencegahan pelanggaran dan penegakan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, ▪ pembinaan mental pegawai, ▪ pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan investigasi internal, ▪ pemantauan pengendalian intern dan pengelolaan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional, ▪ pengelolaan kinerja, ▪ pengelolaan risiko, ▪ analisis beban kerja, penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas, ▪ perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis di lingkungan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, dan ▪ bimbingan kepatuhan, konsultasi, dan layanan informasi, serta penyuluhan dan publikasi peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai.
Kelompok Jabatan Fungsional
melakukan tugas sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

DJBC melakukan penyempurnaan struktur organisasi melalui penataan organisasi secara berkelanjutan. Perubahan tersebut untuk mewujudkan organisasi yang efektif, efisien, dan responsif dalam menghadapi perubahan lingkungan yang dinamis, menjawab tuntutan masyarakat, serta dalam mewujudkan pelaksanaan reformasi birokrasi dan *good governance*.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 183/PMK.01/2020, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap dipimpin oleh satu Kepala Kantor / Pejabat Administrator (Eselon III) yang dibantu oleh lima Pejabat Pengawas setingkat Eselon IV yaitu Kepala Subbagian Umum, Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan, Kepala Seksi Perbendaharaan, Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai dan Dukungan Teknis, serta Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan.

Pada tahun 2020 akhir terdapat program *delayering* sebagai tindak lanjut kebijakan penyederhanaan birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan peran DJBC sehingga dilakukan perubahan struktur organisasi. Seluruh Pejabat setingkat eselon V telah dihapuskan dan dialihkan menjadi Pejabat Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai Ahli Pertama. Struktur organisasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap secara lebih rinci dapat dilihat pada diagram di bawah ini:



Sumber Data : Subbagian Umum per 31 Desember 2022

C. PERAN STRATEGIS ORGANISASI

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap memiliki peran strategis dalam menjalankan visi dan misi DJBC di wilayah Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Kebumen. Upaya peningkatan dan pengembangan ekonomi nasional terkait perdagangan global dengan mendukung kelancaran arus barang dan meningkatkan efektivitas pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean Indonesia dan lalu lintas barang tertentu dalam daerah pabean Indonesia, serta untuk mengoptimalkan pencegahan dan penindakan penyelundupan.

Peran strategis ini menjadi manifestasi ke dalam penyelenggaraan pengawasan dan pelayanan dibidang kepabeanan terhadap arus barang impor, ekspor, dan barang kena cukai.

Peran optimalisasi penerimaan negara (*revenue collector*)

Bea Cukai Cilacap berperan dalam memungut penerimaan di bidang kepabeanan dan cukai, terdiri dari Bea Masuk, Bea Keluar, Cukai, dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI). Melalui peran penerimaan ini, Bea dan Cukai berkontribusi pada pembiayaan pembangunan nasional. Penggunaan teknologi informasi dalam layanan kepabeanan dan cukai juga berkontribusi signifikan pada optimalisasi penerimaan negara dan mendukung permintaan masyarakat menjadikan Bea dan Cukai yang kredibel.

Peran melindungi masyarakat Indonesia (*community protector*)

Bea Cukai Cilacap berperan melindungi masyarakat di wilayah Kabupaten Cilacap dan Kebumen dari barang-barang ilegal. Dari sisi ekonomi, Bea dan Cukai melindungi produk-

produk dalam negeri dari persaingan ilegal peredaran barang luar negeri dalam daerah pabean. Sistem pengawasan telah dibangun melalui pemberitahuan pabean dengan dilampiri dokumen-dokumen yang sah dari instansi pemerintah terkait. Tujuan sistem ini untuk mencegah tindakan penyelundupan yang dapat merugikan masyarakat dan negara. Terkait dengan peredaran Barang Kena Cukai, pengawasan dilakukan terhadap produksi barang kena cukai ilegal dan jalur distribusinya. Strategi pengawasan difokuskan pada jalur distribusi dan penjualan rokok ilegal, guna mencegah berbagai modus pelaku. Peran Bea dan Cukai dalam perlindungan ini memberi dampak perlindungan strategis bagi masyarakat, sekaligus peningkatan kepatuhan pengguna jasa terhadap Undang-Undang Kepabeanan dan Cukai.

Peran memfasilitasi perdagangan dan industri (*trade facilitator*)

Bea Cukai Cilacap menjalankan peran pemberian fasilitas dengan memperkuat layanan perizinan yang cepat, pemantauan arus barang yang efektif dan efisien di wilayah pengawasannya dengan tujuan meningkatkan kelancaran arus barang dan perdagangan dan menekan ekonomi biaya tinggi.

Peran memberi dukungan kepada industri dalam negeri (*industrial assistance*)

Bea Cukai Cilacap melakukan asistensi kepada UMKM di lingkungan Kabupaten Cilacap dan Kebumen untuk membantu menyelesaikan kendala yang dihadapi, memberikan solusi untuk mengembangkan industriya dalam rangka mencapai keunggulan kompetitif atau dapat bersaing dalam pasar internasional.

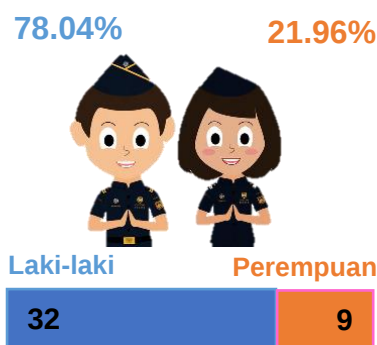
D. SUMBER DAYA ORGANISASI

Sebagai unit vertikal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap mengemban tugas penting dan peran strategis untuk melakukan pengawasan dan pelayanan dalam rangka memenuhi dan mengamankan hak-hak negara dalam wilayah kerja meliputi dua wilayah kabupaten yaitu Kabupaten Cilacap dengan 24 kecamatan dan Kabupaten Kebumen dengan 26 kecamatan di bawahnya. Daerah wewenang untuk melaksanakan tugas pengawasan dan pelayanan meliputi:

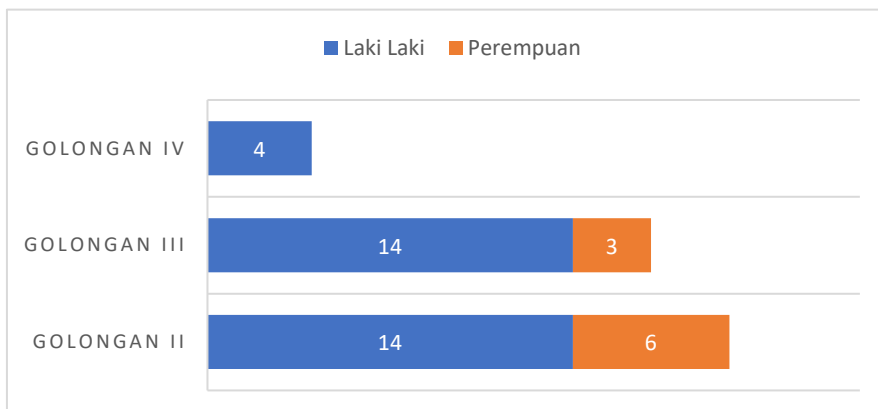
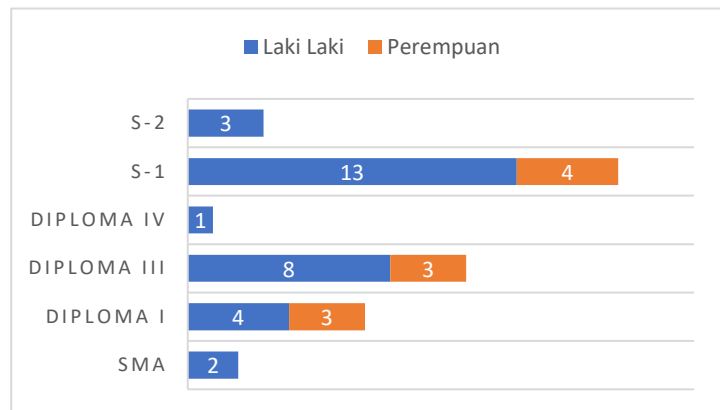
1. Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai Kebumen;
2. Pos Pengawasan Bea dan Cukai yaitu:
 - a. Tunggul Wulung (PU)
 - b. Tanjung Intan (PL)

Pada kondisi saat ini yang penuh persaingan serta perubahan lingkungan global, menuntut peran Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap untuk lebih kompleks sebagai penghimpun penerimaan negara, fasilitator dalam perdagangan global, pengawas lalu lintas perdagangan internasional, serta penegak hukum di bidang kepabeanan dan cukai, maka perlu dukungan sumber daya manusia (SDM) yang tangguh dengan mentalitas bertanggung jawab dan moralitas yang tinggi, mengingat SDM merupakan faktor utama yang menentukan berhasil tidaknya misi organisasi. Rincian jumlah pegawai pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap adalah sebagai berikut:

Gambar 1.2
Data pegawai berdasarkan jenis kelamin dan tingkat pendidikan



Sumber Data : Subbagian Umum



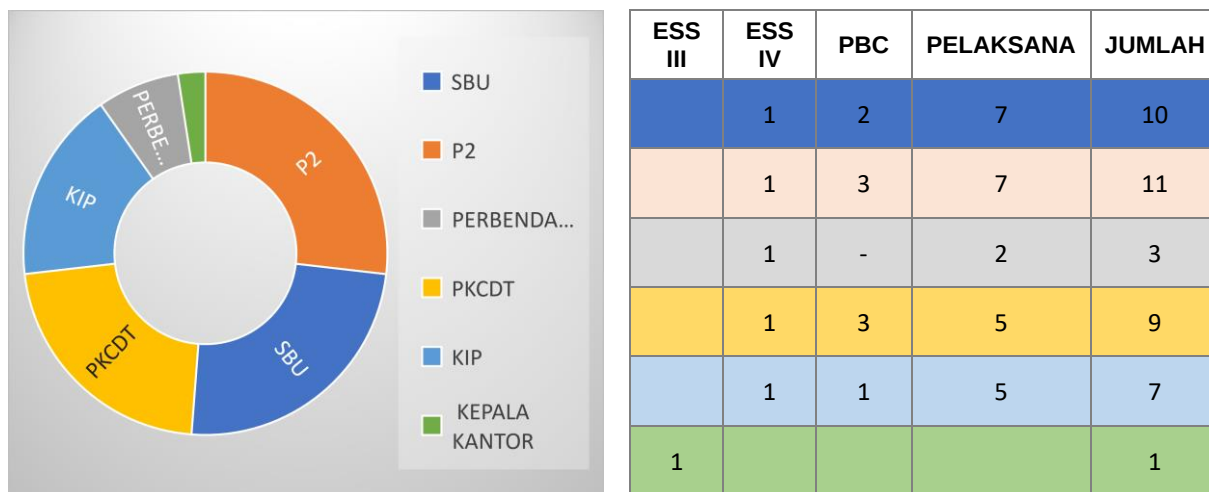
Gambar 1.3
Data Pegawai
berdasarkan golongan

Sumber Data :
Subbagian Umum

Pada tanggal 31 Desember 2022, kekuatan personil Bea Cukai Cilacap sebanyak 41 (empat puluh satu) pegawai. Dari segi Pendidikan paling banyak pegawai dengan lulusan Sarjana Strata 1, sedangkan berdasarkan golongan pegawai didominasi oleh golongan II.



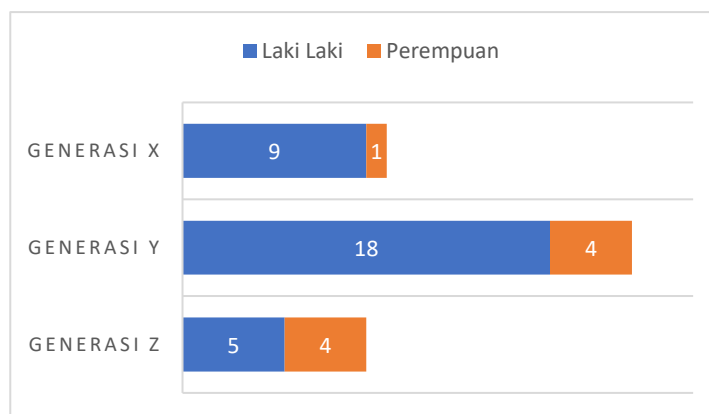
Komposisi Pegawai per Subbagian/Seksi



Sumber Data : Subbagian Umum

Gambar 1.5
Klasifikasi SDM berdasarkan Usia

Lebih dari dua per tiga kekuatan personil Bea Cukai Cilacap diisi generasi modern. Generasi ini terdiri dari generasi Y atau dikenal sebagai generasi millennial (langgas) yang lahir mulai tahun 1980 dan generasi Z yang lahir mulai tahun 1995. Generasi ini memiliki potensi besar dalam berinovasi. Melalui potensi mereka, kegiatan pengawasan dan pelayanan Bea Cukai Cilacap diharapkan menjadi semakin baik.



Sumber Data : Subbagian Umum

Sarana dan Prasarana

Guna memaksimalkan kinerja sumber daya manusia di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap perlu adanya dukungan sarana dan prasarana yang memadai untuk pelaksanaan program dan kegiatan instansi yang bersangkutan. Sarana dan prasarana sebagai penunjang pelaksanaan tugas harus selalu dijaga dan ditingkatkan, baik kualitas, kuantitas, maupun kemampuan operasionalnya dan harus disesuaikan dengan kebutuhan. Sarana dan prasarana yang dimiliki Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap untuk menunjang kegiatan pengawasan dan pelayanan per 31 Desember 2022 antara lain berupa:

Tabel 1.1
Sarana dan Prasarana

No	Nama Barang	Jumlah	Luas (m²)	Kondisi		
				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
TANAH						
1	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	5	8.984	5	0	0
2	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	2350	1	0	0
GEDUNG BANGUNAN						
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2	1.426	2	0	0
2	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	1	72	1	0	0
3	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	3	594	0	3	0
4	Gedung Pos Jaga Permanen	1	9	0	0	1
5	Bangunan Lainnya	1	30	1	0	0
6	Bangunan Tempat Parkir	1	178	1	0	0
7	Pagar Permanen	1	960	1	0	0
RUMAH NEGARA						
1	Rumah Negara Golongan I Tipe A Permanen	1	390	1	0	0
2	Rumah Negara Golongan II Tipe B Permanen	1	126	0	0	1
3	Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen	4	280	0	4	0
4	Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen	8	350	0	6	2
5	Rumah Negara Golongan II Tipe E Permanen	6	216	0	3	3

No	Nama Barang	Jumlah	Luas (m ²)	Kondisi		
				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
KENDARAAN						
1	Jeep	1		1	0	0
2	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	4		4	0	0
3	Pick Up	1		0	1	0
4	Pick Up Double Gardan	2		2	0	0
5	Sepeda Motor	7		7	0	0
6	Sepeda Motor Patroli	1		1	0	0
7	Speed Boat / Motor Tempel	2		2	0	0
PERALATAN MESIN KHUSUS TIK						
1	Komputer Jaringan Lainnya	1		1	0	0
2	Monitor	1		1	0	0
3	Note Book	20		18	2	0
4	P.C Unit	32		32	0	0
5	Peralatan Jaringan Lainnya	1		1	0	0
6	Printer (Peralatan Personal Komputer)	20		20	0	0
7	Rak Server	1		1	0	0
8	Repeater and Transciever	1		1	0	0
9	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	3		3	0	0
10	Switch	1		1	0	0
ALAT BESAR						
1	Portable Generating Set	1		1	0	0
2	Stationary Generating Set	1		1	0	0
ALAT PERSENJATAAN						
1	Revolver	4		4	0	0
2	Pistol	10		10	0	0
3	Senapan Semi Otomatis	7		7	0	0
INSTALASI DAN JARINGAN						
1	Jaringan Listrik Lainnya	1		1	0	0

Sumber Data : Subbagian Umum

Anggaran

Selain didukung dengan Sarana dan Prasarana yang memadai, pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pelayanan juga harus dilengkapi dengan anggaran agar kegiatan dapat dilakukan secara maksimal. Pagu Anggaran Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap Tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 1.2
Pagu Anggaran

NO	KEGIATAN	JUMLAH BIAYA (Rp)
1	Pemeriksaan Kepabeanan dan Cukai	90.276.000
2	Sosialisasi dan Penyuluhan (Eksternal)	47.228.000
3	Iklan Layanan Masyarakat	6.600.000
4	Patroli Laut	237.790.000
5	Laporan Hasil Intelijen, Penindakan, dan Penyidikan	165.465.000
6	Operasionalisasi Kantor	1.527.184.000
7	Kerumahtanggan	75.320.000
8	Standar Mutu Layanan – ISO Mutu Layanan	35.000.000
TOTAL ANGGARAN		2.184.863.000

Sumber Data : Subbagian Umum

E. SISTEMATIKA PELAPORAN

Laporan Kinerja Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap Tahun 2022 dibuat sebagai laporan kepada seluruh pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal. Laporan ini disajikan secara sistematis sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor SE-11/BC/2021 tentang Penyusunan Laporan Kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan sistematika sebagai berikut:

1. Kata Pengantar

2. Ringkasan Eksekutif

Memuat intisari laporan untuk memudahkan pimpinan instansi penerima laporan dan/atau pimpinan instansi pelapor mendapatkan informasi tanpa harus membaca seluruh isi laporan atas:

- Realisasi Capaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama;
- Kendala dan Strategi dalam Pencapaian Sasaran Strategis.

3. Daftar Isi

4. BAB I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi, adapun poin-poin yang ditampilkan adalah sebagai berikut:

- Latar belakang

- b. Tugas, fungsi, dan Struktur Organisasi;
- c. Peran Strategis Organisasi;
- d. Sumber Daya Organisasi; dan
- e. Sistematika Pelaporan.

5. BAB II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2022, sebagai berikut:

- a. Rencana Strategis
- b. Penetapan Perjanjian Kinerja: dan
- c. Pengukuran Kinerja

6. BAB III Akuntabilitas Kinerja

- a. Capaian Kinerja Organisasi;

Pada subbab ini disajikan ikhtisar capaian kinerja organisasi sesuai dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Tahun 2022, yang memuat:

- Penjelasan umum terkait status capaian kinerja organisasi (resume jumlah IKU dengan indikator merah, kuning, hijau, atau abu-abu);
- Tabel capaian kinerja organisasi sesuai dengan NKO Tahun 2022.

- b. Narasi Evaluasi dan Analisis IKU Tahun 2022:

Secara umum disajikan pengukuran capaian kinerja organisasi sesuai dengan konsep *Balance Skor Card (BSC)* dengan cara membandingkan antara realisasi capaian IKU yang terdapat dalam Peta Strategi masing-masing unit kerja dengan targetnya, yang sekurangnya berisi dengan hal-hal sebagai berikut, diantaranya:

- Tabel Pencapaian Kinerja per Sasaran Strategis;
- Penjelasan masing-masing IKU yang memuat hal-hal sebagai berikut, diantaranya:
 - Membandingkan antara realisasi dan capaian kinerja dengan:
 - ❖ target yang telah ditetapkan pada awal tahun dan target adendum (jika ada);
 - ❖ realisasi dan capaian kinerja tahun 2021 dan tahun 2022;
 - ❖ pencapaian target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi/ Renstra (jika ada);
 - ❖ standar nasional (jika ada);
 - Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
 - Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
 - Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja; dan
 - Rencana aksi ke depan.

- c. Realisasi Anggaran

Pada subbab ini diuraikan alokasi dan sumber pembiayaan beserta realisasi anggaran yang telah digunakan dalam rangka mendukung kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja, disertai penjelasan mengenai realisasi anggaran.

- d. Capaian Kinerja Lainnya

Pada subbab ini menguraikan capaian-capaian organisasi selama satu tahun, berupa kegiatan-kegiatan *ad hoc* dan kinerja yang terukur di dalam BSC dan uraian kinerja-kinerja lain yang tidak termasuk dalam dokumen Perjanjian Kinerja namun terkait tugas dan fungsi DJBC meliputi penghargaan, inovasi, dan replikasi/*benchmarking* sistem kerja oleh unit lain. serta menampilkan terkait kegiatan pelayanan, pengawasan dan penindakan.

7. BAB IV Penutup

Merupakan uraian simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah-langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk dapat meningkatkan kinerja organisasi.

8. Lampiran-Lampiran

- a. Kontrak Kinerja Tahun 2022
- b. Formulir Pengukuran Kinerja Tahun 2022
- c. Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2022
- d. Hasil Survei Kepuasan Pengguna Jasa Tahun 2022
- e. Sertifikat dan Piagam Prestasi Tahun 2022
- f. Dokumen pendukung lain



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

- A. Rencana Strategis
- B. Penetapan Perjanjian Kinerja
- C. Pengukuran Kinerja

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS



Rencana Strategis merupakan salah satu bagian dari siklus perencanaan pemerintah yang terdiri dari beberapa tahapan. Dimulai dari penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 20 tahunan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 5 tahunan, dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) setiap tahunnya. RPJP yang digunakan sebagai acuan sampai dengan saat ini adalah UU nomor 17 tahun 2007 tentang RPJP Nasional Tahun 2005-2025, sedangkan RPJMN yang berlaku saat ini adalah mengacu pada Peraturan Presiden nomor 18 tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024.

DJBC adalah salah satu institusi yang memegang peranan penting dalam menjaga hak-hak keuangan negara dengan fungsi yang kompleks dan terus berkembang sejalan dengan semakin tingginya aktivitas perdagangan internasional dan tuntutan untuk memenuhi kepentingan nasional. Volume perdagangan yang tinggi dalam era perdagangan bebas membuka peluang bagi industri dalam negeri untuk mampu bersaing di tingkat internasional sekaligus meningkatkan tantangan dan persaingan bagi industri dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik. Di sisi lain, semakin banyaknya aktivitas impor ke dalam negeri khususnya barang mentah atau bahan produksi diharapkan dapat mendorong industri nasional untuk semakin kreatif dan berkembang.

Dalam konteks perdagangan dan daya saing global, peran DJBC sangat besar, khususnya terkait dengan fasilitasi perdagangan dan pengawasan terhadap hak-hak keuangan negara serta perlindungan kepada lingkungan hidup, masyarakat yang menjadi kepentingan nasional. Era globalisasi dan meningkatnya kejahatan lintas negara menjadi tantangan DJBC untuk melindungi kepentingan nasional terutama terkait dengan barang-barang yang dapat menjadi ancaman bagi keamanan nasional. Cita-cita untuk mewujudkan Indonesia yang maju juga membutuhkan peran DJBC dalam mengoptimalkan dan menghindari kebocoran penerimaan negara. Lebih dari itu, DJBC juga harus mampu berperan untuk melindungi lingkungan dan masyarakat dari ancaman barang-barang tertentu melalui instrumen cukai yang juga dapat memberikan kontribusi dalam penerimaan negara guna menopang belanja pemerintah.

Visi dan Misi

Memperhatikan dinamika lingkungan, Visi dan Misi DJBC disempurnakan sehingga mampu mencerminkan cita-cita tertinggi DJBC, mengurangi keambiguan prioritas antar mandat, dan menanamkan kebanggaan dalam jiwa seluruh Sumber Daya Manusia DJBC. Pernyataan visi dan misi yang jelas akan memastikan DJBC memprioritaskan inisiatif transformasi yang selaras dengan aspirasi jangka panjang DJBC dan Kementerian Keuangan untuk berkontribusi dalam pembangunan nasional. Visi dan Misi DJBC yang telah disempurnakan tersebut telah ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-105/BC/2014 tanggal 29 Agustus 2014 tentang Visi, Misi, dan

Fungsi Utama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Adapun visi yang secara umum menjadi cara pandang organisasi adalah Visi Presiden: **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**

Dan demi terwujudnya Visi Presiden, DJBC memiliki Visi:

“Menjadi institusi kepabeanan dan cukai yang terkemuka di dunia”

Misi menyajikan langkah spesifik pencapaian visi dan tujuan transformasi DJBC. Peran DJBC secara umum berkaitan dengan perdagangan, keamanan, dan penerimaan yang menjadi satu kesatuan. Pernyataan Misi DJBC yang telah disempurnakan adalah sebagai berikut:

- a. Kami memfasilitasi Perdagangan dan Industri;
- b. Kami melindungi perbatasan dan masyarakat Indonesia dari penyelundupan dan perdagangan ilegal; dan
- c. Kami optimalkan penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai.

Bea Cukai Cilacap juga dituntut mampu mengantisipasi berbagai dinamika perubahan kebutuhan ekonomi masyarakat. Peran DJBC yang multidimensi mengharuskan jajaran DJBC memiliki cara pandang antisipatif dan luas ke depan dalam tugas dan fungsi. Bea Cukai Cilacap memahami perlunya peningkatan kinerja dan citra dalam tugas dan fungsi. Hal ini tertuang dalam visi Bea Cukai Cilacap

“Menjadi kantor madya pabean terbaik dalam kinerja dan citra”

Penjelasan visi tersebut adalah:

1. **Menjadi yang terbaik**, suatu kondisi yang menempatkan Bea Cukai Cilacap sebagai yang terdepan dalam melaksanakan tugas dan fungsi DJBC.
2. **Kinerja**, suatu pelaksanaan kegiatan, program, dan kebijakan yang ditetapkan untuk kemudian diukur pencapaiannya.
3. **Citra**, suatu kesan yang timbul bagi para pemangku kepentingan atas kinerja Bea Cukai Cilacap.

Makna visi tersebut yaitu tertanam pandangan luas ke depan dan cita-cita untuk menempatkan Bea Cukai Cilacap menjadi salah satu yang terbaik dalam menjalankan tugas dan fungsi serta menimbulkan citra baik dari para pemangku kepentingan. Bea Cukai Cilacap sebagai unsur pelaksana teknis di instansi vertikal DJBC juga memiliki misi yaitu:

“Memberikan pelayanan prima, pengawasan efektif, pembinaan berkelanjutan kepada Pengguna Jasa dan peningkatan kemampuan Institusi.”

Agar pelaksanaan tugas tersebut dapat terealisasi secara optimal, telah dibentuk *motto* penyemangat yaitu:

“Bekerja dengan CINTA”

Penjelasan CINTA adalah:

1. **Cepat**, mampu melayani dengan cepat sesuai dengan janji layanan.
2. **Integritas**, menjunjung tinggi nilai kejujuran, berpikir, berperilaku dan bertindak dengan baik dan benar, berani menyatakan yang diyakini sebagai kebenaran, memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral serta bersikap profesional.
3. **Netral**, memberikan pelayanan dengan standar yang sama kepada pengguna jasa

tanpa keberpihakan kepada pengguna jasa tertentu.

4. **Transparan**, menyelenggarakan layanan dengan persyaratan dan prosedur yang jelas, dijalankan secara terbuka dengan prinsip-prinsip *good governance*.
5. **Akuntabel**, kepastian, kejelasan prosedur kepabeanaan dan cukai, bekerja sesuai SOP dan memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi.

Penetapan Tujuan dan Sasaran

Sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bertanggung jawab pada pencapaian dua tujuan Kementerian Keuangan yaitu:

1. Optimalisasi penerimaan negara dan reformasi administrasi perpajakan serta reformasi kepabeanaan dan cukai; dan
2. Peningkatan pengawasan di bidang kepabeanaan dan cukai serta perbatasan.

Dalam rangka mendukung dua tujuan sebagaimana disebutkan di atas, DJBC telah menetapkan sasaran yang mencerminkan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tertentu yang lebih pendek. Sasaran tersebut diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur dan memiliki kriteria, mengandung arti, rasional, menantang, konsisten satu terhadap yang lainnya, spesifik dan dapat diukur.

1. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan optimalisasi penerimaan negara dan reformasi administrasi perpajakan serta reformasi kepabeanaan dan cukai adalah:
 - a. Peningkatan kelancaran arus barang dalam mendukung Sistem Logistik Nasional, dengan indikator percepatan waktu penyelesaian kepabeanaan

(*customs clearance time*) untuk mendukung upaya penurunan rata-rata *dwelling time*.

- b. Penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai yang optimal, dengan indikator pencapaian target penerimaan bea dan cukai yang ditetapkan dalam APBN/APBN-P.
2. Sasaran strategis yang ingin dicapai untuk peningkatan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai serta perbatasan yaitu optimalisasi pengawasan dalam fungsi *community protection* serta *border*.

Sasaran strategis pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap Tahun 2022 sebagai berikut:

1. Dukungan terhadap perekonomian yang optimal

Dukungan terhadap perekonomian yang optimal adalah upaya yang dilakukan oleh DJBC untuk mendukung terciptanya efisiensi dan efektivitas rantai logistic nasional dan mendorong industri nasional menjadi kreatif dan berkembang supaya mampu bersaing di tingkat internasional dan mampu memenuhi kebutuhan pasar domestik.

2. Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang optimal

tercapainya penerimaan bea masuk, bea keluar, dan cukai sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam APBN atau APBN-P melalui peningkatan kepatuhan pengguna jasa, perbaikan sistem dan proses bisnis, serta optimalisasi kegiatan pengawasan dan pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai.

3. Sinergi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif

rangkaian pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilakukan secara bersama-sama untuk mengawasi seluruh entitas terkait, guna mewujudkan tegaknya hukum di bidang Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai berdasarkan Undang-Undang dalam rangka mengamankan hak-hak keuangan negara, melindungi masyarakat, menjaga perdagangan dan industri dalam negeri, serta kepentingan nasional.

4. Kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai yang tinggi

kepuasan pengguna layanan terhadap pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai yang diukur berdasarkan hasil survei kepuasan pelanggan oleh lembaga independen.

5. Kepatuhan Pengguna Layanan yang Tinggi atas Peraturan Kepabeanan dan Cukai

kondisi tingginya tingkat ketaatan pengguna jasa di bidang kepabeanan dan cukai dalam melaksanakan peraturan pelaksanaan perundang-undangan kepabeanan dan cukai.

6. Perencanaan dan Analisis Formulasi Kebijakan yang Efektif dan Efisien

Untuk menjaga proses perbaikan organisasi yang berkesinambungan (*continously improved*), maka perlu disusun perencanaan serta dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi. Perencanaan adalah proses yang mendefinisikan tujuan dari organisasi, membuat strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan dari organisasi, serta mengembangkan rencana kerja organisasi periode 5 tahunan yang tercantum dalam dokumen perencanaan

(Rencana Strategis ataupun dokumen program). Analisis formulasi kebijakan adalah proses penelaahan permasalahan di bidang kepabeanan dan cukai yang didasari pertimbangan kepentingan nasional dan keselarasan dengan standar internasional. Kebijakan yang berkualitas adalah kebijakan yang sesuai dengan amanah Undang-Undang Kepabeanan dan Cukai dan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

7. Persepsi Positif dan Dukungan Publik Terhadap Kebijakan Kepabeanan dan Cukai

DJBC sebagai salah satu institusi penting di Kementerian Keuangan perlu menyampaikan informasi terkait tugas, fungsi dan kebijakan yang dijalankan kepada masyarakat luas melalui kampanye komunikasi yang efektif dan tepat sasaran serta memberikan pelayanan publik yang prima sehingga berdampak terhadap peningkatan dukungan dan partisipasi publik.

8. Pemeriksaan dan Pengawasan kepabeanan dan cukai yang efektif

Pemeriksaan dan Pengawasan Kepabeanan dan Cukai merupakan kegiatan pemeriksaan secara data, informasi, dan/ atau secara fisik terhadap barang yang berkaitan dengan impor dan/atau ekspor, barang kena cukai (BKC), dan barang lain dan/atau tempat yang berhubungan dengan BKC, serta keseluruhan kegiatan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai yang meliputi kegiatan intelijen, patroli, penindakan, penanganan perkara dalam rangka memastikan dipenuhinya ketentuan

peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai secara efektif.

9. Pengendalian Mutu dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah

Pelaksanaan pengendalian mutu dan Pengawasan internal dilaksanakan untuk memastikan semua pekerjaan telah sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku dan memberikan nilai tambah bagi organisasi dengan memberikan solusi perbaikan yang efektif atas permasalahan yang ditemukan guna tercapainya tujuan organisasi.

10. Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi

Organisasi yang berkinerja tinggi ditunjukkan dengan adanya budaya kerja yang efisien dan efektif untuk meningkatkan produktifitas, mengedepankan objektivitas dan keterbukaan serta mempunyai kemampuan untuk beradaptasi secara fleksibel dan kreatif berinovasi sesuai dengan perkembangan kemajuan dunia luar. SDM yang berkinerja tinggi dapat dilihat dari kompetensi dan integritasnya yang tinggi, bersikap positif dan mampu menyelesaikan setiap pekerjaan dengan baik, serta mau belajar untuk meningkatkan kompetensinya sehingga dapat memberikan hasil yang terbaik untuk organisasi.

11. Sistem Informasi yang Andal dan Terintegrasi

Sistem manajemen informasi yang andal dan terintegrasi akan terwujud dengan adanya pengelolaan TIK yang andal yaitu dengan ketersediaan sistem TIK, penyediaan dan

pemenuhan layanan TIK, serta penyelesaian gangguan layanan TIK kepada pengguna layanan sesuai ketentuan yang disepakati pada Katalog Layanan TIK, SLA, dan/atau Business Impact Analysis (BIA).

12. Pengelolaan keuangan, BMN dan umum yang efisien, efektif dan akuntabel

Pengelolaan keuangan, BMN dan umum yang efisien, efektif dan akuntabel dilakukan dengan:

- a. mengelola anggaran yang tersedia dalam DIPA sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggung

jawabkan dengan menggunakan prinsip hemat efisien dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output yang telah direncanakan dalam DIPA;

- b. mengelola BMN dengan tertib hukum, tertib fisik, dan tertib administrasi guna memastikan pemanfaatan BMN yang Efisien dan efektif oleh seluruh unit/satker; dan
- c. mengelola administrasi umum seperti administrasi ketatausahaan dan kerumahtanggaan secara efektif dan efisien.

B. PENETAPAN PERJANJIAN KINERJA

1. PETA STRATEGI ORGANISASI

Peta Strategis menggambarkan sasaran-sasaran strategis berupa kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi organisasi. Peta Strategis Organisasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap Tahun 2022 sebagaimana Gambar 1.

2. PENETAPAN KONTRAK KINERJA

Kontrak Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja secara jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun. Kontrak kinerja disusun dengan menetapkan sasaran yang mencerminkan sesuatu yang akan dicapai secara nyata dari pelaksanaan program dalam rumusan yang spesifik, terukur, dan berorientasi pada hasil (*outcome*). Dalam penyusunan Kontrak Kinerja juga ditetapkan ukuran-ukuran kinerja yang jelas berupa indikator kinerja serta penetapan rencana tingkat capaian untuk masing-masing indikator. Untuk mengukur sejauh mana pencapaian Sasaran Strategis di atas, maka Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap menetapkan 12 (dua belas) Sasaran Strategis yang terdiri dari 18 (delapan belas) Indikator Kinerja Utama (IKU). Sasaran Strategis dan IKU ini telah dituangkan dalam dokumen Perencanaan Kinerja (PK) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang merupakan kontrak kinerja antara Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap dengan Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta pada tahun 2022. Sasaran Strategis dan IKU Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap pada tahun 2022 sebagaimana telah dijelaskan pada Lampiran huruf a

C. PENGUKURAN KINERJA

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022, Kementerian Keuangan melakukan evaluasi secara berkala atas perencanaan kinerja yang ditetapkan. Salah satu outputnya adalah Nilai Kinerja Organisasi (NKO) yang diperoleh melalui penghitungan dengan menggunakan data target dan realisasi IKU yang tersedia. Dengan membandingkan antara data target dan realisasi, akan diperoleh indeks capaian IKU. Penghitungan indeks capaian IKU perlu memperhitungkan jenis polarisasi IKU yang berlaku yaitu *maximize*, *minimize*, dan *stabilize*. Ketentuan penetapan indeks capaian IKU adalah :

1. Angka maksimum adalah 120;
2. Angka minimum adalah 0;
3. Ketentuan IKU *maximize* dan *minimize* yang realisasinya tidak memungkinkan melebihi target:
 - a. Indeks capaian dapat dikonversi menjadi 120 dengan ketentuan:
 - 1) IKU mengukur kualitas, waktu atau biaya;
 - 2) Jumlah IKU yang dapat dikonversi tersebut adalah maksimal 20% dari total IKU dalam Kontrak Kinerja (1 IKU dari 5 IKU, dan berlaku kelipatan); dan
 - 3) Memprioritaskan IKU cascading peta strategi (CP), kemudian IKU cascading non peta (C), di atas IKU non cascading (N), dalam pemilihan IKU yang dikonversi.
 - b. Penghitungan indeks capaiannya ditetapkan sebagai berikut:
 - 1) Apabila realisasi IKU sama dengan target, dimana target yang ditetapkan merupakan

target maksimal yang dapat dicapai maka indeks capaian IKU tersebut dikonversi menjadi 120;

- 2) Apabila realisasi IKU tidak memenuhi target, maka indeks capaian IKU tersebut tidak dilakukan konversi (menggunakan rumus perhitungan polarisasi).

4. Formula penghitungan indeks capaian IKU untuk setiap jenis polarisasi adalah berbeda, sebagaimana penjelasan berikut:

a. Polarisasi *Maximize*

Pada polarisasi *maximize*, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih tinggi dari target, dengan formula:

Formula 2.1 Polarisasi *Maximize* (realisasi lebih tinggi dari target)

$$\text{Indeks Capaian IKU} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Apabila IKU dengan polarisasi *maximize* memiliki target minus (target < 0), formula yang digunakan:

Formula 2.2 Polarisasi *Maximize* (realisasi lebih rendah dari target)

$$\text{Indeks Capaian IKU} = \left[1 + \left(1 - \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \right) \right] \times 100\%$$

b. Polarisasi *Minimize*

Pada polarisasi *minimize*, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih kecil dari target, dengan formula:

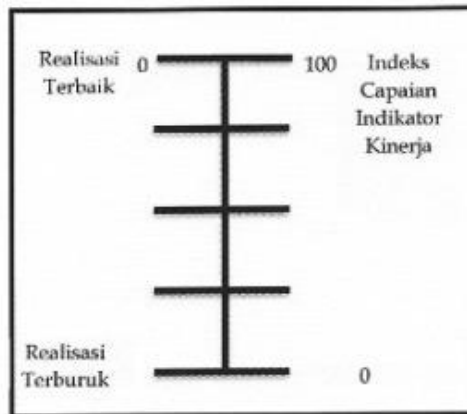
Formula 2.3 Polarisasi *Minimize* (realisasi lebih rendah dari target)

$$\text{Indeks Capaian IKU} = \left[1 + \left(1 - \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \right) \right] \times 100\%$$

Apabila indeks capaian IKU kurang dari 0 atau menghasilkan angka minus,

maka indeks capaian yang diakui adalah 0. Apabila IKU minimize memiliki target 0, maka indeks capaian IKU dihitung dengan menggunakan bantuan skala konversi sebagai berikut:

Gambar 2.1
Skala Konversi IKU Minimize



c. *Polarisasi Stabilize*

Pada polarisasi *stabilize*, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang berada dalam suatu rentang tertentu dibandingkan target, dengan formula:

Formula 2.4 Polarisasi Stabilize

$$\text{Indeks Capaian IKU} = I_{n-1} + \left(\frac{I_{n+1} - I_{n-1}}{C_{n+1} - C_{n-1}} \right) (C_n - C_{n-1})$$

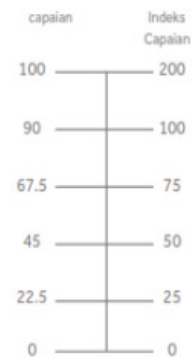
5. Perhitungan Nilai Kinerja Organisasi (NKO)

Untuk mendapatkan NKO, perhitungan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

a. Perhitungan Indeks Capaian IKU

Perhitungan indeks capaian IKU dilakukan dengan membandingkan antara realisasi dengan target berdasarkan formula penghitungan indeks capaian IKU untuk setiap jenis polarisasi sebagaimana telah dijelaskan pada poin 4 diatas.

Gambar 2.2
Skala Konversi capaian dan indeks capaian



- In = Indeks capaian
 In-1 = Indeks capaian dibawahnya
 In+1 = Indeks capaian diatasnya
 Ca = Capaian awal
 Ca = Realisasi/Target X 100%
 Cn = Capaian, dengan ketentuan:
 1. Apabila Realisasi > Target, maka:
 $C_n = 100 - (Ca - 100)$, dimana Ca maksimum adalah 200%
 2. Apabila Realisasi < Target, maka
 3. $C_n = Ca$
 Cn-1 = Capaian dibawah Cn

b. Perhitungan Nilai Sasaran Strategi

Perhitungan nilai sasaran strategis (NSS) dilaksanakan dengan mengkonsolidasikan seluruh indeks capaian IKU dalam suatu SS dengan memperhitungkan bobot tertimbang IKU. Bobot IKU mencerminkan tingkat kualitas dan validitas IKU. Perhitungan NSS adalah sebagai berikut:

1) Perhitungan Bobot Tertimbang IKU

Bobot tertimbang IKU dihitung dengan formula sebagai berikut:

Formula 2.5
Perhitungan bobot tertimbang IKU

$$\text{Bobot Tertimbang IKU} = \frac{\text{Bobot IKU}_i}{\sum_i \text{Bobot IKU dalam 1 SS}}$$

2) Perhitungan NSS

NSS dihitung dengan formula sebagai berikut:

Formula 2.6 Perhitungan NSS

$$NSS = \sum_i (\text{Indeks Capaian IKU}_i \times \text{Bobot Tertimbang IKU}_i)$$

- c. Perhitungan Nilai Prespektif
- Perhitungan Nilai Perspektif (Np) merupakan rata-rata NSS dalam satu perspektif dengan formula sebagai berikut:

Formula 2.7 Perhitungan Np

$$Np = \frac{\sum NSS}{\sum SS}$$

- d. Perhitungan Nilai Kinerja Organisasi
- Perhitungan NKO dilaksanakan dengan menjumlahkan Np berdasarkan bobot perspektif. Adapun bobot perspektif dan rumus perhitungan NKO adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Perhitungan NKO

Perspektif	Bobot 4 Perspektif	Bobot 4 Perspektif
Stakeholder	30%	40%
Customer	20%	-
Internal Process	25%	30%
Learning and Growth	25%	30%

Sumber Data : Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan

Formula 2.8 Perhitungan NKO

$$NKO = \sum_1^i (Np \times \text{Bobot Perspektif})$$

6. Adapun status indeks capaian dan NKO adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2

Indeks capaian dan NKO

Hijau	Kuning	Merah
$100 \leq x \leq 120$	$80 \leq x < 100$	$x < 80$
Memenuhi ekspektasi	Belum memenuhi ekspektasi	Tidak memenuhi ekspektasi

Sumber Data : Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja Organisasi
- B. Narasi dan Evaluasi Analisis IKU
- C. Realisasi Anggaran
- D. Capaian Kinerja Lainnya



AKUNTABILITAS KINERJA

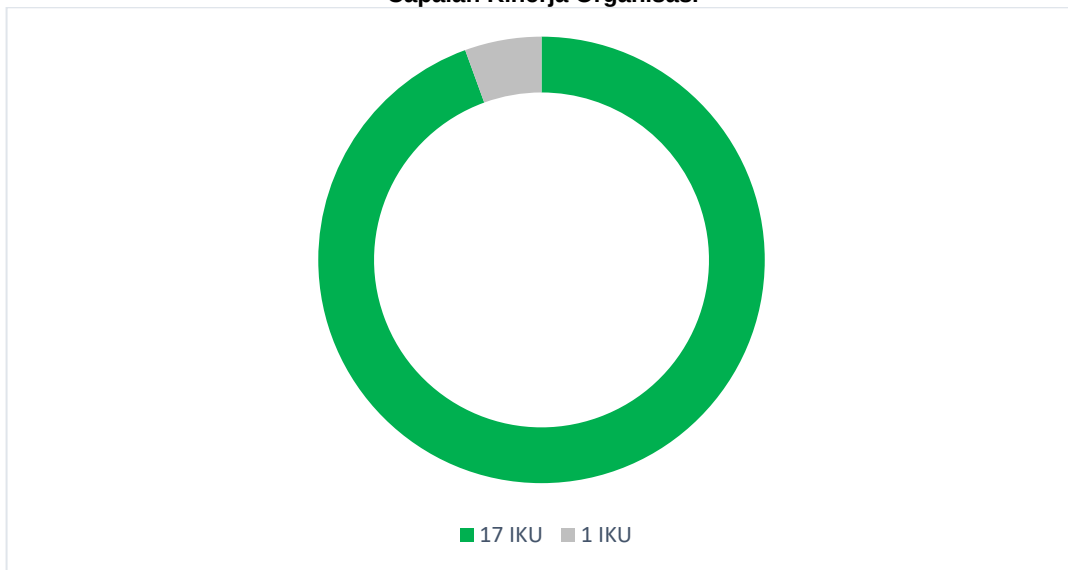


A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap tahun 2022 mengalami kenaikan 1.94 dari tahun sebelumnya yaitu 113.15. Pengukuran tingkat capaian kinerja tersebut dihitung sesuai dengan konsep *Balance Skor Card* (BSC) dengan membandingkan antara realisasi setiap Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terdapat dalam Peta Strategi Kemenkeu-*Three* Tahun 2022 dengan target yang telah ditetapkan di awal periode. Nilai NKO tersebut diperoleh dari nilai dan bobot masing-masing perspektif yaitu *Stakeholder Perspective* (119.58) dengan bobot persepektif 25%, *Customers Perspective* (105.37) bobot persepektif 15%, *Internal Process Perspective* (112.26) bobot persepektif 30%, dan *Learning and Growth Perspective* (112.57) bobot persepektif 30%.

Secara umum target IKU Bea Cukai Cilacap Tahun 2022 sebagaimana tertuang dalam dokumen Kontrak Kinerja tercapai dengan sangat baik yaitu 17 dari 18 IKU berstatus “hijau” (realisasi memiliki indeks capaian sama dengan 100 atau lebih) dan 1 (satu) IKU berstatus “abu-abu” dengan capaian N/A. Tabel rincian data capaian IKU organisasi dapat dilihat di Tabel 2.

Gambar 3.1
Capaian Kinerja Organisasi



Sumber Data : Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan

B. NARASI EVALUASI ANALISIS IKU

Evaluasi dan analisis kinerja dilakukan berdasarkan realisasi pencapaian seluruh Sasaran Strategis yang dinilai dari pencapaian target masing-masing IKU dihitung menggunakan rumus penghitungan NKO (Nilai Kinerja Organisasi), rincian analisis kinerja sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1 Dukungan terhadap perekonomian yang optimal

Kode	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Kinerja
1a-CP	Persentase Efektivitas Asistensi UMKM Berorientasi Ekspor Dalam Rangka PEN	80%	106%	120
1b-N	Persentase Efektivitas Asistensi Perusahaan Rokok dan ekstensifikasi NPPBKC	70%	120%	120

Dukungan terhadap perekonomian yang optimal adalah upaya yang dilakukan oleh DJBC untuk mendukung terciptanya efisiensi dan efektivitas rantai logistik nasional dan mendorong industri nasional menjadi kreatif dan berkembang supaya mampu bersaing di tingkat internasional dan mampu memenuhi kebutuhan pasar domestik.

Capaian Sasaran Strategis ini adalah sebesar 120 yang dikontribusikan dari indikator kinerja utama Persentase Efektivitas Asistensi UMKM Berorientasi Ekspor Dalam Rangka PEN dan Persentase efektivitas asistensi ekspor dan ekstensifikasi NPPBKC.

1a-CP Persentase Efektivitas Asistensi UMKM Berorientasi Ekspor Dalam Rangka PEN

UMKM adalah usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Ketentuan terkait UMKM juga merujuk

pada Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Asistensi UMKM berorientasi ekspor dalam rangka PEN adalah pemberdayaan UMKM untuk meningkatkan perannya dalam pemulihan ekonomi nasional dan pertumbuhan ekonomi melalui kegiatan ekspor.

Efektivitas dari rangkaian kegiatan asistensi yang diukur dalam IKU sebagaimana komponen berikut:

1. Sosialisasi (10%)

Sosialisasi dilaksanakan setiap triwulan, dengan memuat informasi terkait kemudahan pelaksanaan ekspor bagi UMKM dan manfaat ekspor bagi pemerintah daerah. Sosialisasi dilakukan terhadap seluruh UMKM, masyarakat, dan instansi pemerintah daerah terkait.

Unsur yang diukur dari komponen sosialisasi adalah pelaksanaan sosialisasi baik secara daring (online) maupun secara tatap muka (offline) yang dibuktikan dengan dokumentasi terkait.

Jadwal pelaksanaan sosialisasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap di Triwulan ke III.

2. Analisis data dan informasi (50%)

Analisis data dan informasi dilakukan melalui serangkaian kegiatan berikut:

a. Koordinasi dengan instansi terkait (20%)

Koordinasi dilakukan minimal kepada tiga instansi terkait yaitu Pemerintah Daerah, Badan Pusat Statistik setempat, dan/atau Perwakilan Bank Indonesia setempat dalam rangka menggali data yang dibutuhkan dalam peningkatan ekspor daerah melalui UMKM. Koordinasi dapat dilakukan juga kepada instansi lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Koordinasi diukur berdasarkan pelaksanaan koordinasi kepada tiap-tiap instansi dan hasilnya dengan poin sebagai berikut:

Poin 0,5 : Apabila koordinasi telah dilaksanakan.

Poin 1 : Apabila telah mendapatkan data terkait untuk dilakukan analisis.

Poin 1,2 : Apabila instansi terkait bersedia kolaborasi dalam upaya peningkatan ekspor daerah.

b. Penyampaian Hasil Analisis (80%)

Setelah mendapatkan data dari instansi terkait, dilakukan analisis terhadap data-data tersebut sehingga didapatkan data dan informasi terkait potensi peningkatan ekspor untuk setiap kota/ kabupaten, UMKM yang berkaitan, disertai data pendukung lainnya.

Data dan informasi hasil analisis disusun ke dalam matriks data dan informasi yang telah distandarkan oleh Direktorat Kepatuhan Internal, dan disampaikan kepada dan disampaikan kepada Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta pada tanggal 15 Juni 2022, dan dapat dilakukan pembaharuan s.d. tanggal 15 September 2022. Penyusunan hasil analisis diukur berdasarkan kelengkapan data dan informasi yang dicantumkan dalam matriks yang disampaikan, serta kelengkapan data tambahan analisis terhadap daerah (kota/ kabupaten) yang tidak memiliki potensi peningkatan ekspor.

3. Asistensi (40%)

a. Pelaksanaan Asistensi (20%)

Asistensi dilaksanakan terhadap UMKM yang telah ditentukan dalam matriks data dan informasi hasil analisis dengan tujuan agar UMKM dimaksud dapat memberikan atau meningkatkan kontribusinya terhadap ekspor (kontribusi terhadap ekspor secara langsung maupun tidak langsung).

Pelaksanaan asistensi berbeda dengan sosialisasi. Kegiatan asistensi cenderung dilakukan secara langsung di lokasi UMKM yang menjadi target asistensi, atau dapat dilaksanakan secara online dengan tetap mempertimbangkan efektivitas dari kegiatan asistensi.

Pelaksanaan asistensi diukur dengan membandingkan antara jumlah asistensi yang telah dilaksanakan dengan jumlah UMKM yang direncanakan untuk dilakukan asistensi.

b. Tindak Lanjut/ Hasil Asistensi (80%)

Tindak lanjut/ hasil asistensi merupakan kelanjutan kegiatan dari asistensi untuk semakin mendekati hasil yang diharapkan, yaitu optimalisasi peran UMKM dalam mendukung peningkatan ekspor (secara langsung maupun tidak langsung).

UMKM yang diperhitungkan hanya terhadap UMKM yang ditentukan untuk diperhitungkan dalam hasil asistensi, dapat berbeda jumlahnya dengan UMKM yang ditentukan untuk asistensi, misalnya sejumlah 3 UMKM ditentukan untuk dilakukan asistensi, sedangkan untuk dihitung hasil asistensinya adalah terhadap 1 UMKM. Tindak lanjut/ hasil asistensi dihitung berdasarkan 2 kategori UMKM yaitu UMKM yang telah menjadi eksportir dan UMKM yang belum menjadi eksportir.

Tabel 3.1
Persentase Efektivitas Asistensi UMKM Berorientasi Ekspor Dalam Rangka PEN

T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Pol / K.P.
Target	-	30%	50%	80%	Max / TLK
Realisasi	-	52.00	70%	94%	
Capaian	N/A	120	120	117.5	

Sumber Data : Seksi Kepatuhan Internal dan Penyaluran

Adapun nilai capaian tersebut diperoleh melalui formula perhitungan sebagai berikut:

Formula 3.1
Persentase Efektivitas Asistensi UMKM Berorientasi Ekspor Dalam Rangka PEN

$$Realisasi\ 1 = \left(\frac{\sum \text{Sosialisasi yang telah dilaksanakan}}{1} \right) \times 10\%$$

$$Realisasi\ 2 = \left(\left(\frac{\sum \text{Poin koordinasi}}{\sum \text{Instansi terkait}} \right) \times 20\% \right) +$$

$$\left(\frac{\sum \text{Kota dan/atau kabupaten yang telah dilakukan analisis}}{\sum \text{Kota dan/atau kabupaten di lingkungan kerja Unit Organisasi}} + \frac{\sum \text{Kota dan/atau kabupaten yang dilengkapi data tambahan}}{\sum \text{Kota dan/atau kabupaten yang tidak ada potensi}} \right) \times 80\%$$

$$Realisasi\ 3 = ((\frac{\sum \text{Asistensi yang telah dilaksanakan}}{\sum \text{UMKM yang ditentukan untuk diasistensi}}) \times 20\%) +$$

$$(\frac{\sum \text{Poin tindak lanjut (hasil asistensi)}}{\sum \text{UMKM yang diperhitungkan}}) \times 80\%)$$

$$Realisasi\ IKU = (Realisasi\ 1 \times 10\%) + (Realisasi\ 2 \times 50\%) + (Realisasi\ 3 \times 40\%)$$

Tabel 3.2
Rincian kegiatan Koordinasi, Sosialisasi, Asistensi dan Hasil Asistensi UMKM Berorientasi Ekspor

KOORDINASI	
Koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kebumen sesuai dengan Surat Tugas Kepala Kantor Nomor ST-117/KBC.10004/2022 hal 18 Mei 2022 dan Instansi yang bersangkutan bersedia kolaborasi dalam upaya peningkatan ekspor daerah	Koordinasi dengan Badan Pusat Statistik Cilacap sesuai dengan Surat Tugas Kepala Kantor Nomor ST-138/KBC.1004/2022 tanggal 02 Juni 2022 dan Instansi yang bersangkutan bersedia kolaborasi dalam upaya peningkatan ekspor daerah
Koordinasi dengan Pemerintah Daerah Cilacap sesuai dengan Surat Tugas Kepala Kantor Nomor ST-154/KBC.1004/2022 tanggal 16 Juni 2022 dan Instansi yang bersangkutan bersedia kolaborasi dalam upaya peningkatan ekspor daerah	Koordinasi dengan Bank Indonesia di Purwokerto sesuai dengan Surat Tugas Kepala Kantor Nomor ST-190/KBC.1004/2022 tanggal 07 Juli 2022 dan Instansi yang bersangkutan bersedia kolaborasi dalam upaya peningkatan ekspor daerah
SOSIALISASI	
Sosialisasi Peningkatan Sektor UMKM Go Ekspor pada tanggal 18 Agustus 2022 sesuai dengan Undangan Kepala KPPBC TMP C Cilacap nomor UND-18/KBC.1004/2022 tanggal 15 Agustus 2022 hal Undangan Sosialisasi Peningkatan Sektor UMKM Go Ekspor	
ASISTENSI	
PT Kaka Akrom Solution pada 27 September 2022 sesuai ST-305/KBC.1004/2022 tanggal 26 September 2022	CV Aditya pada 09 November 2022 sesuai ST-378/KBC.1004/2022 tanggal 08 November 2022
CV Yuam Roasted Coffe pada 09 November 2022 sesuai ST-378/KBC.1004/2022 tanggal 08 November 2022	PT Moyang pada 07 Desember 2022 sesuai ST-421/KBC.1004/2022 tanggal 07 Desember 2022

HASIL ASISTENSI	
Mempertemukan CV Yuam Roasted Coffe dengan pembeli baru dalam negeri yang akan melakukan ekspor (trader) yaitu PT Vadil Jaya Valeska (0.5 poin)	Mempertemukan PT Moyang dengan pembeli baru dalam negeri yang akan melakukan ekspor (trader) yaitu PT Vadil Jaya Valeska (0.5 poin)
PT Moyang melakukan Ekspor Perdana (menjadi eksportir baru) yaitu pada tahun 2022 dengan melakukan ekspor senilai Rp 286.440.000 (1 poin)	CV Aditya melakukan Ekspor Perdana (menjadi eksportir baru) yaitu pada tahun 2022 dengan melakukan ekspor senilai Rp 900.000.000 (1 poin).

Realisasi indikator kinerja ini adalah sebesar indeks 94% dari target yang telah ditetapkan pada dokumen Kontrak Kinerja tahun 2022 yaitu sebesar indeks 80% sehingga capaian indikator kinerja ini adalah sebesar 117.5. Adapun upaya yang dilakukan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap untuk mencapai IKU ini adalah sebagai berikut:

- Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk berkolaborasi meningkatkan ekspor melalui UMKM.
- Melaksanakan sosialisasi kepada para pemilik UMKM terkait tata cara ekspor.
- Melakukan asistensi secara intens kepada para pemilik UMKM.

Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kinerja indikator ini di tahun 2023, akan meningkatkan kegiatan sosialisasi kepada para pengusaha UMKM, meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam membina para pengusaha UMKM serta menggali potensi UMKM pada Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Kebumen lebih dalam lagi agar muncul UMKM yang dapat melakukan ekspor produknya ke luar negeri baik secara mandiri ataupun melalui jasa titipan.

1b-N Persentase Efektivitas Asistensi Perusahaan Rokok dan ekstensifikasi NPPBKC



Latar belakang dibentuknya IKU Persentase asistensi Perusahaan Rokok dan ekstentifikasi NPPBKC adalah untuk mendukung program pemulihan ekonomi nasional serta mengoptimalkan fungsi DJBC dalam rangka memberikan dukungan dalam perekonomian nasional.

Kegiatan asistensi kepada pelaku usaha juga merupakan salah satu upaya Bea Cukai Cilacap untuk melindungi industri dalam negeri dari tekanan dampak pandemi Covid-19. Asistensi dilakukan agar kegiatan industri dapat berjalan secara terukur baik di pasar nasional maupun pasar global. Kegiatan asistensi Perusahaan Rokok yang telah mempunyai NPPBKC dilakukan agar Perusahaan

lebih berkembang dan lebih patuh terhadap peraturan yang berlaku, sedangkan kegiatan ekstentifikasi NPPBKC difokuskan agar perusahaan rokok yang belum legal dapat menjadi legal dan memiliki NPPBKC

IKU Persentase asistensi Perusahaan Rokok dan ekstentifikasi NPPBKC merupakan IKU *non cascading* dengan 4 (empat) komponen penilaian, yaitu:

a. Pelaksanaan Sosialisasi tentang Cukai (Bobot 20%)

Pelaksanaan sosialisasi dapat dilakukan melalui kegiatan tatap muka, kunjungan ke perusahaan, atau melalui media daring seperti zoom. Jumlah target sosialisasi cukai adalah 2 kali dalam setahun.

b. Koordinasi dengan instansi terkait (Bobot 30%)

Pelaksanaan koordinasi dapat dilakukan melalui kegiatan tatap muka, kunjungan ke instansi terkait, atau melalui media daring seperti zoom. Objek koordinasi adalah instansi yang terkait dengan kegiatan tentang cukai dan penggunaan DBHCHT. Jumlah target koordinasi cukai (NPPBKC) sebanyak 2 kali dalam setahun

c. Pelaksanaan Asistensi (Bobot 30%)

Jumlah target pelaksanaan asistensi 9 kali yang dibuktikan dengan Surat Tugas.

Pelaksanaan asistensi meliputi:

- 1) Asistensi tentang kepatuhan perizinan dan syarat-syarat lokasi Perusahaan
- 2) Asistensi tentang pentingnya pemutakhiran data (memastikan kondisi di lapangan sama dengan data yang tercantum dalam NPPBKC)
- 3) Asistensi tentang pencatatan dan pelekatan pita cukai
- 4) Asistensi tentang kesesuaian kemasan BKC sesuai dengan Peraturan yang berlaku

d. Komponen hasil (Bobot 20%)

1) Sudah ada NPPBKC

Persentase kepatuhan pengguna jasa (Maksimal nilai 100%) yang terdiri dari:

- a) Kepatuhan Data Perizinan
- b) Kepatuhan Persyaratan Lokasi
- c) Kepatuhan Pemutakhiran Data
- d) Kepatuhan Pencatatan dan Pelekatan Pita Cukai
- e) Kepatuhan kesesuaian kemasan

Peningkatan produksi (penambahan nilai 20%) yang dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a) Peningkatan kualitas kemasan
- b) Peningkatan kualitas produksi
- c) Peningkatan nilai cukai
- d) Peningkatan mutu
- e) Perluasan pasar

2) NPPBKC Baru

Komponen hasil terdiri dari:

- a) Pengajuan permohonan pemeriksaan lokasi (nilai 50%)

- b) Pemeriksaan lokasi (nilai 75%)
- c) Permohonan Penerbitan NPPBKC (nilai 85%)
- d) Penerbitan NPPBKC (nilai 100%)
- e) Apabila terbit NPPBKC lebih dari 1 (nilai 120%)

Tabel 3.3
Persentase efektivitas asistensi ekspor dan ekstentifikasi NPPBKC

T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Pol / K.P.
Target	15%	35%	55%	70%	Max / TLK
Realisasi	20%	60%	120%	120%	
Capaian	120	120	120	120	

Sumber Data : Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan

Indikator ini merupakan indikator kinerja baru untuk tahun 2022. Adapun nilai capaian tersebut diperoleh melalui formula perhitungan sebagai berikut:

Formula 3.2
Persentase efektivitas asistensi ekspor dan ekstentifikasi NPPBKC

$$\left(\frac{\text{Jumlah pelaksanaan sosialisasi}}{\text{Target pelaksanaan sosialisasi}} \right) \times 20\% + \left(\frac{\text{Pelaksanaan Koordinasi dengan Instansi terkait}}{\text{Target pelaksanaan koordinasi}} \right) \times 30\% + \left(\frac{\text{Jumlah pelaksanaan asistensi}}{\text{Jumlah target pelaksanaan}} \right) \times 30\% + \left(\frac{\text{Jumlah Nilai Hasil}}{n} \right) \times 20\%$$

Realisasi indikator kinerja ini adalah sebesar indeks 120% dari target yang telah ditetapkan pada dokumen Kontrak Kinerja tahun 2022 yaitu sebesar indeks 70% sehingga capaian indikator kinerja ini adalah sebesar 120. Adapun upaya yang dilakukan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap untuk mencapai IKU ini adalah sebagai berikut:

- d. Melaksanakan sosialisasi perizinan NPPBKC bersama Pemerintah Daerah Kebumen dan menerapkan sosialisasi langsung secara *door to door* ke produsen Hasil Tembakau ilegal.
- e. Melaksanakan kegiatan kemudahan perizinan bersama KPP Pratama Kebumen, Kecamatan Petanahan, Disperindag Kebumen, dan DPMPSTSP Kebumen untuk penerbitan NPWP, NIB dan NPPBKC untuk calon pengusaha Barang Kena Cukai legal.
- f. Melaksanakan sosialisasi ke toko dan warung tentang rokok ilegal.
- g. Melaksanakan asistensi secara intensif mulai dari permohonan pemeriksaan lokasi, permohonan penerbitan NPPBKC hingga proses pengajuan merknya.

Detail kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun 2022 antara lain:

Tabel 3.4
Rincian kegiatan asistensi ekspor, Asistensi dan ekstentifikasi NPPBKC

Sosialisasi Ketentuan Cukai	
ST-157/KBC.1004/2022 Sosialisasi Gempur Rokok Ilegal dengan PJT di Daerah Kebumen	ST-159/KBC.1004/2022 Sosialisasi Gempur Rokok Ilegal dengan Sales Rokok di Daerah Kebumen
ST-180/KBC.1004/2022 Sosialisasi Gempur Rokok Ilegal dengan Masyarakat Kebumen di Daerah Kebumen pada acara Geo Bike	ST-209/KBC.1004/2022 Sosialisasi Gempur Rokok Ilegal di Daerah Kabupaten Cilacap
ST-210/KBC.1004/2022 Sosialisasi Gempur Rokok Ilegal di Kecamatan Buayan, Kebumen dan Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap.	ST-227/KBC.1004/2022 Sosialisasi Gempur Rokok Ilegal di Kecamatan Ayah, Kebumen.
ST-238/KBC.1004/2022 Sosialisasi Gempur Rokok Ilegal di Kecamatan Rowokele, Kebumen.	ST-256/KBC.1004/2022 Sosialisasi Gempur Rokok Ilegal di Hotel Mexolie, Kebumen.
ST-260/KBC.1004/2022 Sosialisasi Gempur Rokok Ilegal di Hotel Candisari, Kebumen.	ST-285/KBC.1004/2022 Sosialisasi Gempur Rokok Ilegal di Objek Wisata Air Panas Krakal, Kebumen
ST-288/KBC.1004/2022 Sosialisasi Gempur Rokok Ilegal di Kecamatan Cimanggu, Cilacap	ST-294/KBC.1004/2022 Sosialisasi Gempur Rokok Ilegal di Kecamatan Bonorowo, Kebumen
ST-303/KBC.1004/2022 Sosialisasi Gempur Rokok Ilegal di Event Festival Penggel, Kebumen	ST-306/KBC.1004/2022 Sosialisasi Gempur Rokok Ilegal di Kecamatan Padureso, Kebumen
ST-315/KBC.1004/2022 Sosialisasi Gempur Rokok Ilegal di Kecamatan Sampang, Cilacap	ST-332/KBC.1004/2022 Sosialisasi Gempur Rokok Ilegal di Lapangan Pendopo Objek Wisata Pantai Karangbolong, Kebumen.
ST-334/KBC.1004/2022 Sosialisasi Gempur Rokok Ilegal di Halaman Rumah Kades Banjurmukadan Buluspesantren, Kebumen	ST-346/KBC.1004/2022 Sosialisasi Gempur Rokok Ilegal di Balai Desa Banjareja Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen
ST-366/KBC.1004/2022 Sosialisasi Gempur Rokok Ilegal di Desa Wonosigro, Kecamatan Gombang, Kebumen pada 05 November 2022	ST-374/KBC.1004/2022 Sosialisasi Gempur Rokok Ilegal di Pendopo Kecamatan Binangun, Cilacap pada 08 November 2022
ST-374/KBC.1004/2022 Sosialisasi Gempur Rokok Ilegal di Pendopo Kecamatan Sampang, Cilacap pada 09 November 2022	ST-374/KBC.1004/2022 Sosialisasi Gempur Rokok Ilegal di Pendopo Kecamatan Jeruklegi, Cilacap pada 10 November 2022.
ST-384/KBC.1004/2022 Sosialisasi Gempur Rokok Ilegal di acara Plesir Motoran di Kebumen	ST-419/KBC.1004/2022 Sosialisasi Gempur Rokok Ilegal di Kecamatan Gandrungmangu, Cilacap pada 6 Desember 2022.

dan Parade Sinden di Desa Pejengkolan, Kebumen pada 13 November 2022	
ST-422/KBC.1004/2022 Sosialisasi Gempur Rokok Ilegal di Kecamatan Cimanggu, Cilacap pada 7 Desember 2022	

Sumber Data : Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan

Asistensi	
Surat Tugas Nomor ST-103/KBC.1004/2022 tanggal 27 April 2022 hal ST Bimbingan Teknis di Bidang Cukai Kepada PR Prabu Jaya Utama 27 April 2022	ST-133/KBC.1004/2022 tanggal 31 Mei 2022 hal ST Bimbingan Teknis di Bidang Cukai kepada PR Rizki Mulya pada tanggal 31 Mei 2022.
ST-165/KBC.1004/2022 tanggal 24 Juni 2022 hal ST Bimbingan Teknis di Bidang Cukai kepada PR Shinta.	ST-206/KBC.1004/2022 tanggal 20 Juli 2022 hal ST Bimbingan Teknis di Bidang Cukai kepada PR Janoko pada tanggal 20 Juli 2022
ST-261/KBC.1004/2022 tanggal 30 Agustus 2022 hal ST Bimbingan Teknis di Bidang Cukai kepada PR Nusa Harapan pada tanggal 30 Agustus 2022	ST-309/KBC.1004/2022 tanggal 30 Agustus 2022 hal ST Bimbingan Teknis di Bidang Cukai kepada PR Padi Unggul pada tanggal 29 September 2022
ST-348/KBC.1004/2022 tanggal 28/10/2022 tentang Bimbingan Teknis di Bidang Cukai kepada PR Gunung Mas, Petanahan pada tanggal 31 Oktober 2022	ST-413/KBC.1004/2022 tanggal 29/11/2022 tentang Bimbingan Teknis di Bidang Cukai kepada PR Sartinah, Petanahan.
ST-437/KBC.1004/2022 tanggal 28/12/2022 tentang Bimbingan Teknis di Bidang Cukai kepada PR Ganda Arum, Petanahan.	

Sumber Data : Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan

Dengan upaya tersebut, pada Tahun 2022 Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap berhasil menerbitkan 2 NPPBKC baru.

PR Sartinah	PR Ganda Arum
KEP-181/KBC.1004/2022 tanggal 26 Agustus 2022 tentang Pemberian NPPBKC sebagai Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau Kepada PR Sartinah di Kebumen	KEP-182/KBC.1004/2022 tanggal 26 Agustus 2022 tentang Pemberian NPPBKC sebagai Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau Kepada PR Ganda Arum di Kebumen

Sumber Data : Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan

Selain asistensi untuk ekstensifikasi NPPBKC sebagai langkah selanjutnya Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap juga senantiasa membantu, membimbing, dan memonitoring Pengguna Jasa dalam melakukan pencatatan dan pelaporan.

Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kinerja indikator ini di tahun 2023, akan dilakukan sosialisasi, asistensi, dan koordinasi secara lebih efektif dan efisien, serta memberikan solusi bagi calon Perusahaan Rokok yang ingin mendaftarkan NPPBKC ataupun UMKM yang berpotensi ekspor apabila terdapat kendala.

Sasaran Strategis 2 Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang optimal

Kode	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Kinerja
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan bea dan cukai	100%	121.03%	120

Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang optimal adalah adalah tercapainya penerimaan bea masuk, bea keluar, dan cukai sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam APBN atau APBN-P.

Capaian sasaran strategis ini adalah sebesar 120 yang dikontribusikan dari indikator kinerja yaitu Persentase realisasi penerimaan bea dan cukai. Realisasi penerimaan bea dan cukai merupakan realisasi penerimaan *netto* yang terdiri dari bea masuk, bea keluar, dan cukai termasuk sanksi, denda administrasi, bunga dengan memperhitungkan adanya restitusi, dengan target senilai yang telah ditentukan dalam Undang-Undang APBN atau APBN Perubahan.

Yang dimaksud restitusi adalah pengembalian atas kelebihan pembayaran bea masuk, bea keluar, dan cukai, serta sanksi administrasi berupa denda atau bunga dalam rangka kepabeanan dan cukai.

Tahun 2022 realisasi persentase realisasi penerimaan bea dan cukai adalah sebesar 121.03% dari target yang ditetapkan pada dokumen Rencana Strategis dan Kontrak Kinerja DJBC tahun 2022 yaitu sebesar 100%, sehingga capaian indikator kinerja ini adalah 120.

2a-CP Persentase realisasi penerimaan bea dan cukai

Tabel 3.5
Persentase realisasi penerimaan bea dan cukai

T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Pol / K.P.
Target	24.09%	48.85%	69.98%	100.00%	Max / TLK
Realisasi	52.01%	67.28%	68.42%	121.03%	
Capaian	120	120	97.77	120	

Sumber Data : Seksi Perbendaharaan

Mengingat bahwa di lingkungan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap sumber penerimaan kepabeanan bergantung dengan PT Dharmapala Usaha Sukses dan sumber penerimaan cukai dari PT HM Sampoerna Tbk, target penerimaan bea dan cukai di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap sebagaimana data berikut:

Tabel 3.6
Target penerimaan Tahun 2017 s.d. 2021

No	Jenis Penerimaan	2018	2019	2020	2021	2022
1	Bea Masuk	105.545.501.000	77.258.567.000	60.850.000.000	77.000.000.000	80.580.247.000
2	Bea Keluar	0	0	0	0	0
3	Cukai	101.087.111.000	118.000.000.000	190.184.999.000	102.320.000.000	124.419.753.000
Total		206.632.612.000	195.258.567.000	251.034.999.000	179.320.000.000	205.000.000.000
Kenaikan		-73.359.818.000	-11.374.045.000	55.776.432.000	-71.714.999.000	25.680.000.000
Persentase		-26.20%	-5.50%	28.57%	-28.57%	14.32%

Sumber Data : Seksi Perbendaharaan

Target penerimaan kepabeanan dan cukai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap adalah target penerimaan bea masuk, bea keluar, dan cukai disesuaikan dengan distribusi target dari Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Target penerimaan

Penerimaan kepabeanan yang semula Rp76.000.000.000 menjadi Rp80.580.247.000, sedangkan untuk penerimaan cukai awalnya ditargetkan sebesar Rp54.000.000.000 kemudian diubah menjadi Rp124.419.753.000 sesuai dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor KEP-61/WBC.10/2022 tentang Distribusi Target Penerimaan Bea Masuk, Bea Keluar, dan Cukai per Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai di Lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan DIY Tahun Anggaran 2022 sebagaimana terakhir diubah dengan KEP-586/WBC.10/2022.

Tabel 3.7
Target penerimaan kepabeanan dan cukai TA 2022 serta perubahannya

Jenis Penerimaan	Target KEP-61	Target KEP-80	Target KEP-446	Target KEP-586
Bea Masuk	76.000.000.000	76.000.000.000	80.580.247.000	80.580.247.000
Cukai	54.000.000.000	54.000.000.000	124.419.753.000	124.419.753.000
Jumlah	130.000.000.000	130.000.000.000	205.000.000.000	205.000.000.000

Sumber Data : Seksi Perbendaharaan

Sementara dari sisi capaian, realisasi penerimaan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap *year on year* (YoY) juga menunjukkan penurunan, hanya pada Tahun 2021 terjadi kenaikan 35.62%.

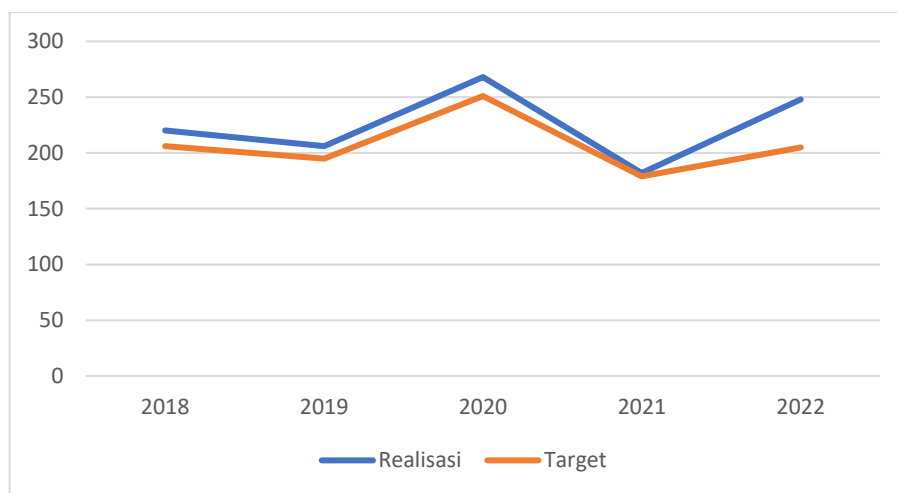
Tabel 3.8
Capaian penerimaan Tahun 2017 s.d. 2021

No	Jenis Penerimaan	2018	2019	2020	2021	2022
1	Bea Masuk	73.282.633.000	66.955.611.000	76.465.818.000	77.558.148.000	87.165.724.000

No	Jenis Penerimaan	2018	2019	2020	2021	2022
2	Bea Keluar	13.636.360	12.272.724	276.804.636	2.727.272	0
3	Cukai	146.974.939.200	139.438.918.775	191.577.468.640	105.378.244.000	160.943.592.600
Total		220.271.208.560	206.406.802.449	268.320.091.276	182.939.119.272	248.109.316.600
Kenaikan		-71.105.662.766	-13.987.133.061	61.913.288.777	-121.025.830.495	55.565.348.600
Persentase		-24,39%	-6,35%	30,00%	-45,11	35.62%

Sumber Data : Seksi Perbendaharaan

Grafik 3.1
Target dan realisasi penerimaan Tahun 2018 s.d. 2022 (dalam miliar rupiah)



Sumber Data : Seksi Perbendaharaan

Dibandingkan dengan capaian tahun 2021, realisasi penerimaan bea masuk mengalami kenaikan Rp9.607.576.000 atau 12,38%, realisasi penerimaan cukai juga mengalami kenaikan Rp55.565.348.600 atau 52,72%. Namun demikian, realisasi penerimaan bea keluar menunjukkan penurunan yaitu sama sekali tidak ada penerimaan bea keluar atau -100%.

1. Penerimaan Bea Masuk

Penerimaan Bea Masuk sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp87.165.724.000 atau 108,17% dari target yang telah ditetapkan. Penerimaan tersebut naik 12,38% (YoY) dari realisasi Bea Masuk tahun 2021. Penerimaan Bea Masuk mengalami kenaikan sejak kuartal pertama tahun 2022 karena pada bulan Januari

2022 sudah terdapat penerimaan Bea Masuk dari importasi Raw Sugar PT. Dharmapala Usaha Sukses. Pada Tahun 2022 penerimaan Bea Masuk dipengaruhi terutama oleh kegiatan importasi raw sugar milik PT Dharmapala Usaha Sukses dimana importasi gula tersebut dibatasi dengan Surat Persetujuan Impor atau kuota yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan. Pada Tahun 2022 PT Dharmapala Usaha Sukses mempunyai kuota impor 235 MT naik 5.9 MT atau 0,25% dari tahun sebelumnya dan mempunyai kuota impor dengan fasilitas KITE sebesar 25 MT. Kuota impor raw sugar (non KITE) direalisasikan seluruhnya, sedangkan untuk kuota impor KITE hanya direalisasikan sebanyak 12 MT, maka pada akhir Desember 2022 masih terdapat sisa

kuota impor KITE sebanyak 13 MT. Sampai dengan 31 Desember 2022, atas importasi KITE tersebut belum terdapat realisasi ekspor, sehingga belum terdapat pengembalian bea masuk.

Pada Tahun 2022 juga ada importasi sapi yang melalui Bea Cukai Cilacap dari PT Berdikari dan PT Citra Agro Buana Semesta, akan tetapi Bea Masuk kedua sapi tersebut 0%. Faktor lain yang menjadi penyebab kenaikan bea masuk yaitu adanya penerimaan bea masuk dari registrasi IMEI untuk produk handphone, komputer genggam, dan tablet sebesar Rp74.845.000.

2. Penerimaan Bea Keluar

Pada tahun 2022 penerimaan bea keluar mengalami penurunan sebesar Rp2.727.272 atau -100% dari Tahun 2021. Hal tersebut disebabkan karena pada Tahun 2021, penerimaan Bea Keluar hanya berasal dari cicilan piutang macet PT Petroindo Utama sebesar Rp2.727.272, sedangkan di tahun 2022 tidak terdapat penerimaan bea keluar.

3. Penerimaan cukai

Secara total, penerimaan cukai tahun 2022 mencapai Rp160.943.592.600 atau 129,36% dari target yang telah ditetapkan, naik Rp55.565.348.600 atau 52,72%. Penerimaan cukai terdiri dari penerimaan cukai hasil tembakau dan cukai lainnya.

a. Cukai Hasil Tembakau (CHT)

Cukai HT dari tahun ke tahun menjadi penyumbang terbesar penerimaan cukai bahkan total penerimaan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap. Penerimaan cukai HT tahun 2022 mencapai Rp160.943.592.600 atau 129,36% dari target yang telah ditetapkan, naik Rp55.565.348.600 atau 52,72%. Penerimaan

Cukai pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap masih sangat bergantung pada PT HM Sampoerna Tbk, lebih dari 99,54% penerimaan cukai berasal dari pelunasan pemesanan pita cukai (CK-1) PT HM Sampoerna Tbk dengan hasil produksi SKT, KLM dan SPT. Sedangkan penerimaan cukai hasil tembakau lainnya, yaitu sekitar 0,2% dari kontribusi 12 (dua belas) Perusahaan Rokok dengan hasil produksi Kelembak Menyan (KLM) yaitu PR Shinta, PR Sintren, PR Mirasa, PR Padi Unggul, PR Nusa Harapan, PR Gunung Mas, PR Janoko, PR Rizki Mulya, PR Arjuna Dewiku, PR Sartinah, PR Ganda Arum dan 1 (satu) Perusahaan Rokok yang memproduksi Cerutu (CRT) yaitu PR Prabu Jaya Utama. Keduabelas pabrik tersebut berlokasi di wilayah Gombong, Petanahan dan Sempor, Kebumen.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kenaikan penerimaan cukai Hasil Tembakau, di antaranya adalah adanya kenaikan tarif KLM Golongan I yang semula Rp25,- menjadi Rp440,-, serta adanya pelunasan CK-1 kredit PT. HM Sampoerna, Tbk. Yang seharusnya jatuh tempo Januari 2023 dan Februari 2023, dilunasi pada Desember 2022 dengan nilai sebesar Rp33.580.800.000.

b. Cukai Lainnya

Pendapatan cukai lainnya sebesar Rp403.471.600 yang berasal dari denda cukai karena menjual MMEA tanpa memiliki izin NPPBKC sebesar Rp80.000.000 dan pendapatan cukai lainnya seperti pembayaran atas biaya pengganti pencetakan pita cukai sebesar Rp323.471.600. Sedangkan dari cukai plastik sampai dengan tahun 2022 masih belum terdapat realisasi penerimaan.

Dalam pencapaian target penerimaan Bea Masuk, Bea Keluar, dan Cukai Hasil Tembakau yang

dibebankan kepada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap terdapat beberapa kendala yang dihadapi. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaian target yaitu distribusi target penerimaan Bea Masuk, Bea Keluar, dan Cukai tahun anggaran 2022 dari Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta di atas proyeksi penerimaan yang diusulkan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap, sehingga untuk mencapai target dibutuhkan effort yang luar biasa.

Dalam rangka mencapai target penerimaan yang telah ditetapkan dan sebagai rencana aksi yang akan dilakukan pada tahun 2023, maka Kantor

Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- Melakukan koordinasi dengan Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta terkait proyeksi penerimaan Bea Masuk, Bea Keluar, dan Cukai secara periodik.
- Melakukan monitoring dan evaluasi penerimaan khususnya penerimaan cukai setiap bulannya berdasarkan dokumen Permohonan Penyediaan Pita Cukai (P3C).
- Melakukan koordinasi terkait penerimaan cukai dengan pengguna jasa, khususnya PT HM Sampoerna, Tbk yang merupakan sumber utama penerimaan cukai.

Sasaran Strategis 3 Sinergi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif

Kode	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Kinerja
3a-CP	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	78%	103.94	120

Penegakan hukum adalah penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan dan Undang Undang Cukai dalam rangka mengamankan hak-hak keuangan negara, serta perlindungan masyarakat, perdagangan dan industri dalam negeri, dan kepentingan nasional dari barang impor, barang ekspor, dan barang kena cukai yang diperdagangkan secara melawan hukum (ilegal).

Sinergi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif adalah rangkaian pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilakukan secara bersama-sama untuk mengawasi seluruh entitas terkait, guna mewujudkan tegaknya hukum di bidang Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai berdasarkan Undang-Undang dalam rangka mengamankan hak-hak keuangan negara, melindungi masyarakat, menjaga perdagangan dan industri dalam negeri, serta kepentingan nasional.

Capaian sasaran strategis ini adalah sebesar 120 yang dikontribusikan IKU yaitu tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai.

3a-CP Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai

Dalam mewujudkan perlindungan kepada masyarakat yang optimal, DJBC perlu memastikan bahwa pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum di bidang kepabeanan dan cukai terlaksana dengan efektif. Oleh karena itu dalam pengukuran kinerja DJBC tahun 2022 terdapat indikator tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai yang terdiri dari 2 Sub IKU, yaitu:

1. Persentase hasil penyidikan yang telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan (P21) - Target 72%

2. Persentase efektivitas pengawasan peredaran Barang Kena Cukai ilegal - Target 84%

Capaian Indikator kinerja ini 120 dengan realisasi sebesar 103.94% dari target yang telah ditetapkan dalam dokumen Kontrak Kinerja 78% dan Rencana Strategis DJBC 2020-2024 yaitu sebesar 74,67%.

Tabel 3.9
Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanaan dan cukai

T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Pol / K.P.
Target	35%	47.5%	65%	78%	Max / TLK
Realisasi	87.08%	102.17%	101.39%	103.94%	
Capaian	120	120	120	120	

Sumber Data : Seksi Penindakan dan Penyidikan

Tindak pidana kepabeanaan dan cukai adalah segala perbuatan yang berhubungan dengan kepabeanaan dan cukai yang atas perbuatan tersebut diancam dengan pidana.

Terdapat dua jenis penyidikan tindak pidana, yang pertama adalah Penyidikan Tindak Pidana Asal (TPA) adalah penyidikan atas peristiwa pidana di bidang Kepabeanaan dan Cukai yang memenuhi unsur-unsur pasal ketentuan pidana dalam Undang-Undang Kepabeanaan dan Undang-Undang Cukai, yang kedua adalah Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) adalah pengembangan dari penyidikan TPA dalam bidang Kepabeanaan dan Cukai yang memenuhi unsur pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Penerbitan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) menandai dimulainya kegiatan penyidikan dengan pemberitahuan secara resmi ke Kejaksaan. Penyidikan merupakan tahap dimana Penyidik berupaya mengungkap fakta-fakta dan bukti-bukti atas terjadinya suatu tindak pidana serta menemukan tersangka pelaku tindak pidana tersebut.

Status P21 merupakan status dimana berkas perkara pidana yang telah diserahkan oleh Penyidik DJBC, dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum, dan siap untuk dilimpahkan ke Hakim Pengadilan untuk dilanjutkan ke proses persidangan. IKU ini bertujuan untuk mendorong kinerja penyidikan agar lebih efektif dan efisien dalam menangani kasus tindak pidana kepabeanaan dan cukai.

Pada Tahun 2022 Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap tidak terdapat kasus pidana kepabeanaan dan cukai sehingga tidak ada penyidikan dan capaian komponen P21 masih N/A.

Penegakan hukum yang efektif salah satunya juga diukur melalui efektifitas pengawasan peredaran Barang Kena Cukai (BKC) ilegal. Fokus pengawasan yang diukur sebagai capaian dalam IKU ini adalah produk BKC Hasil Tembakau (HT) dalam skema kegiatan sosialisasi, pelaksanaan operasi pasar, penindakan yang dihasilkan dan tindak lanjut atas penindakan yang dilakukan.

Realisasi Persentase efektivitas pengawasan peredaran Barang Kena Cukai ilegal tahun 2021 adalah sebesar 103.94%. Capaian tersebut terdiri dari 2 (dua) target sosialisasi dan 9 (Sembilan) pelaksanaan operasi pasar BKC HT ilegal di Wilayah Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Kebumen. IKU ini merupakan

IKU baru karena adanya perubahan bobot komponen. Adapun formula dari sub IKU Persentase efektivitas pengawasan peredaran Barang Kena Cukai ilegal sebagai berikut:

Formula 3.3
Perhitungan IKU Persentase efektivitas pengawasan peredaran Barang Kena Cukai ilegal

$\frac{\sum \text{kegiatan sosialisasi BKC HT}}{\sum \text{rencana kegiatan sosialisasi BKC HT}}$	$\times 5\%$	$\frac{\sum \text{realisasi Pengawasan BKC HT ilegal}}{\sum \text{rencana Pengawasan BKC HT ilegal}}$	$\times 15\%$	$\frac{\sum \text{skor pengawasan BKC HT ilegal}}{\sum \text{pengawasan BKC HT ilegal}}$	$\times 40\%$	$\frac{\sum \text{skor TL BA Penegahan}}{\sum \text{BA Penegahan BKC HT}}$	$\times 40\%$
---	--------------	---	---------------	--	---------------	--	---------------

Pelaksanaan sosialisasi

Sosialisasi BKC HT dilakukan oleh kantor yang mendapatkan target untuk melaksanakan operasi pasar untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pemanfaatan penerimaan cukai seperti contohnya untuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), Dana Bagi Hasil (DBH), Pembangunan, dll. Selain itu kegiatan sosialisasi juga mengenalkan kepada masyarakat terkait bahaya HT ilegal dan kerugian apabila HT ilegal marak beredar. Terdapat 5 (lima) macam pelaksanaan sosialisasi yang dapat diakui sebagai capaian yang memiliki poin dan capaian maksimal poin sebagai berikut:

Tabel 3.10
Poin capaian pelaksanaan sosialisasi

No	Kegiatan Sosialisasi	Poin	Maksimal poin dapat diakui
1	Pemasangan Baliho, atau videotron	2	2 x rencana sosialisasi
2	Talkshow pada radio dan/atau televisi	1,5	1,5 x rencana sosialisasi
3	Sosialisasi tatap muka secara langsung di tempat pelaksanaan operasi pasar (lingkungan luar kantor sekitar tempat pelaksanaan operasi pasar) pada saat/sebelum operasi pasar dilakukan, atau memuat artikel di koran (baik lokal maupun nasional)	1	1 x rencana sosialisasi
4	Sosialisasi tatap muka di lingkungan kantor, atau membagikan pamflet, leaflet, stiker, dsb di tempat pelaksanaan operasi pasar dan sosialisasi via <i>video conference</i> / webinar	0,5	0,5 x rencana sosialisasi
5	Sosialisasi lainnya dengan menggunakan sarana / media social dihitung berdasarkan kontennya	0,5	0,5 x rencana sosialisasi

Sumber Data : Seksi Penindakan dan Penyidikan

Rencana pelaksanaan sosialisasi BKC HT yang ditargetkan tahun 2022 adalah 1/5 dari jumlah target Pengawasan BKC HT ilegal tahun 2022 unitnya dengan pembulatan ke atas. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap hanya mendapatkan target pengawasan BKC HT ilegal 9, sehingga untuk target pelaksanaan sosialisasi hanya 2. Realisasi pelaksanaan sosialisasi pada Tahun 2022 yaitu sebanyak 38 (tiga puluh delapan) kali, 21 (dua puluh satu) kali sosialisasi tatap muka di lingkungan kantor/ video conference, pembagian pamflet, leaflet, sticker di tempat pelaksanaan operasi pasar (poin 0.5), 3 (tiga) kali sosialisasi yang disampaikan melalui media sosial dihitung berdasarkan kontennya (poin 0.5), 8 (delapan) kali talkshow pada radio/televisi, dan 3 (tiga) kali sosialisasi tatap muka secara langsung di tempat pelaksanaan operasi pasar. tetapi karena maksimal capaian pelaksanaan sosialisasi BKC HT adalah 5% yang diperhitungkan dalam IKU ini hanya 1 poin.

Pelaksanaan Pengawasan BKC HT Ilegal

Komponen ini dihitung dari jumlah pelaksanaan pengawasan BKC HT ilegal dibagi dengan jumlah rencana Pengawasan BKC HT ilegal. Pelaksanaan pengawasan BKC HT Ilegal dibuktikan dengan Laporan Pelaksanaan Tugas (LPT). Pada pembagian target pelaksanaan pengawasan BKC HT Ilegal di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap mendapatkan target 9 (Sembilan). Realisasi pada Tahun 2022, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap telah melaksanakan pengawasan peredaran barang kena cukai ilegal sebanyak 34 kali, Sehingga capaian 56.6% tetapi yang diperhitungkan dalam komponen ini hanya 18%.

Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan BKC HT Ilegal

Efektivitas pelaksanaan pengawasan BKC HT ilegal dihitung dari jumlah skor pelaksanaan pengawasan BKC HT Ilegal dibagi dengan realisasi pelaksanaan pengawasan BKC HT Ilegal. Skor pelaksanaan pengawasan BKC HT ilegal adalah jumlah skor pelaksanaan pengawasan BKC HT ilegal yang menghasilkan penindakan dengan penilaian sebagai berikut :

- menghasilkan penindakan dengan kriteria khusus diberikan skor 1,2
- menghasilkan penindakan selain kriteria khusus diberikan skor 1,0
- menghasilkan SBP saja 0,25

Skor pelaksanaan pengawasan BKC HT ilegal dihitung atas setiap pelaksanaan pengawasan (LPT). Apabila dalam satu LPT menghasilkan lebih dari satu penindakan (SBP), maka skor yang dihitung adalah skor pelaksanaan pengawasan BKC HT ilegal yang tertinggi pada LPT dimaksud. Pada Tahun 2022 Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap telah melaksanakan pengawasan peredaran barang kena cukai ilegal sebanyak 34 kali dengan skor 34.8. Skor pelaksanaan dari pengawasan BKC HT yang telah dilakukan sebesar 34.8 dengan rincian 4 pengawasan dengan kategori penindakan dengan kriteria khusus (poin 1,2 untuk masing-masing penindakan) dan 30 pengawasan dengan kategori penindakan selain kriteria khusus (poin 1 untuk masing-masing penindakan).

Tindak Lanjut Penindakan

Komponen ini dihitung dari skor tindak lanjut BA tegah dibagi dengan jumlah BA Tegah. Tindak lanjut tersebut diberikan bobot nilai yang berbeda-beda. Penentuan bobot tindak lanjut penindakan mempertimbangkan besarnya *effort* yang dilakukan untuk menindaklanjuti penindakan. Penentuan bobot dan bukti pendukung masing-masing tindak lanjut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.11
Bobot Tindak Lanjut Penindakan

No	Jenis Tindak Lanjut	Skor	Bukti Pendukung
1	Penyidikan TPPU	5	SPTP (Surat Perintah Tugas Penyidikan) TPPU
2	Penyidikan TPA	1,5	SPTP (Surat Perintah Tugas Penyidikan)
3	Pembekuan dan/atau pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC)	1,4	Surat Keputusan Pembekuan, atau Surat Keputusan Pencabutan
4	Penyelesaian Administrasi STCK	1,3	STCK-1 (Surat Tagihan di bidang Cukai)

No	Jenis Tindak Lanjut	Skor	Bukti Pendukung
5	Tidak dilayani pemesanan pita cukai	1,2	Surat Rekomendasi/Printscrees aplikasi sistem otomasi
6	Rekomendasi audit	1	Surat Rekomendasi Audit
7	Penetapan barang sebagai Barang Milik Negara (BMN)	1	Surat Keputusan Penetapan BMN
8	Penetapan Barang Dikuasai Negara (BDN)	0,5	Surat Keputusan Penetapan BDN
9	Tidak ditemukan pelanggaran	0,1	Berita Acara Pengembalian Barang / Sarana Pengangkut, atau Berita Acara Serah Terima, atau SBP dengan tindakan yang diambil berupa pemeriksaan dihentikan, atau SBP dengan tindakan yang diambil berupa diijinkan meneruskan perjalanan

Sumber Data : Seksi Penindakan dan Penyidikan

Pada Tahun 2022 terdapat 86 SBP dan 86 BA Tegah dengan skor tindak lanjut 86 karena seluruh SBP dan BA Tegah telah ditindaklanjuti dengan penetapan sebagai BMN.

Realisasi sub IKU Persentase efektivitas pengawasan peredaran Barang Kena Cukai ilegal adalah sebesar 103.94% dari target yang telah ditetapkan pada tahun 2022 yaitu sebesar 84% sehingga indeks capaian sub IKU ini adalah sebesar 120.

Beberapa faktor pendukung keberhasilan capaian IKU diantaranya adalah semakin meningkatnya pengawasan peredaran BKC HT diseluruh Indonesia terutama pada wilayah yang menjadi daerah pemasaran BKC HT ilegal, tidak hanya dari frekuensi operasi namun juga pada bentuk operasi yang lebih terkoordinasi yang diiringi dengan pelaksanaan sosialisasi yang gencar kepada masyarakat tentang rokok ilegal. Prestasi tersebut merupakan hasil kinerja *extra effort* dari DJBC dalam pengawasan memerangi rokok ilegal melalui pelaksanaan operasi pengawasan Barang Kena Cukai ilegal. Kedepannya diharapkan pada Tahun 2023 dapat dilakukan kegiatan sosialisasi tentang cukai yang dengan lebih efektif dan efisien dengan forum tatap muka dan kegiatan operasi pasar dapat berjalan secara maksimal.

Sasaran Strategis 4 Kepuasan pengguna layanan kepabeanaan dan cukai yang tinggi

Kode	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Kinerja
4a-CP	Indeks kepuasan pengguna jasa	4.42	4.65	105.2

Kepuasan pengguna layanan kepabeanaan dan cukai yang tinggi adalah kepuasan pengguna layanan terhadap pelayanan di bidang kepabeanaan dan cukai yang diukur berdasarkan hasil survei kepuasan pelanggan oleh lembaga independent.

Capaian Sasaran Strategis ini adalah sebesar 105.2 yang dikontribusikan dari indikator kinerja indeks kepuasan pengguna jasa.

4a-CP Indeks kepuasan pengguna jasa

Dalam rangka menunjang pencapaian tujuan DJBC dalam memberikan pelayanan kepabeaan dan cukai yang optimal, DJBC selalu mengedepankan komitmen untuk melakukan reformasi birokrasi dengan memberikan fokus dalam meningkatkan kualitas pelayanan pada *stakeholders*. Oleh karena itu, proses perbaikan kualitas pelayanan sebagai upaya perbaikan proses bisnis secara kontinyu dilaksanakan dan dimonitor salah satunya dilakukan melalui Survei Kepuasan Pengguna Layanan.

Layanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Kualitas layanan publik diukur berdasarkan hasil survei kepuasan pelanggan oleh lembaga independen berdasarkan asas penyelenggaraan pelayanan publik sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yaitu:

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------|---|
| a. kepentingan umum; | f. partisipatif; | j. fasilitas dan perlakuan |
| b. kepastian hukum; | g. persamaan perlakuan/ | husus bagi kelompok |
| c. kesamaan hak; | tidak diskriminatif; | rentan; |
| d. keseimbangan hak dan kewajiban; | h. keterbukaan; | k. ketepatan waktu; dan |
| e. keprofesionalan; | i. akuntabilitas; | l. kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan. |

Nilai indeks kepuasan pengguna jasa atau hasil Survei Kepuasan Pengguna Jasa Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap tahun 2022 adalah 4,65 dari target yang ditetapkan pada dokumen Kontrak Kinerja yaitu 4.42 skala 5. Realisasi tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan indeks kepuasan pengguna jasa tahun 2021 yaitu sebesar 4,74.

Tabel 3.12
Indeks kepuasan pengguna jasa

T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Pol / K.P.
Target	-	-	-	4.42	Max / TLK
Realisasi	N/A	N/A	N/A	4.65	
Capaian	N/A	N/A	N/A	105.2	

Sumber Data : Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan

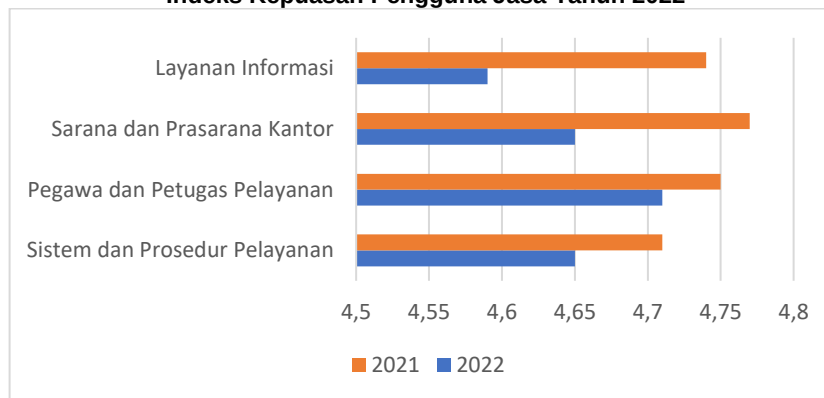
Pelaksanaan Survei Kepuasan Pengguna Layanan dilakukan dengan menggunakan instrumen pengukuran yang disusun dalam bentuk kuesioner. Kuesioner tersebut dibangun menggunakan teori dan konsep yang relevan yang kemudian disesuaikan pada konteks DJBC dan Kementerian Keuangan lalu dikembangkan melalui diskusi kelompok terfokus dengan para panelis yang berasal dari masing masing unit eselon dan non eselon Kementerian Keuangan, akademisi di bidang manajemen, pelayanan publik dan organisasi. Terdapat tiga variabel yang menjadi indikator utama dalam mengukur kualitas pelayanan publik Kementerian keuangan dan unit eselonnya, yakni Ekspektasi Pengguna Layanan (*Customer*

Expectation), Persepsi Kualitas Layanan (*Perceived Quality*), dan Kepuasan pengguna layanan (*Customer Satisfaction*).

Ekspektasi Pengguna Layanan (*Customer Expectation*) mengukur seberapa tinggi harapan pengguna layanan Kementerian Keuangan terhadap layanan yang diberikan, Persepsi Kualitas Layanan (*Perceived Quality*) mengukur seberapa besar penilaian pengguna layanan Kementerian Keuangan terhadap layanan yang diberikan, dan Kepuasan (*Satisfaction*) mengukur seberapa puas pengguna layanan Kementerian Keuangan terhadap keseluruhan. Keseluruhan variabel tersebut diukur menggunakan skala pengukuran dalam rentang 1 sampai dengan 5.

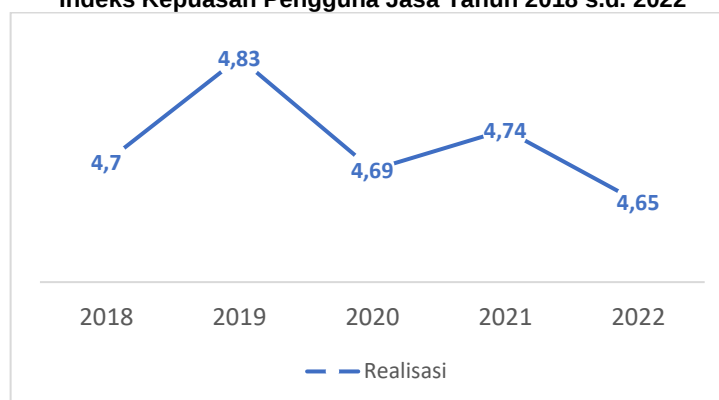
Realisasi indeks kepuasan pengguna jasa pada tahun 2022 tertinggi terjadi pada aspek Pegawai dan Petugas Pelayanan (4.71). Sebaliknya, indeks kepuasan terendah terjadi pada aspek Layanan Informasi (4.59). Indeks kepuasan aspek Sistem dan Prosedur Pelayanan dan Sarana dan Prasarana Kantor masing-masing mendapat nilai 4.65.

Grafik 3.2
Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Tahun 2022



Sumber Data : Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan

Grafik 3.3
Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Tahun 2018 s.d. 2022



Sumber Data : Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan

Tahun 2022 seluruh pengukuran dilakukan oleh Direktorat Kepatuhan Internal secara terpusat. Responden diberikan tautan melalui alamat *email* dan SMS yang terdaftar, untuk kemudian mengisi survei. Survei Kepuasan Pengguna Jasa Tahun 2022 di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap diikuti oleh 27 responden dengan 17

responden diantaranya dinyatakan valid untuk dilakukan pengolahan data. Berdasarkan data di atas pada Tahun 2022.

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap untuk mendukung pelaksanaan Survei Kepuasan Pengguna Layanan telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Menyiapkan *longlist* responden yang akurat dan melalui proses validasi yang baik.
- b. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap saran dan masukan dari pengguna jasa atas aspek pelayanan yang masih kurang.

Selanjutnya, untuk rencana aksi yang akan dilakukan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan pemantauan keluhan/aduan atas layanan kepabeanan dan cukai sebagai bahan evaluasi atas pelayanan yang telah dilakukan.
- b. Memperbaiki sarana dan prasarana agar kantor lebih nyaman bagi pengguna jasa.
- c. Melakukan program peningkatan kompetensi bagi pegawai agar seluruh pegawai yang melayani pengguna jasa mempunyai pengetahuan, pemahaman, dan keahlian yang sama.
- d. Selalu memberikan informasi berdasarkan peraturan terbaru dan responsif terhadap pengaduan yang masyarakat sampaikan.

Sasaran Strategis 5 Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas aturan kepabeanan dan cukai

Kode	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Kinerja
5a-CP	Persentase piutang bea dan cukai yang diselesaikan	94.75%	100%	105.54

Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas aturan kepabeanan dan cukai adalah kondisi tingginya tingkat ketaatan pengguna jasa di bidang kepabeanan dan cukai dalam melaksanakan peraturan pelaksanaan perundang-undangan kepabeanan dan cukai.

Capaian Sasaran Strategis ini adalah sebesar 105.54 yang dikontribusikan dari indikator kinerja Persentase piutang bea dan cukai yang diselesaikan.

5a-CP Persentase piutang bea dan cukai yang diselesaikan

Tujuan dari IKU Persentase Piutang Bea dan Cukai yang diselesaikan adalah untuk mengukur tingkat ketertagihan piutang bea dan cukai di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Piutang yang dimaksud dalam hal ini adalah piutang yang timbul atas pendapatan sebagaimana diatur dalam undang-undang Pabean dan Cukai, yang belum diselesaikan sampai akhir periode Laporan Keuangan.

Tabel 3.13
Persentase piutang bea dan cukai yang diselesaikan

T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Pol / K.P.
Target	-	70%	70%	94.75%	Max / TLK
Realisasi	N/A	100%	100%	100%	
Capaian	N/A	120	120	105.54	

Sumber Data : Seksi Perbendaharaan

Jumlah Piutang adalah akumulasi jumlah piutang *outstanding* sampai dengan 31 Desember 2021 (saldo awal) ditambah jumlah piutang terbit pada periode tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022 (Piutang terbit tahun berjalan) yang dikurangi dengan piutang *outstanding* sampai dengan 31 Desember 2022 dengan status belum jatuh tempo, keberatan, banding, dilimpahkan penagihannya ke KPKNL (SP3N), wajib pajak pailit, wajib pajak tidak ditemukan, dan umurnya lebih dari 3 tahun.

Piutang *outstanding* adalah jumlah piutang yang belum diselesaikan sampai akhir periode Laporan Keuangan, sedangkan piutang terbit adalah jumlah piutang yang timbul pada tahun berjalan. Penyelesaian piutang selama tahun berjalan (mutasi piutang sebagaimana dimaksud pada Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-23/BC/2018 tentang Pedoman Penatausahaan Piutang di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai) terdiri dari beberapa mekanisme sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) yang menyatakan bahwa piutang dapat bertambah dan berkurang dalam hal terdapat

- | | |
|--|---|
| a. Pembayaran/pelunasan; | Jenderal untuk mengurangi dan menghapus |
| b. Penundaan pelunasan piutang; | tagihan dalam surat penetapan; |
| c. Pengangsuran pembayaran tagihan utang cukai; | j. Pembatalan surat penetapan tagihan karena adanya persetujuan Direktur Jenderal untuk mengurangi atau menghapus sanksi administrasi berupa denda; |
| d. Pengalihan piutang pajak ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP); | k. Keputusan tentang pembebasan atau keringanan bea masuk; |
| e. Penggunaan kompensasi cukai; | l. Putusan Peninjauan Kembali; dan/atau |
| f. Penggunaan kompensasi PPN; | m. Pengembalian barang kiriman untuk impor barang melalui Penyelenggara Pos yang ditunjuk. |
| g. Keputusan Direktur Jenderal atas Keberatan; | |
| h. Putusan banding Pengadilan Pajak; | |
| i. Pembatalan surat penetapan tagihan karena adanya persetujuan Direktur | |

Pengukuran IKU persentase piutang bea dan cukai yang diselesaikan dilakukan dengan cara membandingkan antara jumlah penyelesaian piutang dan jumlah piutang.

Jumlah penyelesaian piutang bea dan cukai adalah jumlah mutasi piutang dikurangi jumlah mutasi piutang macet.

Jumlah mutasi piutang macet adalah mutasi atas piutang dengan umur lebih dari tiga tahun, dilimpahkan penagihannya ke KPKNL, penanggung utang badan usaha bubar/dilikuidasi/pailit, penanggung utang meninggal dunia, tidak ditemukan, dan/atau tidak memiliki harta kekayaan lagi.

Pada tahun 2022 pencapaian target IKU sebesar 106.38% dengan realisasi capaian IKU 100% dari target yang ditetapkan sebesar 94.75%. Jumlah piutang bea dan cukai yang diselesaikan sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp170.123.100.920 dengan rincian penyelesaian piutang lancar Rp170.123.100.920 dan piutang macet Rp0. Rincian realisasi penyelesaian piutang bea dan cukai tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 3.14
Data piutang yang diselesaikan dan jumlah piutang

BULAN	Piutang yang diselesaikan s.d. periode pelaporan (Rp)	Piutang s.d. periode pelaporan (Rp)
Januari	13.000.320.000	13.000.320.000
Februari	28.882.619.000	28.882.619.000
Maret	34.394.219.000	34.394.219.000
April	39.034.619.000	39.034.619.000
Mei	41.519.699.000	41.519.699.000
Juni	44.295.897.400	44.295.897.400
Juli	44.422.724.000	44.425.451.272
Agustus	65.363.929.000	65.363.929.000
September	72.015.450.600	72.015.450.600
Oktober	109.437.025.920	109.437.025.920
November	112.288.225.920	112.288.225.920
Desember	170.123.100.920	170.123.100.920
JUMLAH	170.123.100.920	170.123.100.920

Sumber Data : Seksi Perbendaharaan

Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pengguna jasa di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap sangat tinggi. Adanya komunikasi dan kerja sama yang baik antara pengguna jasa dalam menyelesaikan piutang kepabeanan dan cukai dengan pegawai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap yang melakukan penagihan secara aktif, terus menerus, dan berkesinambungan, serta mengingatkan pengguna jasa apabila terdapat piutang yang akan jatuh tempo merupakan faktor utama tercapainya IKU ini. Sehingga seluruh piutang kepabeanan dan cukai dapat diselesaikan tepat waktu.

Piutang outstanding Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp15.766.414.652 yang terdiri dari piutang outstanding dengan status belum jatuh tempo Rp 50.681.535.000 dan piutang outstanding dengan status dilimpahkan

penagihannya ke KPKNL Rp4.516.574.652 yang tidak dimasukkan dalam perhitungan IKU ini. Saldo piutang macet yang telah dilimpahkan kepada KPKNL Purwokerto sebagai berikut:

Tabel 3.15
Data piutang macet yang telah dilimpahkan ke KPKNL Purwokerto

No	Jenis Tindak Lanjut	Surat Pelimpahan	Nilai Pelimpahan (Rp)	Saldo Piutang (Rp)
1	PT Vacation International	S-2005/WBC.09/KPP.MP.04/2013 tanggal 4 September 2013	1.194.826.459	1.194.826.459
2	PT Indomineral Multi Pratama	S-197/WBC.09/KPP.MP.04/2014 tanggal 29 Januari 2014	259.426.000	248.516.909
3	PT Mustika Pratama Pertambangan	S-784/WBC.09/KPP.MP.04/2014 tanggal 10 April 2014	1.755.656.000	1.755.656.000
4	PT Petroindo Utama	S-829/WBC.09/KPP.MP.04/2014 tanggal 21 April 2014	1.359.848.000	1.317.575.284

Sumber Data : Seksi Perbendaharaan

Usaha yang dilakukan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap untuk menyelesaikan piutang macet yaitu dengan cara melakukan rekonsiliasi dengan KPKNL Purwokerto dalam pelaksanaan penagihan aktif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sasaran strategis kepatuhan pengguna jasa kepabeanan dan cukai yang tinggi untuk menciptakan administrasi kepabeanan dan cukai yang tertib dan dapat memberikan fasilitas terbaik kepada pengguna jasa terpenuhi. Untuk meningkatkan pencapaian IKU persentase penyelesaian piutang, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap akan meningkatkan dan mengoptimalkan upaya penagihan dan melakukan sinergi dengan KPKNL Purwokerto.

Sebagai perbandingan, pada tahun 2021 persentasi jumlah piutang yang diselesaikan sebesar Rp105.236.847.272 dan pencapaian target IKU sama sebesar 106,38 dengan rincian target yang ditetapkan sebesar 94%. dan realisasi sebesar 100%.

Sasaran Strategis 6 Perencanaan dan Analisis Formulasi Kebijakan yang Efektif dan Efisien

Kode	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Kinerja
6a-CP	Persentase Kualitas Perencanaan Satuan Kerja	75%	94.08%	120

Untuk menjaga organisasi yang berkesinambungan (*continously improved*), maka perlu disusun perencanaan serta dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi. Perencanaan adalah proses yang mendefinisikan tujuan dari organisasi, membuat strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan dari organisasi, serta mengembangkan rencana kerja organisasi periode 5 tahunan yang tercantum dalam dokumen perencanaan (Rencana Strategis ataupun dokumen program).

Analisis formulasi kebijakan adalah proses penelaahan permasalahan di bidang kepabeanan dan cukai yang didasari pertimbangan kepentingan nasional dan keselarasan dengan standar internasional. Kebijakan yang berkualitas adalah kebijakan yang sesuai dengan amanah Undang-Undang Kepabeanan dan Cukai dan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien

Capaian Sasaran Strategis ini adalah sebesar 120 yang dikontribusikan dari indikator kinerja Persentase Kualitas Perencanaan Satuan Kerja yang merupakan IKU baru di Tahun 2022.

6a-CP Persentase Kualitas Perencanaan Satuan Kerja

Perencanaan satuan kerja adalah perencanaan unit vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang merupakan penjabaran secara berjenjang dari perencanaan DJBC selama lima tahun sebagaimana tertuang dalam Renstra DJBC tahun 2020 s.d. 2024 yang bersumber dari perencanaan pemerintah dalam RPJMN tahun 2020 s.d. 2024.

Tabel 3.16
Persentase kualitas perencanaan satuan kerja

T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Pol / K.P.
Target	-	105	45%	75%	Max / TLK
Realisasi	N/A	56.35%	83.50%	94.085	
Capaian	N/A	120	120	120	

Sumber Data : Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan

Kualitas perencanaan satuan kerja diukur dengan menggunakan Matriks Penyelarasan Kerangka Kinerja yang telah disusun oleh tiap-tiap unit vertikal DJBC dengan komponen pengukuran sebagai berikut:

1. Kualitas Perencanaan Program

Perencanaan program yang diukur adalah perencanaan program kerja rutin dan perencanaan program pendukung PRKC Berkelanjutan.

a. Kualitas perencanaan program rutin.

- Program kerja yang mendukung kinerja pada perspektif internal process dan learning and growth.
- Hasil penilaian terhadap matriks penyelarasan kerangka kinerja dari pengelola kinerja organisasi di atasnya. Penilaian dilakukan berdasarkan standar yang ditetapkan oleh Direktorat Kepatuhan Internal sebagai pengelola kinerja organisasi DJBC.

Pelaksanaan penilaian matriks penyelarasan kerangka kinerja dilaksanakan pada Q2 tahun berjalan, dan masing-masing unit organisasi dapat menindaklanjuti hasil penilaian dengan melakukan perbaikan matriks penyelarasan untuk dinilai kembali pada Q3 tahun berjalan.

b. Kualitas perencanaan program pendukung PRKC Berkelanjutan

Kualitas perencanaan program pendukung PRKC diukur berdasarkan penilaian yang distandarkan oleh Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis terhadap program kerja PRKC yang wajib dilaksanakan (cascade) dan program kerja mandiri untuk mendukung keberhasilan PRKC berkelanjutan. Penilaian dilakukan oleh unit organisasi eselon II di atasnya pada Q2 tahun berjalan.

2. Penyelesaian Program

Penyelesaian program yang diukur adalah penyelesaian:

- ##### a. Program PRKC yang wajib dilaksanakan (cascade) – 60%

b. Program kerja mandiri pendukung PRKC – 40%

3. Pelaporan

Pelaporan dilakukan secara triwulanan (bulan April, Juli, Oktober tahun berjalan, dan Januari tahun berikutnya). Laporan disampaikan kepada unit organisasi eselon II di atasnya dengan memuat informasi terkait penyelesaian program kerja pendukung PRKC Berkelanjutan (program kerja cascade dan program kerja mandiri).

Pelaporan diukur dari ketepatan waktu penyampaiannya. Pelaporan dinyatakan tepat waktu apabila disampaikan paling lambat tanggal 3 s.d. 7 setiap bulan pelaporan.

Realisasi IKU Persentase kualitas perencanaan satuan kerja adalah 94.08% dari target 75% sehingga diperoleh indeks capaian 120. IKU ini merupakan IKU baru sehingga tidak ada perbandingan untuk tahun sebelumnya.

Upaya yang dilakukan pada tahun 2022 untuk mencapai IKU ini yaitu:

- Melakukan monitoring terhadap *progress* program kerja
- Mengingatkan kepada Seksi/Subbagian terkait untuk segera melaksanakan program kerja.

Sasaran Strategis 7 Persepsi positif dan dukungan publik terhadap kebijakan kepabeanaan dan cukai

Kode	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Kinerja
7a-N	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	85	89.08	104,80
7b-N	Rata-rata persentase realisasi janji layanan kepabeanaan dan cukai	106.51%	114.05%	109.19

DJBC sebagai salah satu institusi penting di Kementerian Keuangan perlu menyampaikan informasi terkait tugas, fungsi, dan kebijakan yang dijalankan kepada masyarakat luas melalui kampanye komunikasi yang efektif dan tepat sasaran serta memberikan pelayanan publik yang prima sehingga berdampak terhadap peningkatan dukungan dan partisipasi publik.

Capaian Sasaran Strategis ini adalah sebesar 107 yang dikontribusikan dari indikator kinerja Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi dan Rata-rata persentase realisasi janji layanan kepabeanaan dan cukai.

7a-N Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi

Tabel 3.17
Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi

T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Pol / K.P.
Target	85.00	85	85.00	85.00	Max / TLK
Realisasi	89.38	89.38	88.18	89.08	
Capaian	105.15	105.15	103.74	104.80	

Sumber Data : Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan

Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi merupakan bentuk pengukuran tingkat pemahaman peserta dari pihak eksternal DJBC terhadap substansi/materi pelatihan/sosialisasi/workshop yang dilakukan oleh KPPBC TMP C Cilacap.

Variabel yang diukur adalah:

- Materi (bobot 35%),
- Acara (bobot 30%)
- Narasumber (bobot 35%)

Materi edukasi dan komunikasi yang disampaikan yaitu mengenai ketentuan-ketentuan yang berlaku serta informasi-informasi terbaru di bidang kepabeanaan dan cukai. Tujuan penyelenggaraan edukasi dan komunikasi adalah untuk memberikan pemahaman yang memadai kepada para stakeholders mengenai ketentuan di bidang kepabeanaan, guna memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi dalam kegiatan di bidang kepabeanaan.

Efektivitas edukasi dan komunikasi menjadi tolak ukur dalam menilai peningkatan pemahaman/pengetahuan stakeholders terhadap materi yang disampaikan. Tingkat efektivitas diukur berdasarkan hasil kuesioner yang dibagikan kepada seluruh *stakeholder* yang mengikuti kegiatan edukasi dan komunikasi. Format kuesioner yang dibagikan telah distandardisasi, dan dapat menjadi sarana umpan balik. Hasil pengukuran tingkat efektivitas kegiatan edukasi dan komunikasi dituangkan ke dalam bentuk indeks. Realisasi indeks tersebut menjadi indikator kinerja pada Bea Cukai Cilacap, dengan ingkat efektivitas sebagai berikut:

$0 \leq x < 40$	Tidak efektif
$40 \leq x < 60$	Kurang efektif
$60 \leq x < 75$	Cukup efektif
$75 \leq x < 90$	Efektif
$90 \leq x < 100$	Sangat efektif

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap memperoleh indeks 89.08 (Efektif) atas sosialisasi yang telah dilakukan pada tahun 2022. Realisasi tersebut melebihi indeks yang ditargetkan yaitu sebesar 85, sehingga capaian hanya 104.8.

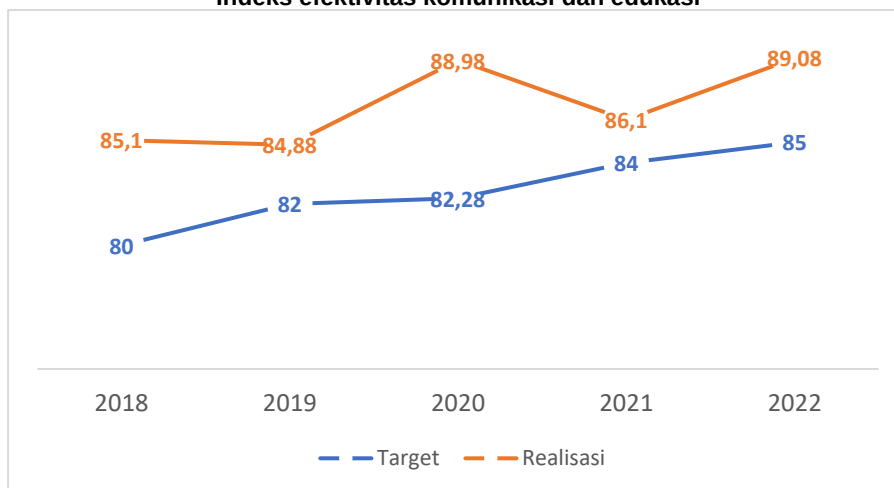
Capaian indeks tahun 2022 ini mengalami kenaikan sebesar 2,98 dari capaian tahun sebelumnya. Adapun kegiatan sosialisasi dan kehumasan selama tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- APBN Week = 88.18 (Efektif)



- b. Sosialisasi Identifikasi Keaslian Pita Cukai Tahun 2022 = 90.58 (Sangat Efektif)
- c. Sosialisasi Peningkatan Sektor UMKM Go Ekspor = 85.77 (Efektif)
- d. Sosialisasi Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia = 91.79 (Sangat Efektif)

Grafik 3.4
Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi



Sumber Data : Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan

Capaian efektivitas komunikasi dan edukasi pada tahun 2022 mengalami kenaikan disebabkan karena kegiatan sosialisasi sudah kembali diselenggarakan secara luring/tatap muka. Hal ini tentu mempengaruhi aspek penilaian untuk narasumber dan acara. Dari dua belas (12) poin penilaian, dua penilaian terendah masih seputar aspek materi sosialisasi yang sesuai dengan latar belakang peserta dan aspek alokasi waktu yang cukup. Kegiatan iklan layanan masyarakat di tahun 2022 meliputi Penayangan iklan layanan masyarakat di media sosial serta talkshow radio yang mengangkat berbagai tema seperti penipuan yang mengatasnamakan Bea dan Cukai, registrasi IMEI, rokok ilegal, serta pelayanan oleh Bea Cukai Cilacap.

Rencana aksi yang akan dilakukan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap untuk mencapai target IKU ini pada Tahun 2023 antara lain:

- a. Memilih materi sosialisasi yang sesuai dengan latar belakang peserta.
- b. Membuat materi dengan baik dan menarik sehingga mudah dipahami oleh peserta.
- c. Mengemas acara sosialisasi dengan lebih menarik lagi dan disesuaikan dengan kondisi peserta.
- d. Narasumber yang akan menyampaikan materi dituntut untuk menguasai materi yang akan disampaikan sehingga peserta mudah memahami.
- e. Memperhatikan keberlangsungan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah disusun.

7b-N Rata-rata persentase realisasi janji layanan kepabeanaan dan cukai

Tabel 3.18
Rata-rata persentase realisasi janji layanan kepabeanaan dan cukai

T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Pol / K.P.
Target	106.51%	106.51%	106.51%	106.51%	Max / AVG
Realisasi	119.03%	118.20%	116.65%	114.05%	
Capaian	111.75	110.98	109.52	109.19	

Sumber Data : Seksi Perbendaharaan dan Seksi Pelayanan Kepabeanaan dan Cukai dan Dukungan Teknis

Salah satu fungsi dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah sebagai *Industrial Assistance*. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai selain melakukan pengawasan di bidang kepabeanaan dan cukai juga diwajibkan memberikan pelayanan yang prima kepada pengguna jasanya demi kelancaran arus barang.

IKU ini merupakan kegiatan mengukur rata-rata persentase waktu janji layanan di Bidang Fasilitas Kepabeanaan dan Cukai dengan cara membandingkan antara jumlah dokumen yang dilayani tepat waktu sesuai janji layanan, dibandingkan dengan jumlah semua dokumen yang dilayani

Jenis layanan kepabeanaan dan cukai yang diukur kinerjanya adalah layanan yang dianggap memiliki peranan penting dalam keberlangsungan pelayanan dan menjaga citra Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap kepada pengguna layanan eksternal. Janji layanan tersebut adalah:

1. Persentase realisasi dari janji layanan P3C;
2. Persentase realisasi dari janji layanan *redress manifest*;
3. Persentase realisasi dari janji layanan izin bongkar;
4. Persentase realisasi dari janji layanan izin timbun;

5. Persentase realisasi dari janji layanan izin muat;
6. Persentase realisasi dari janji layanan pengantaran pita cukai; dan
7. Persentase realisasi dari janji layanan CK-1. Pengukuran IKU ini dimulai sejak dokumen yang diterima dari pengguna jasa sudah dinyatakan lengkap dan benar.

Capaian IKU rata-rata persentase waktu janji layanan ini 109.19 dengan realisasi sampai dengan akhir tahun 114.05% dari target 106.51%. Hal tersebut dapat terjadi karena Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap telah menciptakan berbagai inovasi yang bertujuan untuk mempercepat dan mempermudah proses pelayanan, serta meningkatkan kualitas pelayanan dalam rangka pelayanan prima sesuai janji layanan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) oleh seluruh pegawai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap yang bertugas tanpa mengabaikan sisi pengawasan.

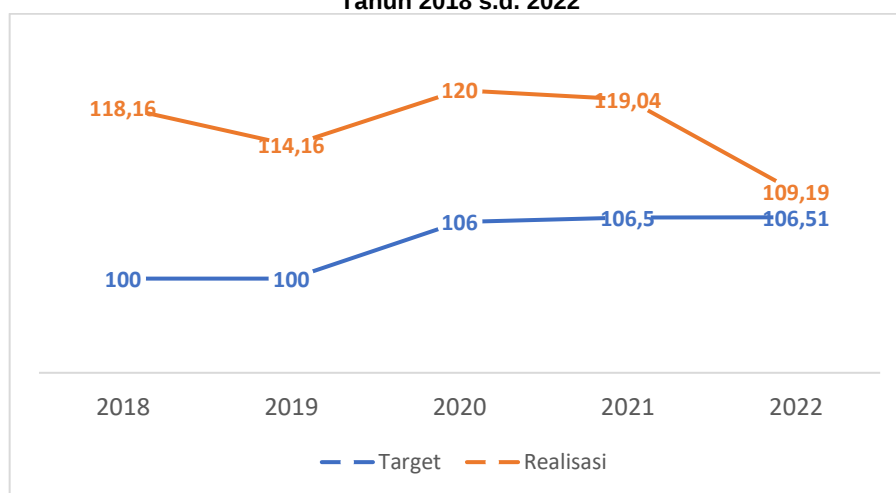
Seluruh dokumen dilayani dalam waktu tidak melebihi janji layanan. Untuk beberapa kendala di luar kendali Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap misalnya karena ada *shutdown system* CEISA

dari Kantor Pusat selalu diupayakan semaksimal mungkin menggunakan dokumen secara manual dengan izin Kepala Kantor dan memberikan kompensasi berupa *souvenir* kepada pengguna jasa sebagai tanda permintaan maaf atas keterlambatan layanan yang tidak sesuai janji layanan sesuai dengan Keputusan Kepala Kantor Nomor KEP-59/WBC.10/KPP.MP.04/2018 tanggal 3 Juli 2018 tentang Pemberian Kompensasi Kepada Pengguna Jasa atas Ketidaktepatan dalam Pemenuhan Janji Layanan.

Inovasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap dalam hal pelayanan yaitu menggunakan aplikasi

berbasis web <https://jatayubc.com> untuk beberapa produk layanannya antara lain izin bongkar, izin timbun, izin muat dan pengantaran pita cukai. Dengan adanya inovasi-inovasi tersebut semakin memudahkan *stakeholder* dalam menerima pelayanan, contohnya pelayanan CK-1 menjadi lebih cepat dan efisien karena adanya aplikasi ketersediaan pita cukai dengan memberikan notifikasi langsung kepada *stakeholder* apabila pita cukai Perusahaan Rokok telah diterima oleh KPPBC, dilanjutkan dengan layanan pengantaran pita cukai sampai ke alamat Perusahaan Rokok dan atas kegiatan tersebut dapat dipantau oleh *stakeholder* melalui notifikasi yang diterimanya.

Grafik 3.5
Target dan realisasi IKU Rata-rata persentase realisasi janji layanan kepabeanaan dan cukai Tahun 2018 s.d. 2022



Sumber Data : Seksi Perbendaharaan dan Seksi Pelayanan Kepabeanaan dan Cukai dan Dukungan Teknis

Tabel 3.19
Perubahan maklumat janji layanan

Layanan	KEP-54 TH 2019	KEP-48 TH 2020	KEP-43 TH 2021
Permohonan P3C HT awal	20 menit	20 menit	20 menit
Permohonan P3C HT tambahan	20 menit	20 menit	20 menit
Permohonan P3C HT Izin Kepala Kantor	-	-	-
Pelayanan pemesanan pita cukai (CK-1)	40 menit	40 menit	40 menit

Layanan	KEP-54 TH 2019	KEP-48 TH 2020	KEP-43 TH 2021
Pelayanan Pemberian Izin Timbun di Luar Kawasan Pabean	Tanpa Pemlok 10 jam kerja Ada Pemlok 16 jam kerja	Tanpa Pemlok 8 jam kerja Ada Pemlok 16 jam kerja	Tanpa Pemlok 4 jam kerja Ada Pemlok 8 jam kerja
Pelayanan Pemberian Izin Bongkar di Luar Kawasan Pabean	Tanpa Pemlok 10 jam kerja Ada Pemlok 16 jam kerja	Tanpa Pemlok 8 jam kerja Ada Pemlok 16 jam kerja	Tanpa Pemlok 4 jam kerja Ada Pemlok 8 jam kerja
Pelayanan Pemberian Izin Muat	24 jam	24 jam	24 jam
Pelayanan Redress Manifest	16 jam kerja	10 jam kerja	10 jam kerja
Pelayanan Pengantaran pita cukai	3 jam kerja	3 jam kerja	3 jam kerja

Sumber Data : Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan

Layanan unggulan yang selalu menjadi fokus perhatian Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap adalah layanan permohonan izin timbun dan izin bongkar di luar kawasan pabean, serta izin muat. Mengingat barang ekspor dan impor di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap merupakan barang yang strategis maka dari itu Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap selalu berusaha untuk mempercepat janji layanan. Kedepannya Bea Cukai Cilacap akan melaksanakan pelayanan secara lebih cepat, tepat dan akurat.

Sasaran Strategis 8 Pemeriksaan dan Pengawasan kepabeanan dan cukai yang efektif

Kode	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Kinerja
8a-CP	Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai	74%	92.96%	120
8b-CP	Persentase efektivitas patroli laut	73%	75.67%	103.66

Pemeriksaan dan Pengawasan Kepabeanan dan Cukai merupakan kegiatan pemeriksaan secara data, informasi, dan/ atau secara fisik terhadap barang yang berkaitan dengan impor dan/atau ekspor, barang kena cukai (BKC), dan barang lain dan/atau tempat yang berhubungan dengan BKC, serta keseluruhan kegiatan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai yang meliputi kegiatan intelijen, patroli, penindakan, penanganan perkara dalam rangka memastikan dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai secara efektif.

Capaian Sasaran Strategis ini adalah sebesar 111.83 yang dikontribusikan dari indikator kinerja Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai dan Persentase efektivitas patroli laut.

8a-CP Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai

Tabel 3.20
Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai

T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Pol / K.P.
Target	25%	45%	62%	74%	Max / TLK
Realisasi	70.56%	86.18%	90.84%	92.96%	
Capaian	120	120	120	120	

Sumber Data : Seksi Penindakan dan Penyidikan

Pelanggaran kepabeanan dan cukai adalah pelanggaran kepabeanan dan cukai yang berhasil ditindak oleh petugas KP DJBC, Kanwil DJBC, KPU, dan KPPBC di seluruh Indonesia sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal terakhir bulan yang dilaporkan.

Kegiatan patroli adalah kegiatan penindakan yang belum memiliki target spesifik. Sedangkan Operasi penindakan adalah kegiatan penindakan yang telah memiliki target spesifik berdasarkan Nota Hasil Intelijen (NHI) dari unit intelijen maupun sumber informasi lainnya.

Jumlah rencana pelaksanaan patroli dan/atau Operasi Penindakan adalah jumlah rencana yang disampaikan oleh Manajer Kinerja Organisasi pada awal tahun berdasarkan data dan analisis dari Direktorat Penindakan dan Penyidikan dengan mempertimbangkan:

- Rencana Patroli dan Operasi Penindakan usulan dari Kanwil, KPUBC dan KPPBC;
- Rencana pelaksanaan pengawasan barang kena cukai illegal;
- Rencana Patroli laut yang sudah ditetapkan Subdit Patroli laut; dan
- Data historis NHI, info lainnya (untuk patroli), LI-1 (info dari masyarakat), tertangkap tangan (pada tahun sebelumnya).

Pelaksanaan patroli dan/atau operasi penindakan adalah bentuk realisasi dari rencana operasi penindakan sejak tanggal 1 Januari 2022 yang dibuktikan dengan LPT (Laporan Pelaksanaan Tugas) atau bentuk laporan lainnya.

Pelanggaran kepabeanan dan cukai adalah pelanggaran di bidang kepabeanan dan cukai yang timbul dari adanya kegiatan patroli dan/atau operasi penindakan yang telah dilakukan penindakan oleh Seksi Penindakan dan Penyidikan di dalam wilayah pengawasan yang kemudian dilaporkan dan dibuktikan dengan dokumen Surat Bukti Penindakan (SBP) dan Berita Acara Penegahan (BA Tegah).

Tindak lanjut temuan pelanggaran sesuai dengan Pasal 84 sampai dengan 90 Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-17/BC/2020 tentang Pengawasan, yang dapat berupa pengenaan sanksi administrasi berupa denda, penyidikan, penetapan barang sebagai Barang Dikuasai Negara (BDN) atau Barang Milik Negara (BMN), pemblokiran, rekomendasi audit, reeksport, rekomendasi tidak dilayani pemesanan pita cukai, dan pelimpahan ke Instansi terkait, pembekuan dan/atau pencabutan NPPBKC, embekuan dan/atau pencabutan izin kepabeanan, penyerahan izin lartas dari instansi teknis terkait, perubahan klasifikasi pos tarif, pemabatalan ekspor, Pemusnahan BKC Bawaan Penumpang.

Kegiatan patroli dan/atau operasi penindakan terhadap pelanggaran kepabeanaan dan cukai yang dilakukan Bea Cukai Cilacap selama tahun 2022 dengan capaian 120 dengan realisasi 92.96% dari target 74%.

Tabel 3.21
Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanaan dan cukai

Kegiatan	Hitungan	Total
1. Pelaksanaan patroli dan/atau operasi penindakan		59
2. Total skor pelaksanaan patroli dan/atau operasi penindakan		47,55
a. menghasilkan BA Tegah dengan kriteria khusus (skor 1,2)	4 x 1,2	4,8
b. menghasilkan BA Tegah selain kriteria khusus (skor 1)	39 x 1	39
c. menghasilkan SBP saja (skor 0,25)	15 x 0,25	3,75
3. Target patroli dan/atau operasi penindakan	1 x 0	0
4. Jumlah Penindakan (BA Tegah)		35
5. Tindak Lanjut BA Tegah		100
a. Pengenaan SPSA atau STCK (skor 1,3)		101,80
b. Penetapan sebagai BMN (skor 1)	6 x 1,3	7,8
c. Pelimpahan ke instansi terkait (skor 1)	88 x 1	88

Sumber Data : Seksi Penindakan dan Penyidikan

Realisasi persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanaan dan cukai tahun 2021 sebesar 92.31% dengan target 73%, sehingga terdapat kenaikan 0,65. Dalam pelaksanaan kegiatan dan operasi kepabeanaan dan cukai masih belum optimal karena masih ada kendala yang dialami yaitu tingkat kepatuhan/kesadaran masyarakat terhadap peraturan masih sangat rendah, dan sarana serta prasarana yang ada saat ini belum bisa menjangkau wilayah Perairan Laut Cilacap.

Tabel 3.22
Realisasi efektifitas kegiatan patroli dan operasi Kepabeanaan dan Cukai Tahun 2021 dan 2022

Penindakan	2021	2022
1. Jumlah Pelanggaran	67 kasus	134 kasus
a. Cukai Hasil Tembakau	44 kasus	99 kasus
b. Cukai MMEA	5 kasus	6 kasus
c. NPP	7 kasus	6 kasus
d. Tidak ada pelanggaran	10 kasus	21 kasus
e. Kepabeanaan	1 kasus	2 kasus
Nilai barang	Rp86.088.400	Rp984.763.400
Total Kerugian Negara	Rp89.529.705	Rp767.946.874
Jumlah tangkapan		
a. Rokok ilegal	89.665 batang	888.631 batang
b. MMEA	205.960 ml	104.75 ml
c. Liquid Vape	-	-

Penindakan	2021	2022
d. TIS	28.242 gram	252 gram
e. NPP	<i>Alprazolam 1030 butir Tramadol HCL 100 butir tembakau gorilla 123,5 gr Ganja.61,7 gr</i>	<i>Tramadol HCL 1250 butir Hexymer 2 mg 3006 butir Trihexyphenidyl 600 butir Riklona 51 butir</i>

Sumber Data : Seksi Penindakan dan Penyidikan

Temuan pelanggaran tersebut merupakan salah satu hasil kerja sama antara Bea Cukai Cilacap dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Kebumen. Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa memang terjadi penurunan capaian pada IKU ini dengan disertai semakin turunnya jumlah tangkapan, nilai barang, serta total kerugian negara. Rencana aksi pada Tahun 2023 akan melaksanakan kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai yang lebih efektif dan efisien.

8b-CP Persentase efektivitas patroli laut

Tabel 3.23
Persentase efektivitas patroli laut

T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Pol / K.P.
Target	10%	30%	60%	73%	Max / TLK
Realisasi	26.25%	42.50%	69.58%	75.67%	
Capaian	120	120	120	103.66	

Sumber Data : Seksi Penindakan dan Penyidikan

Persentase efektivitas patroli laut diukur dari 4 komponen yaitu :

1. Pelaksanaan Patroli Laut (Bobot 65%)
2. Pelaksanaan Patroli Laut yang Melakukan Pemeriksaan Sarana Pengangkut (Bobot 10%)
3. Pelaksanaan Patroli Laut yang Menghasilkan Penindakan (Bobot 10%)
4. Pelaksanaan Patroli Laut yang Menghasilkan Penindakan berdasarkan Targeting (Bobot 15%)

1. Pelaksanaan Patroli Laut (Bobot 65%)

Pelaksanaan Patroli Laut dihitung dari jumlah pelaksanaan patroli laut dibagi dengan jumlah rencana patroli laut. Rencana patroli laut masing-masing unit eselon II di lingkungan DJBC disampaikan melalui Nota Dinas Direktur Penindakan dan Penyidikan pada tahun berjalan dan dapat berubah selambat-lambatnya tertanggal 18 Oktober. Pelaksanaan Patroli Laut dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah. Surat Perintah yang diperhitungkan dalam IKU memiliki jumlah hari patroli laut dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Kapal Patroli Kelas I s.d. IV jumlah hari patroli laut minimal 14 hari.
- b. Kapal Patroli Kelas V dan VI jumlah hari patroli laut minimal 4 hari.
- c. Jumlah hari patroli laut dapat kurang dari ketentuan huruf a dan b apabila:

- 1) kegiatan patroli tersebut menghasilkan penegahan sebagaimana adanya informasi dugaan pelanggaran di bidang kepabeanan dan cukai dengan dibuktikan SBP, BA Tegah, dan NHI/NHI-N/NI/NI-N serta berdasarkan persetujuan Pejabat Penerbit Surat Perintah.
- 2) Saat pelaksanaan tugas patroli laut terdapat kebutuhan SAR, kebutuhan penambahan kekuatan unsur patroli laut, dan/atau kebutuhan lainnya yang mendesak berdasarkan persetujuan/perintah Direktur Penindakan dan Penyidikan.
- 3) Kapal patroli mengalami kerusakan/keadaan darurat lainnya, dengan persetujuan Pejabat Penerbit Surat Perintah serta melaporkannya ke Direktur Penindakan dan Penyidikan.
- 4) Dalam hal terdapat perubahan atau penggantian kapal patroli karena kerusakan/keadaan darurat lainnya sebagaimana dimaksud butir 3), jumlah minimal hari patroli kapal yang menggantikan dapat sejumlah sisa dari hari patroli kapal yang digantikan dengan persetujuan Pejabat Penerbit Surat Perintah. Kedua Surat Perintah tersebut dihitung menjadi 1 capaian pelaksanaan patroli laut.

Kapal Patroli Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap merupakan Kapal Patroli Kelas VI sehingga jumlah hari patroli yang dilaksanakan untuk setiap patroli adalah 4 hari.

Patroli laut yang saat penerbitan surat perintahnya bertujuan untuk :

- a. tindak lanjut dari penyidikan;
- b. memberi bantuan pencarian dan penyelamatan/*Search and Rescue* (SAR) sesuai dengan peraturan perundang undangan mengenai hukum laut;
- c. memberi bantuan pengamanan dan pelaksanaan tugas pejabat negara; dan/atau
- d. tujuan lainnya berdasarkan persetujuan Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk dan tidak dalam rangka pelaksanaan penindakan di bidang kepabeanan dan cukai, maka penerbitan Surat Perintah tersebut mengurangi jumlah rencana patroli laut yang telah ditentukan.

Maksimal capaian pelaksanaan Pelaksanaan Patroli Laut adalah 65%.

2. Pelaksanaan Patroli Laut yang Melakukan Pemeriksaan Sarana Pengangkut (Bobot 10%)

Pelaksanaan patroli laut yang melakukan pemeriksaan sarana pengangkut adalah kegiatan patroli laut yang dalam masa patrolinya melakukan paling sedikit 1 (satu) kali pemeriksaan sarana pengangkut dadibuktikan dengan BA Pemeriksaan Sarana Pengangkut. Pemeriksaan sarana pengangkut yang sandar di dermaga dalam rangka pemeriksaan kedatangan/keberangkatan sarana pengangkut tidak diperhitungkan dalam IKU ini.

3. Pelaksanaan Patroli Laut yang Menghasilkan Penindakan (Bobot 10%)

Pelaksanaan patroli laut yang menghasilkan penegahan merupakan patroli laut yang dalam masa patrolinya menghasilkan paling sedikit 1 (satu) penegahan di laut atau penegahan hasil hot pursuit sampai di pesisir. Kegiatan ini dibuktikan dengan Berita Acara Penegahan (BA Tegah).

Pelaksanaan patroli laut yang menghasilkan penyegelan dalam rangka pengamanan merupakan patroli laut yang dalam masa patrolinya melakukan paling sedikit 1 (satu) penyegelan selain dalam rangka penindakan lebih lanjut sebagaimana diatur pada Pasal 56 ayat (1) Peraturan Direktur

Jenderal nomor PER-14/BC/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Patroli Laut Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan dibuktikan dengan Berita Acara Penyegehan (BA Segel).

4. Pelaksanaan Patroli Laut yang Menghasilkan Penindakan berdasarkan *Targeting* (Bobot 15%)

Pelaksanaan patroli laut yang menghasilkan penindakan berdasarkan *targeting* merupakan kegiatan patroli laut yang dalam masa patrolinya menghasilkan paling sedikit 1 (satu) penegahan di laut atau penegahan hasil *hot pursuit* sampai di pesisir yang diperoleh dari informasi *targeting*. Kegiatan ini dibuktikan dengan adanya dokumen Nota Hasil Intelijen (NHI), Nota Hasil Intelijen NPP (NHI-N), Nota Informasi (NI) atau Nota Informasi NPP (NI-N).

Dalam hal satu kali pelaksanaan patroli laut menghasilkan lebih dari 1 (satu) pemeriksaan sarana pengangkut, penegahan di laut atau penegahan hasil *hot pursuit* sampai di pesisir, penegahan di laut atau penegahan hasil *hot pursuit* sampai di pesisir yang diperoleh dari informasi *targeting*, maka tetap dihitung sebagai 1 (satu) kali pemeriksaan sarana pengangkut, pelaksanaan patroli laut yang menghasilkan penindakan, dan pelaksanaan patroli laut yang menghasilkan penindakan *targeting*.

Pencapaian target IKU sebesar 103.66, dengan rincian target sebesar 73% terealisasi 75.67%. Pelaksanaan patroli laut selama tahun 2022 sejumlah 15 kali dari total rencana pelaksanaan patroli laut sejumlah 12 kali. Dari 12 kali pelaksanaan patroli laut tersebut hanya didapat 1 (satu) penindakan karena wilayah perairan dalam pengawasan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap termasuk dalam kategori *low risk*. Realisasi pelaksanaan patroli laut yang melakukan pemeriksaan sarana pengangkut sebanyak 15 kali.

Jika dibandingkan dengan pencapaian target IKU ini pada tahun 2021 adalah 106.64 dengan target 71.5% dan terealisasi 76.25%. Hal tersebut menunjukkan adanya penurunan capaian. Kedepannya untuk tahun 2022 akan dilaksanakan pengawasan dalam hal ini patroli laut secara lebih ketat lagi dan mengusahakan setiap pelaksanaan patroli minimal terdapat satu kali pemeriksaan sarana pengangkut.

Sasaran Strategis 9 Pengendalian mutu dan pengawasan internal yang bernilai tambah

Kode	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Kinerja
9a-CP	Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	82%	N/A	N/A
9b-N	Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal	90,25%	100%	110,8

Pelaksanaan pengendalian mutu dan pengawasan internal dilaksanakan untuk memastikan semua pekerjaan telah sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku dan memberikan nilai tambah bagi organisasi dengan memberikan solusi perbaikan yang efektif atas permasalahan yang ditemukan guna tercapainya tujuan organisasi.

Capaian Sasaran Strategis ini adalah sebesar 110,8 yang hanya dikontribusikan dari indikator kinerja Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal karena persentase tindak lanjut APF Nihil.

9a-CP Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional

Tabel 3.24
Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional

T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Pol / K.P.
Target	10%	30%	60%	83%	Max / TLK
Realisasi	N/A	N/A	N/A	N/A	
Capaian	N/A	N/A	N/A	N/A	

Sumber Data : Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan

Aparat Pengawas Fungsional (APF) adalah Aparat Pengawas Fungsional internal pemerintah yaitu Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, serta Aparat Pengawas Fungsional eksternal pemerintah yaitu Badan Pemeriksa Keuangan RI. Rekomendasi hasil audit Aparat Pengawasan Fungsional adalah saran dan/atau perbaikan yang direkomendasikan oleh Aparat Pengawas Fungsional kepada DJBC berkaitan dengan temuan hasil audit. Saldo Rekomendasi Pada tahun berjalan adalah :

1. Jumlah rekomendasi yang diterima DJBC (Dit. Kepatuhan Internal, Unit Organisasi Eselon II Kantor Pusat DJBC, Kanwil DJBC, KPUBC, KPPBC, BLBC dan PSO) selama periode 1 Januari s.d. 31 Oktober tahun berjalan, ditambah;
2. Saldo rekomendasi pada tahun-tahun sebelumnya yang masih berstatus belum tuntas berdasarkan data pada Nota Dinas yang disampaikan oleh Direktur Kepatuhan Internal, ditambah;
3. Saldo rekomendasi yang diterima pada periode 1 November s.d. 31 Desember tahun berjalan yang telah dinyatakan tuntas pada tahun berjalan.

Tindak lanjut yang dapat diakui capaiannya pada tahun berjalan adalah tindak lanjut yang dilakukan selama periode 1 Januari s.d. 31 Desember tahun berjalan terhadap saldo rekomendasi pada tahun berjalan. Rekomendasi yang diterima pada 1 November s.d. 31 Desember tahun berjalan dan sudah dinyatakan tuntas oleh APF pada tahun berjalan diperhitungkan dalam capaian IKU tahun berjalan.

Tanggung jawab tindak lanjut:

KPPBC, BLBC, dan PSO bertanggung jawab untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil audit Aparat Pengawasan Fungsional di unit kerjanya masing-masing.

Untuk tindak lanjut yang dilakukan atas rekomendasi yang diterima selama periode 1 November s.d. 31 Desember tahun berjalan namun belum dinyatakan tuntas, maka tindak lanjut tersebut tidak diperhitungkan pada tahun berjalan.

Tindak lanjut yang telah dilakukan pada tahun sebelumnya tidak dapat diakui sebagai capaian tindak lanjut pada tahun berjalan, sehingga unit yang telah melakukan tindak lanjut atas saldo rekomendasi tersebut namun belum dinyatakan tuntas, harus melakukan tindak lanjut kembali pada tahun berjalan.

Pada Tahun 2021 dan 2022 tidak terdapat rekomendasi hasil audit untuk Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap.

9b-N Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal

Tabel 3.25
Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal

T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Pol / K.P.
Target	40%	55%	70%	90.5%	Max / TLK
Realisasi	100%	100%	100%	100%	
Capaian	120	120	120	110.5	

Sumber Data : Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan

Indikator ini mengukur rata-rata persentase realisasi atas 5 (lima) kegiatan yang meliputi:

1. Persentase tindak lanjut penyelesaian pengaduan masyarakat;
2. Persentase tindak lanjut atas rekomendasi pengawasan kepatuhan pelaksanaan tugas;
3. Persentase rekomendasi penjaminan kualitas yang selesai ditindaklanjuti;
4. Persentase tindak lanjut atas rekomendasi evaluasi pengelolaan kinerja; dan
5. Persentase tindak lanjut atas rekomendasi investigasi internal berupa hukdis

Target dari IKU tersebut adalah:

1. Penanganan Pengaduan Masyarakat

Pengaduan masyarakat adalah informasi yang disampaikan masyarakat dan dikelola melalui aplikasi SIPUMA yang ditangani oleh UKI diseluruh unit kerja DJBC berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-154/BC/2012.

Jenis pengaduan masyarakat terdiri dari:

- a. Pengaduan bersifat non-operasional yaitu pengaduan yang berisi permasalahan pelanggaran disiplin dan kode etik pegawai Bea Cukai.
- b. Pengaduan bersifat operasional yaitu pengaduan yang berisi permasalahan teknis kepabeanan dan cukai dan permasalahan teknis lainnya (unit penunjang).

Jumlah pengaduan yang diterima adalah seluruh jenis pengaduan yang dikelola dalam Sistem Aplikasi Pengaduan Masyarakat (SIPUMA) pada periode 1 Januari s.d. 30 November 2022 ditambah saldo pengaduan tahun 2021 yang masih belum selesai diproses, ditambah pengaduan masyarakat yang diterima pada bulan Desember 2022 dalam hal sudah selesai diproses pada tahun 2022.

Tanggung Jawab tindak lanjut:

- a. Kantor Wilayah DJBC: seluruh pengaduan non-operasional dan melakukan pemantauan tindak lanjut pada satuan kerja dibawahnya.
- b. KPUBC, KPPBC, BLBC dan PSO: pengaduan non-operasional dan operasional di unit kerjanya masing-masing;

Pengaduan telah ditindaklanjuti, apabila:

- a. Pengaduan non-operasional: diterbitkan Laporan Pelaksanaan Tugas (LPT) oleh Pengkaji DJBC (Dit. KI, Kanwil DJBC, KPPBC, BLBC dan PSO);

- b. Pengaduan operasional: diterbitkan surat/Nota Dinas penerusan kepada unit terkait dan/atau Surat Perintah/Tugas tindak lanjut oleh UKKI.

Pengaduan dianggap selesai ditindaklanjuti, apabila:

- a. Pengaduan dinyatakan selesai oleh Pejabat Yang Berwenang, atau
- b. Pengaduan dinyatakan selesai oleh Pengkaji, atau
- c. Pengaduan dinyatakan tidak dapat ditindaklanjuti oleh Verifikator, atau
- d. Pengaduan yang dimintakan data tambahan oleh Verifikator namun tidak mendapatkan respon dari pengadu dalam waktu 14 hari kalender.

2. Pengawasan Kepatuhan Pelaksanaan Tugas

Pengawasan Kepatuhan Pelaksanaan Tugas (PKPT) adalah serangkaian kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh tim PKPT terhadap kegiatan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengawasan kepabeanan dan cukai, administrasi, dan fungsi lain di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Rekomendasi hasil PKPT adalah rekomendasi yang memuat perbaikan dan/atau peningkatan pelaksanaan tugas yang diperoleh berdasarkan temuan PKPT sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil PKPT (LHP) serta disampaikan melalui surat/nota dinas Direktur Kepatuhan Internal kepada Pimpinan Unit Kerja Objek PKPT.

Tindak lanjut rekomendasi hasil PKPT adalah kegiatan peningkatan pelaksanaan tugas dan/atau tindakan lainnya guna menindaklanjuti rekomendasi PKPT yang dituangkan dalam surat/nota dinas tindak lanjut rekomendasi dan disampaikan kepada Direktur Kepatuhan Internal.

Tindak lanjut rekomendasi memadai dalam hal:

- a. Sesuai dengan rekomendasi PKPT;
- b. Tidak sesuai dengan rekomendasi PKPT, namun lebih efektif pertimbangan Direktur Kepatuhan Internal; atau
- c. Tidak dapat dilaksanakan dan rekomendasi PKPT dinyatakan Tidak Dapat Ditindaklanjuti berdasarkan pertimbangan Direktur Kepatuhan Internal.

Tindak lanjut rekomendasi tidak memadai dalam hal tindak lanjut rekomendasi PKPT tidak sesuai dengan rekomendasi PKPT dan tidak lebih efektif. Jumlah rekomendasi PKPT adalah:

- a. rekomendasi PKPT yang disampaikan pada bulan Januari s.d. November tahun berjalan;
- b. rekomendasi PKPT yang belum ditindaklanjuti dan/atau telah ditindaklanjuti namun tidak memadai pada tahun-tahun sebelumnya.

b. Catatan:

- 1) Penilaian tindak lanjut rekomendasi PKPT memadai atau tidak memadai dituangkan dalam surat/nota dinas penilaian tindak lanjut rekomendasi PKPT yang dibuat oleh UKI.
- 2) Rekomendasi PKPT yang disampaikan pada bulan Desember dihitung pada tahun berikutnya, kecuali rekomendasi PKPT tersebut telah ditindaklanjuti pada tahun berjalan.

3. Penjaminan Kualitas

Penjaminan kualitas dilaksanakan dengan melakukan pemantauan atas proses Penerapan Pengendalian Intern yang mengacu kepada PP Nomor 60 Tahun 2008. Bentuk pelaksanaan

pemantauan atas penerapan pengendalian intern dilaksanakan dengan mengacu kepada beberapa aturan turunannya yang kemudian disusun kerangka pemantauan oleh Direktorat Kepatuhan Internal.

a. EPITE (Evaluasi Pengendalian Intern Tingkat Entitas)

EPITE dilaksanakan sesuai Rancangan Pemantauan Tahunan untuk menilai efektivitas pengendalian intern tingkat entitas sesuai dengan KMK Nomor 477/KMK.09/2021.

b. Pemantauan Kode Etik

kewajiban pelaksanaan serta panduan pelaksanaan tertuang dalam Rancangan Pemantauan Tahunan DJBC ND-1233/BC.08/2021 dan perubahannya.

c. PPITA

Pemantauan Pengendalian Utama (PPU), merupakan kegiatan bagian dari PPITA yang dilaksanakan oleh UKI. PPU terdiri atas :

- 1) Pengujian Kepatuhan Pengendalian Utama melalui pengujian atribut sebagaimana terdapat dalam TPPU dan DUPU;
- 2) Pengujian Keakuratan Pengendalian Utama melalui kegiatan reperformance (TRPU) dan/atau kegiatan observasi (TOPU)

Pengujian Pemantauan Pengendalian Utama dilakukan secara periodic dan disampaikan dalam:

- 1) Laporan Hasil Pengujian Pengendalian Utama (LHPPU) yang disampaikan 4 (empat) hari kerja setelah akhir periode
- 2) Laporan Temuan Segera (LTS), satu hari kerja setelah ditemukan temuan segera
- 3) Laporan Temuan Berindikasi Fraud (LTBF), satu hari kerja setelah ditemukan temuan yang berindikasi kecurangan (fraud)

Hasil Temuan dan Rekomendasi PPITA disampaikan kepada Pejabat/Pegawai pada unit terkait. Pejabat yang menerima rekomendasi wajib melaksanakan tindak lanjut dan menyampaikan perkembangan pelaksanaan tindak lanjut tersebut kepada pelaksana pemantauan pada masing-masing unit kerja.

d. Pemantauan Pengendalian Utama (PPU) Tambahan (ND-1233/BC.08/2021)

Adalah PPU yang dilaksanakan oleh unit kerja DJBC diluar kegiatan yang telah ditunjuk oleh Direktorat Kepatuhan Internal pada Rancangan Pemantauan (RPT) tahun berjalan.

e. Fraud Risk Scenario (FRS) (KMK Nomor 477/KMK.09/2021)

adalah dokumen yang berisi potensi fraud, skema fraud, dan indikator fraud, UKI masing-masing satker memanfaatkan FRS dengan memantau indikator fraud yang telah dirumuskan di FRS sesuai dengan Rencana Pemantauan Tahunan (RPT) DJBC. Inspektorat Jenderal memanfaatkan hasil penyusunan FRS dalam rangka pelaksanaan pengawasan intern

f. Evaluasi PPI (SE-16/BC/2021)

Pengumpulan dan pengamatan dari berbagai macam bukti untuk membandingkan hasil pemantauan pengendalian intern dengan pemberlakuan aturan yang ada, dan/atau menilai kecukupan rancangan pengendalian pada proses bisnis/kegiatan yang dilakukan evaluasi.

Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam bentuk:

- 1) Evaluasi yang dilakukan oleh UKI Tingkat Eselon I dan UKI Tingkat Eselon II yang memiliki unit vertikal atas pelaksanaan pemantauan pengendalian intern; dan/atau
- 2) Evaluasi pengendalian intern yang dilakukan oleh UKI Tingkat Eselon I atas pelaksanaan pengendalian suatu proses bisnis.

g. PIPK PUTIK (PMK Nomor 17/PMK.09/2020)

PUTIK adalah bentuk pengendalian yang bertujuan meyakinkan keamanan, kestabilan dan keandalan kinerja dari hardware & software serta sumber daya manusia dan TIK yang berhubungan dengan sistem-sistem keuangan khususnya dalam rangka penyusunan laporan keuangan

Temuan adalah segala bentuk temuan yang berasal dari seluruh kelemahan pada tabel B2 yang belum dilakukan penelitian lanjutan dan harus dibuat rekomendasi kepada unit pemilik proses bisnis untuk ditindaklanjuti

h. PIPK PROSES / AKUN (PMK Nomor 17/PMK.09/2020)

PIPK dilakukan terhadap proses / transaksi, dirancang dan diimplementasikan untuk memitigasi risiko-risiko dalam pemrosesan transaksi secara spesifik misal akun piutang perpajakan, aset tetap dsb.

Temuan adalah segala bentuk temuan yang berasal dari seluruh kelemahan pada tabel C.1 dan harus dibuat rekomendasi kepada unit pemilik proses bisnis untuk ditindaklanjuti.

4. Evaluasi Pengelolaan Kinerja

Pengelolaan kinerja organisasi adalah proses penataan dan penilaian pelaksanaan tugas unit atau individu yang disesuaikan dengan standar/target kinerja atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya sesuai dengan tugas dan fungsi.

Evaluasi pengelolaan kinerja dilaksanakan dengan berpedoman pada Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-174/BC/2021. Evaluasi pengelolaan kinerja mencakup penilaian terhadap beberapa aspek evaluasi sebagai berikut:

- a. Aspek Administratif.
- b. Aspek Teknis.
- c. Aspek Strategis.

Hasil akhir penilaian evaluasi pengelolaan kinerja dituangkan dalam Laporan Hasil Evaluasi (LHE) yang memuat nilai evaluasi sebagai simpulan serta rekomendasi evaluasi. Penyampaian LHE disertai dengan penyampaian kuesioner atas kualitas rekomendasi yang telah distandarkan oleh Direktorat Kepatuhan Internal.

Setiap rekomendasi akan dinilai kualitasnya melalui kuesioner distandarkan oleh Dit. KI yang kemudian disampaikan kepada evaluatee, atas satu rekomendasi minimal dinilai dengan satu kuesioner dengan responden minimal pengelola kinerja unit yang dievaluasi.

Rekomendasi yang berkualitas adalah rekomendasi yang menurut evaluatee diyakini dapat memberikan dampak positif terhadap pengelolaan kinerja unit nya. Hal ini dianggap terpenuhi

apabila hasil penilaian evaluatee terhadap rekomendasi evaluasi pengelolaan kinerja pada lembar feedback mendapat nilai minimal 3,5 (tiga koma lima).

Rekomendasi dianggap telah ditindaklanjuti apabila tanggapan/tindaklanjuti dari evaluatee telah disampaikan kepada Direktorat Kepatuhan Internal.

5. Investigasi Internal

Rekomendasi adalah rekomendasi berupa pemeriksaan atasan langsung dan penjatuhan hukuman disiplin pegawai atas hasil audit investigasi/ investigasi internal yang telah dilaksanakan oleh Inspektorat Bidang Investigasi (IBI)/ Unit Kepatuhan Internal (UKI).

Selama Tahun 2022 capaian Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap 110.5 dengan realisasi 100% dari target 90.50%. Jika dibandingkan dengan capaian 2020 turun 0,30 dikarenakan adanya kenaikan target dengan realisasi yang sama. Seluruh kegiatan di Bea Cukai Cilacap masih terpantau cukup baik, sehingga tidak terdapat kegiatan investigasi internal. Pada tahun 2022 tidak dilaksanakan kegiatan evaluasi kinerja internal karena telah dilaksanakan kegiatan Evaluasi Pengelolaan Kinerja Eksternal. Kegiatan yang menjadi fokus kepatuhan internal yaitu pemantauan pengendalian internal dan pemantauan kepatuhan pelaksanaan tugas (PKPT).

Tabel 3.26
Realisasi kegiatan monitoring dan pengawasan Kepatuhan Internal

Kegiatan	Realisasi	Jumlah Pelaksanaan	Keterangan
Pengaduan Masyarakat	N/A	N/A	Tidak ada pengaduan masyarakat
PKPT	100%	2 kali	1. PKPT Boatzoeking 2. PKPT Pelayanan dan Pengawasan atas Penyampaian Pemberitahuan HT selesai dibuat (CK-4C)
PPI	100%	12 kali	1. Patroli Laut 2. CK-4C 3. Pengadaan BBM
Evaluasi Kinerja	N/A	N/A	Kegiatan Evaluasi Pengelolaan Kinerja Internal
Investigasi Internal	N/A	N/A	Tidak ada Investigasi Internal

Sumber Data : Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan

Sasaran Strategis 10 Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi

Kode	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Kinerja
10a-N	Persentase peningkatan kompetensi pegawai	78%	105.8%	120
10b-N	Persentase efektivitas manajemen organisasi	82.5%	98.75%	119.7
10c-N	Indeks Efektivitas Pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	90.1%	99.65%	110.6

Organisasi yang berkinerja tinggi ditunjukkan dengan adanya budaya kerja yang efisien dan efektif untuk meningkatkan produktifitas, mengedepankan objektivitas dan keterbukaan serta mempunyai kemampuan untuk beradaptasi secara fleksibel dan kreatif berinovasi sesuai dengan perkembangan kemajuan dunia luar. SDM yang berkinerja tinggi dapat dilihat dari kompetensi dan integritasnya yang tinggi, bersikap positif dan mampu menyelesaikan setiap pekerjaan dengan baik, serta mau belajar untuk meningkatkan kompetensinya sehingga dapat memberikan hasil yang terbaik untuk organisasi.

Capaian Sasaran Strategis ini adalah sebesar 116.77 yang dikontribusikan dari indikator kinerja Persentase peningkatan kompetensi pegawai, Persentase efektivitas manajemen organisasi, dan Indeks Efektivitas Pelaksanaan FGD Pejabat Administrator.

10a-N Persentase peningkatan kompetensi pegawai

Tabel 3.27
Persentase peningkatan kompetensi pegawai

T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Pol / K.P.
Target	78%	78%	78%	78%	Max / TLK
Realisasi	93.47%	97.81%	98.37%	105.80%	
Capaian	119.83	120	120	120	

Sumber Data : Subbagian Umum

Kompetensi Pegawai merupakan kemampuan atau kecakapan yang dimiliki oleh pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan standar yang diharapkan oleh organisasi. Peningkatan Kompetensi Pegawai adalah kegiatan berupa pendidikan atau pelatihan kepada pegawai untuk meningkatkan kompetensi pegawai.

Peningkatan kompetensi pegawai yang diukur terdiri dari dua komponen sebagai berikut:

1. Efektivitas kegiatan PKP

Kegiatan Peningkatan Kompetensi Pegawai (PKP) yang diukur dapat berupa in house training, workshop, lokakarya, dan internalisasi yang dilaksanakan pada unit kerja masing-masing baik secara tatap muka maupun daring (minimal 6 kegiatan yang dilakukan dalam setahun). Tema yang dipilih sebagai materi dapat meliputi Peraturan dan ketentuan teknis di Bidang Kepabeanan dan Cukai atau Pengetahuan dan keterampilan yang menunjang tugas dan fungsi. Narasumber merupakan pihak internal atau eksternal unit kerja yang memiliki kompetensi sesuai dengan tema materi yang dipilih. Peserta kegiatan merupakan pegawai pada masing-masing unit kerja. Efektivitas kegiatan diukur dari nilai post test yang dilaksanakan di akhir kegiatan tanpa dilakukan pre-test di awal kegiatan. Soal disusun oleh narasumber berupa benar/salah atau pilihan ganda dengan jumlah 10 soal.

2. Pemenuhan Standar Kompetensi Jabatan

Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) adalah jenis dan level kompetensi yang menjadi syarat suatu jabatan. Job Person Match (JPM) adalah indeks kesesuaian antara kompetensi pejabat dengan SKJ.

Pejabat yang diukur JPM-nya adalah seluruh pejabat struktural (eselon II, III, dan IV) dalam unit organisasi masing-masing kecuali:

- a. Pegawai Batas Usia Pensiun (BUP) 2 tahun (cut off 31 Desember 2024).
- b. Pegawai Promosi <1 tahun.

Data JPM (hasil assessment) dari seluruh pejabat struktural dapat diakses melalui aplikasi HRIS Kemenkeu.

3. Tingkat Implementasi Learning Organization

Learning organization (organisasi pembelajar) adalah organisasi yang secara terus menerus dan terencana memfasilitasi anggotanya agar mampu terus menerus berkembang dan mentransformasi diri baik secara kolektif maupun individual dalam usaha mencapai hasil yang lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan yang dirasakan bersama antara organisasi dan individu di dalamnya.

Implementasi Learning Organization sebagaimana diamanatkan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor SE-14/BC/2021 Tentang Implementasi Learning Organization di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai. Metode pengukuran self sssesment merupakan pengukuran implementasi organisasi pembelajar yang dilakukan secara mandiri oleh tiap-tiap unit organisasi dengan menggunakan kertas kerja yang telah distandarkan oleh Sekretariat DJBC.

Metode pengukuran survei merupakan pengumpulan data implementasi LO yang diisi oleh seluruh pegawai aktif pada tiap-tiap unit organisasi. Pelaksanaan survei akan dikoordinasikan oleh Sekretariat DJBC. Tingkat implementasi LO yang ditargetkan adalah 80, dengan periode penilaian yaitu januari s.d. November 2022. Batas waktu pengumpulan kertas kerja self assessment dan dokumen pendukung sampai dengan 30 November 2022.

Hasil pengukuran tingkat efektivitas kegiatan *training*, *retraining*, dan P2KP dituangkan ke dalam bentuk indeks. Realisasi indeks tersebut menjadi indikator kinerja pada Bea Cukai Cukai, dengan tingkat efektivitas sebagai berikut:

$0 \leq x < 40$	Tidak efetif
$40 \leq x < 60$	Kurang efektif
$60 \leq x < 75$	Cukup efektif
$75 \leq x < 90$	Efektif
$90 \leq x < 100$	Sangat efektif

Mekanisme penilaian peningkatan kompetensi pegawai diukur dengan cara:

- a. Persentase peningkatan kompetensi pegawai dihitung dari persentase peserta pelatihan yang mendapatkan predikat efektif (50%) dan persentase rata-rata nilai *post test* peserta (50%).
- b. Peserta pelatihan yang mendapatkan predikat yang efektif adalah peserta dengan nilai post-test ≥ 7 poin (lebih dari atau sama dengan 7 poin)

Pencapaian target IKU Presentase peningkatan kompetensi pegawai Tahun 2022 adalah 120 dengan realisasi 105.8% dari target yang ditetapkan yaitu 78%. Kegiatan peningkatan kompetensi pegawai dilaksanakan melalui beberapa kegiatan diantaranya:

Tabel 3.28
Rincian kegiatan peningkatan kompetensi pegawai

Kegiatan	Peserta	Peserta yang mendapat nilai lebih dari 7	Rata-rata nilai post test	Persentase
Januari PPKP Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat UAKPA	27	26	9.48	95.55%
Februari PPKP Identifikasi Keaslian Pita Cukai	22	20	8.36	87.25%
Maret PPKP Penatausahaan Piutang di Lingkungan DJBC	30	30	9.60	98.00%
April Sosialisasi Anti Korupsi dan Gratifikasi	27	27	9.73	98.65%
Mei PPKP Registrasi IMEI dan Sosialisasi BTKI	20	20	9.95	99.75%
Juni PKP Learning Organization	19	19	9.89	99.45%
Juli Sosialisasi PMK Nomor109/PMK.010/2022	25	25	9.72	98.60%
November Sosialisasi Cyber Security Awareness	15	15	9.87	99.35%
September PKP Jaminan dalam Rangka Kepabeanan dan Cukai	21	21	9.90	99.50%
November PKP Teknis Pemeriksaan Sarana Pengangkut Laut	22	22	9.77	98.85%
November PKP Penganggaran dan Pengelolaan Kinerja	21	21	9.95	99.75%

Sumber Data : Subbagian Umum

Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2021 capaiannya sama yaitu 120. Rencana aksi untuk Tahun 2023 adalah meningkatkan kualitas pelaksanaan peningkatan kompetensi pegawai dengan membuat kegiatan peningkatan kompetensi pegawai yang praktikal sehingga pegawai bisa lebih mudah untuk memahami.

10b-N Persentase efektivitas manajemen organisasi

Tabel 3.29
Persentase efektivitas manajemen organisasi

T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Pol / K.P.
Target	47.50%	50%	60%	82.50%	Max / TLK
Realisasi	68.88%	88%	90%	98.75%	
Capaian	120	120	120	119.7	

Sumber Data : Subbagian Umum dan Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan

Indikator Persentase Efektivitas Manajemen Organisasi terdiri dari 2 sub IKU yaitu:

1. Efektifitas Dialog Kinerja Organisasi

Sesuai dengan KMK Nomor 590/KMK.01/2016, DKO merupakan komunikasi formal antara pimpinan pemilik peta strategi dengan pejabat dan pegawai di bawahnya untuk mendiskusikan pencapaian strategi, kinerja, strategi, dan rencana aksi organisasi yang dilaksanakan secara terstruktur dan berkala.

Efektivitas Dialog Kinerja Organisasi diukur dari 3 komponen yaitu :

a. Pelaksanaan DKO (bobot 25%)

Pelaksanaan DKO diukur dari ketersediaan dokumen DKO sebagai berikut :

- 1) Kehadiran pimpinan unit (10%)
- 2) Surat undangan (5%)
- 3) Absensi peserta rapat (5%)
- 4) Lembar Capaian Kinerja (LCK) dan isu kinerja (30%)
- 5) Risalah rapat beserta Matriks Tindak Lanjut hasil rapat (30%)
- 6) Lembar Monitoring Matriks Tindak Lanjut hasil rapat (20%)

b. Tindak lanjut pelaksanaan DKO (bobot 50%)

Tindak lanjut pelaksanaan DKO diukur dari arahan yang dinyatakan selesai dibandingkan dengan seluruh arahan. **Arahan** adalah perintah resmi dengan batas waktu yang jelas yang diberikan oleh pimpinan DKO dalam rangka perbaikan kinerja organisasi. Arahan tahun sebelumnya yang belum dinyatakan selesai, masuk kedalam saldo arahan pada tahun berjalan. **Tindak lanjut arahan** adalah tindakan/ kegiatan yang dilakukan oleh *Unit In Charge* (UIC) untuk melaksanakan arahan/ rencana aksi DKO dan kemudian disampaikan kepada pimpinan melalui unit kepatuhan internal. Status Tindak lanjut arahan dinyatakan:

1) On Track

Tindak lanjut arahan masih belum melewati batas waktu yang telah ditentukan.

2) Off Track

Tindak lanjut arahan telah melewati batas waktu yang telah ditentukan.

3) Finished

Tindak lanjut telah dilaksanakan dan dinyatakan selesai oleh pimpinan unit/ UKI.

c. Kualitas Pelaksanaan DKO (bobot 25%)

Kualitas pelaksanaan DKO dinilai dari dokumen yang disusun oleh pengelola kinerja organisasi berupa LKPK yang berisi Nilai Kinerja Organisasi (NKO), penjelasan progres kinerja, risiko, dan keuangan sesuai format pada Lampiran II SE-19/BC/2021 tentang Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi Dan Pelaporan Capaian Kinerja Di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai. Penilaian kualitas pelaksanaan DKO dilaksanakan dengan menggunakan form yang distandardkan oleh Direktorat Kepatuhan Internal. Mekanisme penilaian terhadap KPPBC TMP C Cilacap dilaksanakan oleh SMKOR Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta. Periode penilaian bahan DKO triwulan II dilakukan dengan batas waktu akhir triwulan II, penilaian

bahan DKO triwulan III dilakukan dengan batas waktu akhir triwulan III, dan penilaian bahan DKO triwulan IV dilakukan dengan batas waktu akhir triwulan IV

2. Efektivitas Implementasi Manajemen Risiko

Persentase Efektivitas Implementasi Manajemen Risiko Efektivitas Implementasi Manajemen Risiko DJBC digunakan untuk mengukur penerapan Manajemen Risiko di lingkungan DJBC. Penilaian efektivitas implementasi Manajemen Risiko (MR) diukur dari 4 unsur yaitu:

1. Pelaksanaan rapat MR (bobot 15%)

Pelaksanaan rapat MR dapat dilaksanakan bersamaan dengan rapat DKO sesuai dengan SE-18/BC/2019. Penghitungan nilai dilakukan secara proporsional sesuai bobot yang ditentukan. Contoh apabila telah dilaksanakan Rapat Penyusunan Piagam Manajemen Risiko maka akan mendapatkan poin 3 yang jika dikonversi kedalam capaian IKU akan mendapat 9% dari bobot keseluruhan 15%.

2. Penyampaian laporan MR (bobot 15%)

Laporan MR merupakan dokumen yang menyajikan informasi pengelolaan risiko yang dilaporkan kepada unit Eselon level di atasnya, serta menyampaikan tembusan kepada Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis. UPR yang telah menyampaikan Laporan Piagam Manajemen Risiko, Laporan Pemantauan I, II, III dan IV dengan tepat waktu sesuai panduan dalam Manual IKU akan mendapatkan poin 4 dengan bobot capaian 3% untuk masing-masing penyampaian laporan, sehingga secara akumulatif UPR tersebut akan mendapat poin 20 dan capaian IKU sebesar 15%.

3. Realisasi Mitigasi Risiko (bobot 50%)

Mitigasi risiko adalah salah satu tahapan dalam proses manajemen risiko untuk menentukan jenis penanganan yang efektif dan efisien untuk suatu risiko agar levelnya berada pada selera risiko Unit Pemilik Risiko. Rencana mitigasi risiko ditetapkan di awal periode untuk dijalankan dalam jangka waktu periode tahun berjalan. Persentase realisasi mitigasi risiko yang dijalankan berdasarkan target kinerja dibuat untuk tiap risiko, dihitung dengan cara membandingkan jumlah realisasi target kinerja yang selesai dijalankan dengan target kinerja yang direncanakan dikali 100% (maksimal 100%)

Realisasi mitigasi risiko berdasarkan target kinerja :

$$(\text{Jumlah realisasi target kinerja yang dijalankan} / \text{Jumlah target kinerja yang direncanakan}) \times 100\%$$

Di bagian akhir, dibuat perhitungan rata-rata persentase mitigasi yang dijalankan dengan membagi jumlah/total persentase realisasi mitigasi risiko berdasarkan target kinerja dengan jumlah mitigasi risiko

4. Review Manajemen Risiko (bobot 15%)

Merupakan salah satu tahapan proses manajemen risiko yang bertujuan untuk memastikan bahwa implementasi manajemen risiko berjalan secara efektif sesuai dengan rencana dan memberikan umpan balik bagi penyempurnaan proses manajemen risiko.

5. Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan TkPMR (5%)

Indeks Penyampaian TkPMR tepat waktu sebagai berikut:

indeks 4 : <15 April

Indeks 3 : 16 April - 31 April

Indeks 2 : 1 Mei - 30 Juni

Indeks 1 : >30 Juni

Dalam upaya memaksimalkan capaian pada IKU ini, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap selalu melaksanakan DKO dengan melengkapi segala dokumen administrasinya dan seluruh arahan yang disampaikan oleh Kepala Kantor seluruhnya telah selesai ditindaklanjuti sehingga mendapat nilai 50%, Dari segi efektivitas implementasi Manajemen Risiko Pelaksanaan rapat MR telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, pelaporan selalu disampaikan tepat waktu, dan mitigasi risiko semua telah dilaksanakan, dan hasil TkPMR Tahun 2021 85.05% serta laporan TkPMR disampaikan secara tepat waktu, sehingga realisasi IKU ini adalah 98.75%

Kedepannya akan dilakukan perubahan-perubahan untuk meningkatkan IKU ini seperti meningkatkan efektivitas pelaksanaan DKO, meningkatkan kualitas mitigasi risiko, serta meningkatkan realisasi mitigasi risikonya.

10c-N Indeks Efektivitas Pelaksanaan FGD Pejabat Administrator

Tabel 3.30
Indeks Efektivitas Pelaksanaan FGD Pejabat Administrator

T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Pol / K.P.
Target	90.1	90.1	90.1	90.1	Max / AVG
Realisasi	N/A	N/A	N/A	99.65	
Capaian	N/A	N/A	N/A	110.6	

Sumber Data : Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan

Tingkat efektivitas FGD Pejabat Administrator merupakan instrumen penilaian untuk mengukur keaktifan Pejabat Administrator dalam melakukan komunikasi internal melalui FGD kepada pegawai di lingkungannya termasuk mengukur mengenai kecepatan pelaksanaan FGD dan feedback peserta (pegawai di bawah koordinasi Pejabat Administrator terkait) terhadap kegiatan FGD yang dilaksanakan. Mekanisme pengukuran efektivitas dilakukan melalui kuesioner yang dikoordinir oleh Setjen (CTO). Kegiatan FGD dilaksanakan berdasarkan Surat Edaran Menteri Keuangan terkait Pelaksanaan Focus Group Discussion. Fokus materi FGD akan ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal melalui surat Kepala Biro SDM atas nama Sekretaris Jenderal kepada Sekretaris Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan. Pengukuran efektivitas pelaksanaan FGD untuk seluruh tema yang ditetapkan oleh Setjen mengacu pada manual IKU ini.

Parameter yang diukur berdasarkan dua aspek yaitu:

1. Kecepatan (seberapa cepat materi FGD disampaikan kepada pegawai sejak pelaksanaan Pra-FGD); dan
2. Feedback peserta yang terdiri dari content, delivery, dan contribution.

Mekanisme pengukuran efektivitas dilakukan melalui:

1. Data pelaksanaan FGD yang ada di e-performance masing-masing Pejabat Administrator; dan
2. Kuesioner yang dikoordinir oleh Setjen (CTO). Kegiatan FGD dilaksanakan berdasarkan Surat Edaran Aspek yang diukur dengan kuesioner (feedback) dari peserta (bawahan) yaitu:

1. Content (topik materi dan pesan yang disampaikan)
 - a. Relevansi topik dengan isu terkini di Kementerian Keuangan maupun sektor publik di Indonesia.
 - b. Pesan inti dari materi yang disampaikan bisa diterima dengan baik.
2. Delivery (cara penyampaian materi oleh Pejabat Administrator)
 - a. Pemateri menguasai topik yang dibawakan.
 - b. Terjadi dialog interaktif dan pemateri mampu menjawab pertanyaan
3. Contribution (dampak kegiatan FGD terhadap peningkatan kapasitas pegawai).
 - a. Materi yang disampaikan meningkatkan kapasitas pegawai.
 - b. Secara keseluruhan, kegiatan FGD bermanfaat.

Kuesioner bisa disusun dalam bentuk pertanyaan dengan opsi pilihan 'sangat tidak setuju' sampai dengan 'sangat setuju' (dengan skala 1 s.d. 10). Kemudian nilai akhir hasil rata-rata setiap aspek yang dinilai dikonversi ke skala 100.

Pada tahun 2022 Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap telah melaksanakan 4 kegiatan FGD dengan data sebagai berikut:

Tabel 3.31
Pelaksanaan FGD Pejabat Administrator

Tanggal Pelaksanaan	Keterangan	Nilai
Periode I	-	N/A
Periode II	-	N/A
Periode III	-	N/A
Periode IV 09 Desember 2022	Topik: Penguatan Budaya Kemenkeu Mendukung Layanan Digital dan Penerimaan Optimal Judul: Budaya Kemenkeu, CEISA 4.0, dan Penerapan NPWP 16 Digit	99.65

Sumber Data : Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan

Berdasarkan data di atas realisasi IKU ini sebesar 99.65 dengan target 90.1 sehingga capaian 110.6 mengalami kenaikan 0.77 dari realisasi tahun sebelumnya. Kedepannya Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap akan melaksanakan FGD dengan lebih menarik lagi guna meningkatkan realisasi IKU ini.

Sasaran Strategis 11 Persentase pengelolaan layanan TIK

Kode	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Kinerja
11a-N	Persentase pengelolaan layanan TIK	80%	96.06%	120

Sistem manajemen informasi yang andal dan terintegrasi akan terwujud dengan adanya pengelolaan TIK yang andal yaitu dengan ketersediaan sistem TIK, penyediaan dan pemenuhan layanan TIK, serta penyelesaian gangguan layanan TIK kepada pengguna layanan sesuai ketentuan yang disepakati pada Katalog Layanan TIK, SLA, dan/atau Business Impact Analysis (BIA).

Capaian Sasaran Strategis ini adalah sebesar 120 yang dikontribusikan dari indikator kinerja Persentase pengelolaan layanan TIK.

11a-N Persentase pengelolaan layanan TIK

Tabel 3.32
Persentase pengelolaan layanan TIK

T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Pol / K.P.
Target	25%	40%	55%	80%	Max / TLK
Realisasi	79.44%	79.44%	90.65%	96.06%	
Capaian	120	120	120	120	

Sumber Data : Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai dan Dukungan Teknis

Pengelolaan layanan TIK merupakan upaya yang dilakukan dalam menjamin terlaksananya layanan TIK secara otomatis berjalan dengan baik.

Kegiatan yang dilakukan meliputi :

1. Pengendalian Keamanan Teknologi Informasi

Merupakan upaya pencegahan terjadinya gangguan atau serangan dalam bentuk peretasan atau serangan *Cyber* (seperti *Malware*, *Phising*, atau *Hacking*) pada *Personal Computer* (PC) yang digunakan oleh pegawai pada Kantor Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Kegiatan yang dilakukan dalam pengendalian keamanan teknologi informasi meliputi :

- Melakukan *Join Domain* pada seluruh PC yang memenuhi syarat dan terkoneksi dengan jaringan intranet maupun internet untuk aplikasi layanan CEISA dan melakukan identifikasi atas IP *Static* dan *Mac Address* atas PC tersebut, serta
- Melakukan sosialisasi atau PKP kepada pegawai terkait Pengendalian Keamanan Teknologi Informasi.

2. Pemenuhan TIK Hanggar

Merupakan pemenuhan TIK baik *software* maupun *hardware* untuk *Personal Computer* (PC) pada lokasi hanggar agar layanan CEISA dapat berjalan dengan baik. Pemenuhan pada PC meliputi:

- Software* antivirus berlisensi dan OS yang kompatibel dengan layanan CEISA (*software* berlisensi)

- b. Utilisasi CPU saat sebelum digunakan (idle/setelah dinyalakan) kurang dari 50%
- c. Jaringan Tersedia koneksi jaringan (internet/LAN) khusus hanggar yang memadai sesuai dengan kebutuhan transaksi masing-masing hanggar dengan bandwidth minimal 1 MBps.

3. Ketepatan waktu penanganan permasalahan layanan CEISA

Merupakan penyelesaian atau pemberian solusi atas permasalahan terkait layanan aplikasi CEISA yang tepat waktu berdasarkan standar jenis permasalahan layanan. Perhitungan waktu penanganan permasalahan layanan CEISA dimulai saat perekaman tiket sampai dengan dilakukan klik selesai PDAD, diselesaikan oleh layer 2 (Servicedesk Direktorat IKC) atau diteruskan ke layer 3 (Programmer, Vendor, dll).

Pada Tahun 2022 telah dilakukan *join* domain PC sebanyak 27 unit dari 27 unit PC yang memenuhi syarat *join* domain. Telah dilakukan pendataan ulang sebanyak 30 PC, dengan hasil 3 PC tidak memenuhi syarat *join domain* karena masih menggunakan *Windows Home Series* dan telah dilakukan instalasi ulang beberapa PC (*Windows 10 Profesional*) sehingga belum dilakukan *join domain* kembali. Telah dilaksanakan kegiatan PKP/sosialisasi tentang Cyber Security Awareness pada bulan Agustus 2022. Capaian sampai dengan akhir tahun adalah 120 dengan realisasi 96.06% dari target 80%. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2020 mengalami kenaikan 16,62 dengan realisasi tahun 2021 sebesar 79,44% dari target 71%.

Dalam Rangka menunjang kinerja persentase pengelolaan Layanan TIK masih terdapat beberapa kendala, yaitu :

1. Ada beberapa PC yang belum dilakukan *join domain*.
2. *Windows 7 Discontinue*

Tindakan yang dilakukan dalam memitigasi masalah di atas adalah kedepannya seluruh PC Kantor akan dilakukan *join domain* Kemenkeu untuk salah satu mitigasi risiko security awareness dan disarankan untuk penghapusan PC rusak.

Sasaran Strategis 12 Pengelolaan Keuangan, BMN dan Umum yang Efisien, Efektif dan Akuntabel

Kode	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Kinerja
12a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95.51%	96.4%	100.93

Pengelolaan keuangan, BMN dan umum yang efisien, efektif dan akuntabel dilakukan dengan:

- a. mengelola anggaran yang tersedia dalam DIPA sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan dengan menggunakan prinsip hemat efisien dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output yang telah direncanakan dalam DIPA.
- b. mengelola BMN dengan tertib hukum, tertib fisik, dan tertib administrasi guna memastikan pemanfaatan BMN yang Efisien dan efektif oleh seluruh unit/satker dan
- c. mengelola administrasi umum seperti administrasi ketatausahaan dan kerumahtanggaan secara efektif dan efisien

Capaian Sasaran Strategis ini adalah sebesar 100.93 yang dikontribusikan dari indikator kinerja Persentase kualitas pelaksanaan anggaran.

12a-CP Persentase kualitas pelaksanaan anggaran

Tabel 3.33
Persentase kualitas pelaksanaan anggaran

T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Pol / K.P.
Target	95.51	95.51	95.51	95.51	Max / TLK
Realisasi	100.00	100.00	100.00	96.40	
Capaian	104.70%	104.70%	104.70%	100.93%	

Sumber Data : Subbagian Umum

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Perhitungan IKU "Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran" Kementerian Keuangan mengacu pada Surat Edaran Nomor 8/MK.1/2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Tata Cara Penghitungan Indikator Kinerja Utama Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Kemenkeu. Ruang lingkup perhitungan IKU "Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran" mencakup aspek kualitas serta aspek tata kelola dan administratif yang ada pada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Aspek kualitas didapat atas capaian pada evaluasi kinerja anggaran pada SMART DJA. Aspek tata kelola dan administratif didapat atas capaian kualitas pelaksanaan anggaran pada IKPA DJPB sebagaimana ditetapkan dalam PERDIRJEN Perbendaharaan No. 4 Tahun 2020 tanggal 18 Februari 2020.

Realisasi Tingkat Kualitas Pelaksanaan Anggaran tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 3.34
Persentase realisasi pelaksanaan anggaran

Unsur Kualitas Pelaksanaan Anggaran	Realisasi
1. NILAI IKPA (40%)	
Realisasi Anggaran s.d bulan Desember 2021	Rp 2.019.498.887
Nilai IKPA	100.00%
Kualitas Perencanaan Anggaran	
1. Revisi DIPA	100.00%
2. Deviasi Halaman III DIPA	100.00%
3. Penyerapan Anggaran (Target Triwulan III 70% dari Total Anggaran)	100.00%

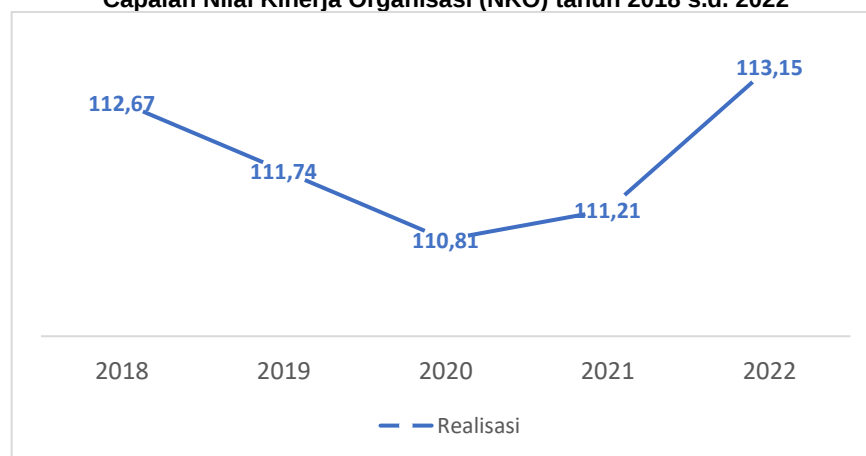
Unsur Kualitas Pelaksanaan Anggaran	Realisasi
Kualitas Pelaksanaan Anggaran	
1. Belanja Kontraktual	100.00%
2. Penyelesaian Tagihan	100.00%
3. Pengelolaan UP dan TUP	100.00%
4. Dispensasi SPM	100.00%
Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	
1. Capaian Output (Target Triwulan III 70% dari Total Target Output)	100.00%
2. Nilai SMART (60%)	
Nilai SMART	94%
Nilai Capaian IKU PKPA s.d. Desember 2022	96.40%

Sumber Data : Subbagian Umum

Sesuai realisasi kinerja 2022, capaian IKU persentase kualitas pelaksanaan anggaran Bea Cukai Cilacap 100.93 dengan realisasi 96.4% dari target 95.51 %. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022 mengalami penurunan 0.1% dengan capaian 101.05 realisasi 96.5% dari target 95.5%. Rencana aksi untuk Tahun 2022 akan disusun Rencana Penarikan Dana yang lebih akurat dan akan dilakukan monitoring untuk setiap Rencana Kegiatan agar dapat direalisasikan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Setelah dilakukan penghitungan, dari ke-18 IKU yang dimiliki oleh Bea Cukai Cilacap diperoleh Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 113.15 dan seluruh IKU tercapai dengan baik. Berikut merupakan grafik perubahan NKO Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap dari Tahun 2018 sampai dengan 2022. Capaian pada Tahun 2022 ini merupakan capaian tertinggi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Grafik 3.6
Capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) tahun 2018 s.d. 2022



Sumber Data : Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan

C. REALISASI ANGGARAN

Pada tahun anggaran 2022 sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap memperoleh anggaran bersumber dari APBN Rp 2.184.863.000. Pada Tahun 2022 hanya ada pagu anggaran untuk Belanja Barang. Berikut data pagu anggaran TA 2022 sebagai berikut:

Tabel 3.35
Pagu Anggaran

No	Jenis Belanja	Jumlah (Rp)
1	Belanja Barang	2.184.863.000
TOTAL		2.184.863.000

Sumber Data : Subbagian Umum

Realisasi penggunaan anggaran selama Tahun Anggaran 2022 secara keseluruhan yaitu Rp2.019.498.887 dengan realisasi penyerapan sebesar 92.43%.

Rincian realisasi belanja seluruhnya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.36
Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Barang

Tahun Anggaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	Persentase Realisasi
2022	2.184.863.000	2.019.498.887	165.364.113	92.43%

Sumber Data : Subbagian Umum

D. CAPAIAN KINERJA LAINNYA

Selain capaian diatas DJBC juga memiliki kinerja-kinerja lainnya, yang masih berkaitan dengan tugas dan fungsi DJBC. Untuk memberikan gambaran yang jelas secara keseluruhan mengenai pencapaian kinerja Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap di samping Indikator Kinerja Utama, dilakukan pembagian bidang tugas dan fungsi yaitu bidang pelayanan, penerimaan dan pengawasan serta sarana pendukung pengembangan sumber daya manusia. Rincian kinerja lainnya tersebut adalah sebagai berikut:

1. PELAYANAN

a. Pelayanan Ekspor dan Impor

Dalam melaksanakan tugas pokoknya berkenaan dengan kelancaran arus barang dan dokumen impor dan ekspor, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap menerapkan PDE Internet. Volume pelayanan impor dengan

menggunakan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) media penyimpanan elektronik dan PDE Internet yang diproses selama tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 3.37
Data BC 2.0 (PIB)

Bulan	BC-2.0		
	Merah	Hijau	Jumlah
Januari	-	16	16
Februari	-	10	10
Maret	-	12	12
April	1	12	13
Mei	-	31	31
Juni	-	9	9
Juli	-	29	29
Agustus	2	15	17
September	2	12	14
Oktober	3	11	14
November	-	12	12
Desember	-	24	24
Jumlah	8	193	201

Sumber Data : Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai dan Dukungan Teknis

Berdasarkan data pada tabel di atas, selama periode tahun 2022 jumlah BC 2.0 yang diajukan sebanyak 201 dokumen. Dari BC 2.0 yang diajukan tersebut sebanyak 193 dokumen atau 96.02% dilayani dengan jalur hijau dan sebanyak 8 dokumen atau 3.98% dilayani dengan jalur merah (dilakukan pemeriksaan fisik barang).

Sedangkan terhadap kegiatan ekspor, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap melayani Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.38
Data PEB

Bulan	Jumlah PEB
Januari	6
Februari	4
Maret	6
April	7
Mei	6
Juni	5
Juli	5
Agustus	6
September	12

Bulan	Jumlah PEB
Oktober	15
November	3
Desember	4
Jumlah	79

Sumber Data : Seksi Pelayanan Kepabeanaan dan Cukai dan Dukungan Teknis

Berdasarkan data di atas selama Tahun Anggaran 2022 jumlah PEB yang diajukan ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap sebanyak 79 dokumen. Dalam upaya untuk terus menerus meningkatkan pelayanan kepada para pengguna jasa di Bidang Kepabeanaan dan Cukai, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap membuat berbagai inovasi unggulan guna mempercepat dan mempermudah pelayanan sehingga menjadi semakin efektif dan transparan, yang disebut Aplikasi SILALIBC. Aplikasi SILALIBC merupakan Sistem Layanan Online Bea dan Cukai Cilacap yang telah berganti nama menjadi JATAYUBC yaitu Jaringan Aplikasi Tanpa Biaya dan Hemat Waktu Bea Cukai Cilacap. Aplikasi ini mencakup beberapa layanan diantaranya Layanan Izin Bongkar di Luar Kawasan Pabean, Layanan Izin Timbun di Luar Kawasan Pabean, Layanan Izin Muat Ekspor Barang Curah (3D) dan Layanan Pengantaran Pita Cukai.

Aplikasi ini mengedepankan transparansi layanan kepada pengguna jasa dimana pengguna jasa dapat memantau proses permohonan yang diajukan. Dengan adanya aplikasi ini pengguna jasa tidak perlu datang ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap untuk mengurus permohonannya sehingga sangat efisien bagi pengguna jasa. Aplikasi ini akan terus dikembangkan untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada pengguna jasa di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap.

b. Pelayanan Izin Bongkar, Izin Timbun, dan Izin Muat

Dalam pelayanan impor dan ekspor, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap memberikan fasilitas berupa pemberian izin bongkar, izin timbun, dan izin muat dengan menggunakan aplikasi JATAYUBC (www.jatayubc.com). Pemberian izin bongkar di luar kawasan pabean diberikan karena karakteristik barang impor yang tidak memungkinkan untuk dilakukan pembongkaran di dalam Kawasan Pabean. Sedangkan izin timbun di luar Kawasan Pabean diberikan karena komoditi impor yang ada di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap mempunyai karakteristik khusus sehingga penyimpanannya harus pada tempat yang telah ditentukan. Izin muat dalam hal ini atas permohonan pemuatan ekspor barang curah (3D). Rincian pelayanan izin bongkar, izin timbun, dan izin muat dengan menggunakan Aplikasi JatayuBC sebagai berikut:

Tabel 3.39
Data Pelayanan Izin Bongkar, Izin Timbun dan Izin Muat (3D)

Bulan	Izin Bongkar	Izin Timbun	Izin Muat
Januari	4	3	6
Februari	5	2	6
Maret	2	4	7
April	8	2	8
Mei	8	4	7
Juni	6	5	6
Juli	8	1	5
Agustus	9	5	4
September	7	3	8
Oktober	5	7	5
November	6	2	4
Desember	6	1	3
Jumlah	74	39	69

Sumber Data : Seksi Pelayanan Kepabeanaan dan Cukai dan Dukungan Teknis

Berdasarkan data di atas selama tahun 2022 jumlah pemberian Izin Bongkar yang diberikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap sebanyak 74 dokumen, Izin Timbun sebanyak 39 dokumen, dan Izin Muat (3D) 69 dokumen.

c. Pelayanan Barang Kena Cukai

Pelayanan terhadap Barang Kena Cukai pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap masih didominasi oleh cukai hasil tembakau. Pelayanan cukai hasil tembakau pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap sudah menggunakan Aplikasi ExSIS (Excise Services and Information System). Jumlah dokumen cukai hasil tembakau yang berupa Permohonan Penyediaan Pita Cukai (P3C) dan Pemesanan Pita Cukai (CK-1) pada Tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 3.40
Data P3C dan CK-1

Bulan	P3C	CK-1
Januari	7	13
Februari	12	18
Maret	11	23
April	9	14
Mei	12	12
Juni	16	25
Juli	18	18

Bulan	P3C	CK-1
Agustus	18	34
September	23	38
Oktober	19	34
November	22	30
Desember	14	30
Jumlah	181	289

Sumber Data : Seksi Perbendaharaan

Sedangkan untuk jenis golongan pengusaha cukai hasil tembakau pada tahun anggaran 2022 tertera pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.41
Data Golongan Pengusaha Cukai Hasil Tembakau

JENIS HASIL TEMBAKAU	Golongan Pengusaha Pabrik	Jumlah
SKM	I	-
	II	-
SPM	I	-
	II	-
SKT	I	1
	II	-
	III	-
SPT	I	-
	II	1
	III	-
SKTF atau SPTF	Tanpa Golongan	-
KLM	Tanpa Golongan	1
KLB	Tanpa Golongan	12
TIS	Tanpa Golongan	-
CRT	Tanpa Golongan	-
HPTL	Tanpa Golongan	1
Jumlah		10

Sumber Data : Seksi Perbendaharaan

Dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada para pengguna jasa di Bidang Cukai, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap melaksanakan beberapa inovasi untuk mempercepat dan mempermudah pelayanan sehingga menjadi semakin efektif dan transparan, antara lain:

- Adanya aplikasi ketersediaan pita cukai dengan memberikan notifikasi langsung kepada *stakeholder* penerima layanan melalui *handphone*.
- Pengantaran pita cukai ke pabrik rokok terhadap CK-1 Tunai yang dipesan melalui Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap.

d. **Pelayanan Manifes**

Selain pelayanan kepada pengguna jasa yang berkaitan dengan dokumen ekspor, impor dan cukai, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap juga melakukan tugas pelayanan yang berkaitan dengan sarana pengangkut yaitu penerimaan dan penyelesaian *manifest*. Pelayanan terhadap manifest, baik *inward manifest* maupun *outward manifest*.

Tabel 3.42
Data BC.1.1 Masuk (*Inward Manifest*)

Bulan	NIL	Ada Muatan	Jumlah
Januari	5	8	13
Februari	5	6	11
Maret	7	5	12
April	6	8	14
Mei	6	11	17
Juni	5	9	14
Juli	5	9	14
Agustus	5	11	16
September	7	10	17
Oktober	5	6	11
November	2	8	10
Desember	2	6	8
Jumlah	60	97	157

Sumber Data : Seksi Perbendaharaan

Tabel di atas menunjukkan bahwa selama tahun 2022 Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap telah melayani sebanyak 157 inward manifest dengan jumlah dokumen NIL sebanyak 60 dokumen (38,22%) dan jumlah dokumen berisi pos sebanyak 97 dokumen (61,78%).

Tabel 3.43
Data BC.1.1 Keluar (*Outward Manifest*)

Bulan	NIL	Ada Muatan	Jumlah
Januari	5	9	14
Februari	7	4	11
Maret	4	7	11
April	5	9	14
Mei	9	6	15
Juni	7	6	13
Juli	9	8	17
Agustus	7	7	14

Bulan	NIL	Ada Muatan	Jumlah
September	4	9	13
Oktober	8	8	16
November	6	5	11
Desember	7	4	11
Jumlah	78	82	160

Sumber Data : Seksi Perbendaharaan

Tabel di atas menunjukkan bahwa selama Tahun 2022 Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap telah melayani 160 outward manifest dengan jumlah dokumen NIL sebanyak 78 dokumen (48,75%) dan jumlah dokumen berisi pos sebanyak 82 dokumen (51,25%).

e. Registrasi IMEI

Pada tahun 2022 Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap melayani permohonan registrasi IMEI (International Mobile Equipment Identity) untuk barang bawaan penumpang dan awak sarana pengangkut. Sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor SE-20/BC/2021 tanggal 14 Juli 2021 yang diberlakukan mulai 15 September 2021 kemudian pada tanggal 9 Desember 2021 mulai berlaku Peraturan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-13/BC/2021 tanggal 9 November 2021. Selama periode tahun 2022 Bea Cukai Cilacap menyelesaikan sebanyak 343 permohonan. Dari pelayanan tersebut, Bea Cukai Cilacap mendapatkan tambahan penerimaan sebesar Rp314.188.000 dengan rincian Bea Masuk Rp74.845.000, PPN Rp88.751.000, dan PPh Ps 22 Rp150.592.000.

2. PENERIMAAN PAJAK

Sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJBC Jateng dan DI Yogyakarta nomor KEP-586/WBC.10/2022 tanggal 3 November 2022 tentang Perubahan Ketiga KEP-61/WBC.10/2022 tentang Distribusi Target Penerimaan Bea Masuk, Bea Keluar, dan Cukai Per Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Di Lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta Tahun Anggaran 2022, target Penerimaan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap memberikan sumbangan penerimaan Kanwil DJBC Jateng dan DI Yogyakarta sebesar 0,004%. Berikut rincian kontribusi penerimaan per Perusahaan untuk Tahun 2022:

Tabel 3.44
Daftar Perusahaan Penyumbang Penerimaan

No	Perusahaan	Jumlah Penerimaan	%
1	PT HM Sampoerna	Rp 160.216.397.000	64,5749
2	PT Dharmapala Usaha Sukses	Rp 82.770.604.000	33,3605
3	PT Dharmapala Usaha Sukses (KITE)	Rp 4.280.275.000	1,7252
4	PT Pertamina (Persero)	Rp 30.000.000	0,0121
5	PT Pertamina Trans Kontinental	Rp 5.000.000	0,0020
6	PT. Indobaruna Bulk Transport	Rp 5.000.000	0,0020
7	PR Mirasa	Rp 33.264.000	0,0134
8	PR Sintren	Rp 56.616.000	0,0228
9	PR Shinta	Rp 45.500.000	0,0183
10	PR Nusa Harapan	Rp 24.472.000	0,0099
11	PR Padi Unggul	Rp 36.288.000	0,0146
12	PR Prabu Jaya Utama	Rp 68.112.000	0,0275
13	PR Gunung Mas	Rp 6.720.000	0,0027
14	PR Janoko	Rp 21.000.000	0,0085
15	PR Rizki Mulya	Rp 15.792.000	0,0064
16	PR Arjuna Dewiku	Rp 14.280.000	0,0058
17	PR Sartinah	Rp 840.000	0,0003
18	PR Ganda Arum	Rp 840.000	0,0003
19	STCK-1	Rp 80.000.000	0,0322
20	SPPBP	Rp 271.181.600	0,1093
21	CK-2	Rp 17.550.000	0,0071
22	CK-3	Rp 34.740.000	0,0140
23	Registrasi IMEI	Rp 74.845.000	0,0302

Sumber Data : Seksi Perbendaharaan

Selain penerimaan kepabeanan dan cukai sesuai target yang telah ditetapkan, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap juga memberikan sumbangan Penerimaan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) yang terdiri dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk barang impor dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 Impor serta Pajak

Pertambahan Nilai Hasil Tembakau (PPN HT) dan Pajak Rokok selama periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022, dengan rincian sebagai berikut:

a. PDRI

Jenis Penerimaan	Realisasi (Rp)
PPN Impor	1.083.693.465.000
PPh Psl 22	1.260.777.479.000
Total	2.344.470.944.000

b. Pajak Rokok yang telah berhasil dihimpun sebesar Rp 15.965.458.348.

3. BARANG DIKUASAI NEGARA DAN BARANG MILIK NEGARA

Seksi Penindakan dan Penyidikan melakukan penelitian terhadap hasil penindakan yang akan dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian (LHP). Apabila dalam LHP diputuskan Barang Hasil Penindakan berasal dari pelanggar yang tidak dikenal, maka Barang Hasil Penindakan harus ditetapkan sebagai Barang yang Dikuasai Negara paling lama 3 hari kerja setelah diterbitkan LHP. Berdasarkan data hasil penindakan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap hampir seluruh Barang Hasil Penindakan berupa Barang Kena Cukai yang berasal dari pelanggar yang tidak dikenal sehingga perlakuan terhadap Barang Hasil Penindakan tersebut sesuai dengan Pasal 5 dan 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.04/2014 yang menyatakan bahwa terhadap barang kena cukai dan Barang-Barang Lain yang berasal dari pelanggar tidak dikenal, setelah 14 (empat belas) hari sejak dikuasai negara pelanggarnya tetap tidak diketahui, dinyatakan menjadi milik negara. Tabel berikut menunjukkan data mengenai dokumen BDN, BMN, dan dokumen terkait pemusnahan BMN.

Tabel 3.45
Dokumen SBP terkait status BDN dan BMN

Bulan	BDN		BMN	Total
	SBP	KEP		
Januari	4	3	0	7
Februari	7	4	6	17
Maret	8	5	2	15
April	5	3	4	12
Mei	15	10	3	28
Juni	20	20	27	67
Juli	5	3	3	11
Agustus	8	3	5	16
September	15	10	4	29
Oktober	11	8	14	33
November	22	19	12	53
Desember	14	13	8	35
Jumlah	134	101	88	323

Sumber Data : Seksi Penindakan dan Penyidikan

4. PENGAWASAN (PATROLI LAUT)

Patroli laut merupakan salah satu tugas Seksi Penindakan dan Penyidikan dengan menggunakan 1 kapal patroli berupa speedboat ukuran panjang 10 meter buatan tahun 2013 dengan dengan nomor lambung BC 10019 dua unit mesin Merek Mercury Verado masing-masing berkapasitas 300 PK dari Pangkalan Sarana Operasi Tipe B Tanjung Priok. Untuk kapal patroli berupa speedboat ukuran Panjang 6 meter Nomor lambung BC 0601 dua unit mesin Yamaha masing-masing berkapasitas 40 PK dari segi usia kondisinya sudah kurang layak untuk digunakan patroli laut terlebih wilayah perairan Cilacap yang berhubungan langsung dengan Samudra Hindia. Patroli dilakukan di sekitar perairan Pelabuhan Cilacap dan selama tahun 2022 telah dilaksanakan patroli laut sebanyak 15 (lima belas) kali. Data kapal keluar masuk daerah pabean yang melakukan kegiatan dalam wilayah pengawasan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap selama Tahun Anggaran 2022 dan telah dilakukan pemeriksaan sarana pengangkut (boatzoeking) ditunjukkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.46
Data kegiatan Pemeriksaan Sarana Pengangkut (boatzoeking)

Bulan	Jumlah
Januari	14
Februari	13
Maret	9
April	12
Mei	14
Juni	13
Juli	18
Agustus	13
September	16
Oktober	14
November	8
Desember	4
Jumlah	148

Sumber Data : Seksi Penindakan dan Penyidikan

5. SARANA PENDUKUNG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang profesional, dalam tahun 2022 beberapa pegawai telah mengikuti pendidikan dan pelatihan yaitu:

Tabel 3.47
Data kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai

Nama Pelatihan	Peserta	Nama Pelatihan	Peserta
<i>E-Learning Service Excellence and Integrity Strengthening Acceleration (Open Acces)</i>	9	<i>E-Learning Pemeriksaan Barang Impor Dasar Angkatan II Tahun 2022</i>	2

Nama Pelatihan	Peserta	Nama Pelatihan	Peserta
<i>E-Learning Bendahara Penerimaan Angkatan I</i>	1	<i>E-Learning Pengantar National Logistics Ecosystem</i>	1
<i>E-learning Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu</i>	3	<i>E-Learning Perpajakan untuk Pegawai Non DJP (DJBC) Angkatan I Tahun 2022</i>	1
<i>E-Learning Kawasan Berikat Mandiri Angkatan II</i>	1	<i>E-Learning PPSPM angkatan III</i>	1
<i>E-Learning KITE IKM TA. 2022</i>	1	<i>PPKP Identifikasi Keaslian Pita Cukai</i>	22
<i>E-Learning Konsep Dasar Pengusunan Laporan</i>	3	<i>PPKP Penatausahaan Piutang di Lingkungan DJBC</i>	30
<i>E-Learning Manajemen Pengetahuan, Dokumentasi Pengetahuan</i>	39	<i>Sosialisasi Anti Korupsi dan Gratifikasi</i>	27
<i>PJJ Dasar Pengelolaan Keuangan Satket PemPus Akt II</i>	1	<i>PPKP Registrasi IMEI dan Sosialisasi BTKI</i>	20
<i>PJJ Hanggar Pabean dan Cukai</i>	1	<i>PKP Learning Organization</i>	19
<i>PJJ Implementasi PUG</i>	1	<i>Sosialisasi PMK Nomor 109/PMK.010/2022</i>	25
<i>PJJ Kehumasan</i>	1	<i>Sosialisasi Cyber Security Awareness</i>	15
<i>PKP Jaminan dalam Rangka Kepabeanan dan Cukai</i>	21	<i>PKP Teknis Pemeriksaan Sarana Pengangkut Laut</i>	22
<i>PKP Penganggaran dan Pengelolaan Kinerja</i>	21		

Sumber Data : Subbagian Umum

Beberapa kegiatan *training* dan *retraining* pegawai juga telah dilaksanakan yaitu Internalisasi PPKP Identifikasi Keaslian Pita Cukai, PPKP Penatausahaan Piutang di Lingkungan DJBC, Sosialisasi Anti Korupsi dan Gratifikasi, PPKP Registrasi IMEI dan Sosialisasi BTKI, PKP Learning Organization, Sosialisasi PMK Nomor 109/PMK.010/2022, Sosialisasi Cyber Security Awareness, PKP Jaminan dalam Rangka Kepabeanan dan Cukai, PKP Teknis Pemeriksaan Sarana Pengangkut Laut dan PKP Penganggaran dan Pengelolaan Kinerja.

Untuk membina mental pegawai, dilakukan kegiatan pembinaan mental bekerja sama dengan mengundang ustadz dari luar setiap bulan sekali. Untuk memotivasi pegawai dalam bekerja maka perlu diperhatikan hak-hak pegawai diantaranya adalah gaji, dalam tahun 2022 telah diterbitkan Keputusan Kenaikan Gaji Berkala untuk 21 orang pegawai dan Pengusulan Kenaikan Pangkat untuk 10 orang pegawai.

Dalam rangka meningkatkan integritas dan etos kerja pegawai, pemberian sanksi terhadap pegawai yang melakukan pelanggaran. Pada tahun 2022 terdapat 1 (satu) pegawai yang memperoleh penghargaan atas pengabdian kerja yang baik dan tidak ada pegawai yang melakukan pelanggaran dan mendapat hukuman disiplin.

6. Kegiatan Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi (KIS)

Sebagai upaya untuk mewujudkan sinergi antara Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap dengan instansi terkait dan seluruh elemen masyarakat, beberapa kegiatan yang berkaitan dengan masalah koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi (KIS) telah dilaksanakan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap. Kegiatan KIS intern antara lain Internalisasi, bimbingan mental, rapat internal, *briefing*, dan Jumat krida. Adapun kegiatan KIS eksternal antara lain rapat koordinasi dengan instansi terkait di lingkungan Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Kebumen, mengikuti acara yang diselenggarakan oleh instansi terkait maupun pemerintah kabupaten dan acara lain yang diselenggarakan oleh pengguna jasa serta masyarakat.

7. PENGHARGAAN YANG DITERIMA

a. Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada tahun 2020 mengusulkan 72 (tujuh puluh dua) unit kerja untuk dilakukan penilaian dalam rangka pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM oleh KemenPAN-RB, dimana sebanyak 65 (enam puluh lima) merupakan usulan WBK dan 7 (tujuh) unit kerja merupakan usulan WBBM. Dari usulan awalan tersebut setelah dilakukan penilaian oleh TPEI (Direktorat Kepatuhan Internal) dan oleh TPK (Inspektorat Jenderal, Kementerian Keuangan) maka usulan unit kerja yang diusulkan untuk mengikuti penilaian tingkat nasional oleh KemenPAN-RB adalah sebanyak 58 (lima puluh delapan) usulan WBK dan 6 (enam) usulan WBBM. Dari 64 (enam puluh empat) unit kerja yang diusulkan tersebut 36 (tiga puluh enam) diantaranya berhasil memperoleh predikat WBK dan 5 (lima) kantor meraih predikat WBBM dari KemenPAN-RB, dimana pemberian penghargaan tersebut dilaksanakan pada hari Senin, 21 Desember 2020 oleh Menteri PAN-RB. Salah satu unit yang mendapatkan predikat WBBM adalah Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap.

b. Peringkat 1 Satker Dengan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Semester I Tahun 2022

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap memperoleh peringkat 1 sebagai Satker Dengan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Semester I Tahun 2022 dari 51 satker di wilayah pembayaran KPPN Cilacap.

c. Peringkat 3 Satker Dengan Kinerja dan Kualitas Pelaporan Data Capaian Output Semester I Tahun 2022

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap memperoleh peringkat 3 Satker Dengan Kinerja dan Kualitas Pelaporan Data Capaian Output Semester I Tahun 2022 dari 51 satker di wilayah pembayaran KPPN Cilacap.

8. INOVASI

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap terus mengembangkan kreatifitas dan selalu berusaha untuk membuat hal-hal baru yang digunakan untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi. Inovasi yang dibuat oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap diantaranya:

a. JatayuBC

JatayuBC merupakan aplikasi unggulan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap yang terdiri dari sejumlah layanan seperti yang telah dijelaskan yaitu penerbitan izin bongkar di luar Kawasan Pabean, izin timbun di luar Kawasan Pabean, izin muat, pengantaran pita cukai, notifikasi pita cukai telah sampai di KPPBC melalui SMS.

JatayuBC dibangun dari nol oleh pegawai di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap menggunakan *framework Laravel* dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP, dikembangkan dengan database MySQL serta dilengkapi dengan fitur SMS serta disesuaikan dengan rancangan operasional prosedur yang disepakati oleh internal Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap.

Adapun keunggulan yang membedakan JatayuBC dengan aplikasi perizinan timbun, bongkar, dan muat yang sejenis meliputi:

- Pengaman menggunakan QRCode.
- Notifikasi SMS tiap proses.
- Adanya Level Authorization.
- Mendokumentasikan berita acara pemeriksaan.
- Memiliki data lokasi izin untuk tiap perusahaan (dilengkapi dengan foto/denah).
- Adanya log tiap proses penyelesaian dokumen untuk monitoring janji layanan.
- Informasi status (*tracking*) proses dokumen kepada pengguna jasa.

Selain izin timbun, izin bongkar, dan izin muat JatayuBC juga memiliki fitur layanan sebagai berikut:

- Informasi persediaan saldo pita cukai (perusahaan rokok kecil).
- Notifikasi penerimaan pita cukai kepada pengguna jasa ketika pita diterima di kantor.
- Informasi pengantaran pita cukai (perusahaan rokok kecil).
- Log/status pengantaran pita yang digunakan untuk monitoring janji layanan.
- Pengaduan melalui *Wise* Kemenkeu.
- Menu Kritik & Saran untuk masukan maupun pertanyaan serta kritik dari pengguna jasa yang dibuat seperti forum tanya jawab.

b. JatayuBC Internal

JatayuBC internal merupakan aplikasi yang menyediakan informasi keuangan pegawai sebagai wujud keterbukaan informasi serta layanan kepada internal kantor, disamping itu

juga terdapat fitur notifikasi melalui sms kepada pegawai. Pegawai dapat mengakses aplikasi JatayuBC internal untuk mengecek detail data keuangan, seperti penerimaan tunjangan, uang makan, SPD, dan uang lembur masing-masing pegawai. Aplikasi ini sangat membantu pegawai untuk melakukan *check and balance* terhadap kebenaran data keuangan.

c. *Personal Record of Integrity* (PRI)

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Nomor KEP-101/WBC.10/KPP.MP.04/2021 tanggal 21 Desember 2021 tentang Penetapan Inovasi *Personal Record for Integrity* dan Pedoman Pengisian *Personal Record for Integrity* (PRI), Inovasi PRI merupakan alat yang digunakan untuk profiling pegawai dan pemantauan terhadap perilaku dan gaya hidup pegawai di lingkungan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap sehingga dapat dilakukan pencegahan sejak dini (*early warning system*) terhadap pegawai yang berpotensi melanggar kode etik, kode perilaku, disiplin pegawai, dan ketentuan lainnya. Sistem pengumpulan data dilakukan secara online dengan cara mengisi *google form*.

Data dan informasi yang telah disampaikan oleh pegawai akan dianalisis oleh Unit Kepatuhan Internal yang selanjutnya dijadikan sebagai dasar untuk melakukan monitoring perilaku, gaya hidup, dan tingkat integritas pegawai.

Berdasarkan database yang telah disusun, selanjutnya akan dilakukan penentuan pelaksanaan pembinaan mental pegawai secara umum maupun khusus. Secara umum dilakukan sesuai jadwal pelaksanaan pembinaan mental yang disusun oleh Tim Pembinaan Mental Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap, sedangkan pembinaan secara khusus dapat dilakukan dengan cara pengawasan melekat oleh atasan langsung, Seksi Kepatuhan Internal dan/atau Kepala Kantor.

Atas pelanggaran berupa pemberian data dan informasi yang tidak benar akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan tentang kode etik dan kode perilaku yang berlaku.

9. SERTIFIKASI

a. **ISO 9001 : 2015**

ISO 9001 : 2015 merupakan standar manajemen mutu yang dirancang untuk membantu suatu organisasi dalam memastikan bahwa organisasi dapat memenuhi kebutuhan pelanggan dan *stakeholder*. ISO 9001 : 2015 adalah sertifikasi yang berorientasi pada layanan pelanggan.

b. **ISO 37001 : 2016**

ISO 37001 adalah sistem manajemen anti suap yang dirancang untuk membantu organisasi menetapkan, menerapkan, memelihara dan meningkatkan program anti-penyuapan .

Sistem Manajemen ini menggunakan pendekatan berbasis risiko, ISO 37001 dapat memungkinkan perusahaan untuk membuat keputusan yang lebih baik tentang mitra bisnis dan pihak ketiga, dengan memahami dan proaktif mengelola risiko yang akan hadir dari hubungan kerjasama tersebut.

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap secara resmi telah berhasil memperoleh Sertifikat SNI ISO 37001 : 2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) pada bulan Juni 2021. Proses sertifikasi ini merupakan salah satu upaya Bea Cukai Cilacap dalam mewujudkan komitmen bersama untuk terbebas dari segala bentuk kecurangan (*fraud*), termasuk di dalamnya penyuapan, serta sebagai tindak lanjut atas predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang telah diperoleh. Sertifikasi ISO dikeluarkan oleh *International Certification Service Management (ICSM)* Indonesia.

10. REPLIKASI/ *BENCHMARKING*

- a. Aplikasi JatayuBC milik Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap yang memberikan fitur kemudahan dan telah memberikan banyak manfaat bagi para pengguna jasa dan telah direplikasi oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Bojonegoro pada tahun 2019.
- b. Aplikasi JatayuBC Internal merupakan aplikasi internal pegawai yang menyediakan informasi keuangan pegawai wujud keterbukaan informasi serta layanan kepada internal kantor, disamping itu juga terdapat fitur pengumuman melalui sms kepada pegawai. Aplikasi ini dikembangkan lebih lanjut yang akan diadopsi oleh seluruh kantor dibawah Kantor Wilayah DJBC Jateng dan D.I. Yogyakarta serta Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Entikong. Aplikasi ini akan dikembangkan dan diubah namanya menjadi aplikasi gosikap (Sistem Informasi Keuangan Pegawai dalam Genggaman).
- c. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap juga selalu berusaha menjadi *role model* bagi unit lain dengan melakukan:
 - Asistensi pembangunan ZI/WBK kepada KPPBC TMP C Pematang Siantar, tahun 2018
 - Asistensi pembangunan ZI/WBK kepada KPPN Cilacap, tahun 2018.
 - Asistensi penyusunan *e-book* WBK kepada KPPBC TMP C Purwokerto, tahun 2019
 - Asistensi pengembangan inovasi aplikasi JatayuBC kepada KPPBC Bojonegoro, tahun 2019
 - Menjadi salah satu narasumber dalam workshop *Training of Trainer* Pengelolaan Kinerja, dengan peserta seluruh unit DJBC, tahun 2020.
 - Asistensi WBBM kepada KPPBC TMP C Madiun pada tanggal 28 Juli 2021.
 - Asistensi WBBM kepada KPPBC TMP C Magelang pada tanggal 12 Agustus 2021.
 - Asistensi WBBM kepada KPPN Cilacap pada tanggal 19 Agustus 2021.



BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

B. Rencana Aksi Tahun 2023

PENUTUP



A. SIMPULAN

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap terus berkomitmen dalam melakukan peningkatan pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai. Perolehan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di tahun 2017 dan perolehan predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada tahun 2020 tidak lantas membuat para pegawai berpangku tangan. Hal tersebut menjadikan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap terus melakukan inovasi dan pengembangan serta mengevaluasi diri untuk menjadi Bea Cukai yang Makin Baik.

Untuk mewujudkan Bea Cukai yang Makin Baik maka pegawai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap dengan dukungan seluruh pejabat struktural dan staf harus terus meningkatkan integritas, dedikasi, dan bekerja keras secara profesional, optimal, adil, jujur, transparan, dan konsisten dalam memberikan pelayanan dan melaksanakan pengawasan sesuai dengan tugas dan fungsi serta tanggung jawab masing-masing.

Pencapaian kinerja Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap selama tahun 2022 telah menunjukkan hasil yang membanggakan. Berdasarkan IKU yang dimiliki yaitu 18 indikator, 16 diantaranya telah mencapai target (berstatus hijau), sedangkan 1 IKU masih abu-abu karena tidak ada realisasi. Pencapaian kinerja dari sisi penerimaan bea dan cukai melampaui target yaitu sebesar 121.03 % dan kinerja pengawasan peredaran Barang Kena Cukai ilegal sebesar 103.94% menunjukkan keberhasilan dalam melaksanakan tugas dan fungsi. Selain itu, capaian kepuasan pengguna jasa sebesar 4.65 (skala 5) dengan kategori Sangat Puas menunjukkan bahwa layanan kepabeanan dan cukai yang diberikan telah melebihi ekspektasi dari pengguna jasa. Secara keseluruhan Nilai Kinerja Organisasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap sebesar 113.15. Keberhasilan yang telah dicapai oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap selama Tahun Anggaran 2022 diantaranya sebagai berikut:

1. Tercapainya target penerimaan kepabeanan dan cukai;
2. Terciptanya kelancaran pelayanan dan pengawasan atas dokumen dan barang;
3. Tidak adanya pengaduan;
4. Terjalannya kerja sama yang baik antara Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap, instansi terkait, dan aparat pemerintah daerah kabupaten dalam wilayah kerja Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap, yaitu Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Kebumen dalam semua keterlibatan kegiatan yang bersifat penegakan peraturan dan ketentuan di Bidang Kepabeanan dan Cukai;
5. Terjalannya kerja sama dengan instansi terkait (Pemda Kabupaten Cilacap dan Pemda Kabupaten Kebumen) dalam kegiatan operasi pasar pemberantasan peredaran rokok ilegal;
6. Memperoleh peringkat 1 sebagai Satker Dengan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Semester I Tahun 2022

7. Memperoleh peringkat 3 Satker Dengan Kinerja dan Kualitas Pelaporan Data Capaian Output Semester I Tahun 2022.
8. Mencapai Rekor Penindakan Barang Kena Cukai Hasil Tembakau Ilegal terbanyak yaitu sebanyak 888.631 batang rokok ilegal.

Keberhasilan yang dicapai akan tetap dipertahankan dan diharapkan menjadi peluang untuk optimalisasi keberhasilan yang akan diraih di masa mendatang. Kegagalan, permasalahan dan kendala yang dihadapi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap bukan menjadi penghambat dalam melaksanakan tugas pokok, namun menjadi motivasi dalam menyusun langkah-langkah strategis untuk mencapai keberhasilan yang lebih baik.

B. RENCANA AKSI TAHUN 2023

Menghadapi potensi permasalahan dan kendala yang dihadapi pada tahun 2023, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap akan terus berbenah untuk lebih memperhatikan kesejahteraan pegawainya dalam hal perbaikan rumah dinas yaitu dengan mengusulkan permohonan untuk renovasi rumah dinas yang sudah ada dan dalam keadaan kurang layak untuk dihuni.

Terhadap permasalahan Sumber Daya Manusia (SDM), Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap di tahun mendatang akan melakukan upaya peningkatan pembinaan SDM untuk meningkatkan keterampilan pegawai melalui berbagai pelatihan baik internal maupun eksternal supaya setiap pegawai terampil dan mumpuni dalam semua tugas pelayanan sehingga dapat saling mengisi terhadap kekosongan pegawai yang mungkin belum terisi. Selain itu untuk menjaga pelayanan prima dan pengawasan yang efektif. Berbagai sosialisasi dan asistensi dengan pengguna jasa juga kami optimalkan dalam rangka meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai.

Terkait penerimaan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap yang sebagian besar bersumber pada produksi hasil tembakau PT HM Sampoerna Tbk dan importasi *raw sugar* oleh PT Dharmapala Usaha Sukses, maka akan terus dilaksanakan koordinasi secara intensif dan berkesinambungan dengan *stakeholder* terutama tentang konsistensi pembayaran terhadap pemesanan CK-1 dan mengenai kemungkinan peningkatan jumlah kuota.

Dengan adanya Laporan Kinerja tahun 2022 ini diharapkan menjadi tolak ukur dan sebagai data untuk pembenahan kinerja pada tahun 2023. Hal-hal yang sudah tercapai pada tahun 2022 semoga dapat lebih ditingkatkan pada tahun 2023. Akhirnya dengan disusunnya Laporan Kinerja Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap Tahun Anggaran 2022 ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan dan terperinci kepada pimpinan DJBC dan seluruh pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap sehingga dapat menjadi umpan balik guna peningkatan kinerja dan juga dapat digunakan sebagai bahan untuk merumuskan kebijakan lebih lanjut pada periode berikutnya.

LAMPIRAN

- a. Kontrak Kinerja Tahun 2022
- b. Formulir Pengukuran Kinerja Tahun 2022
- c. Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2022
- d. Hasil Survei Kepuasan Pengguna Jasa Tahun 2022
- e. Piagam Prestasi Tahun 2022
- f. Dokumen pendukung lain

KONTRAK KINERJA
NOMOR: 9/BC.23/2022
KEPALA KPPBC TMP C CILACAP
KANTOR WILAYAH DJBC
JAWA TENGAH DAN D.I. YOGYAKARTA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2022

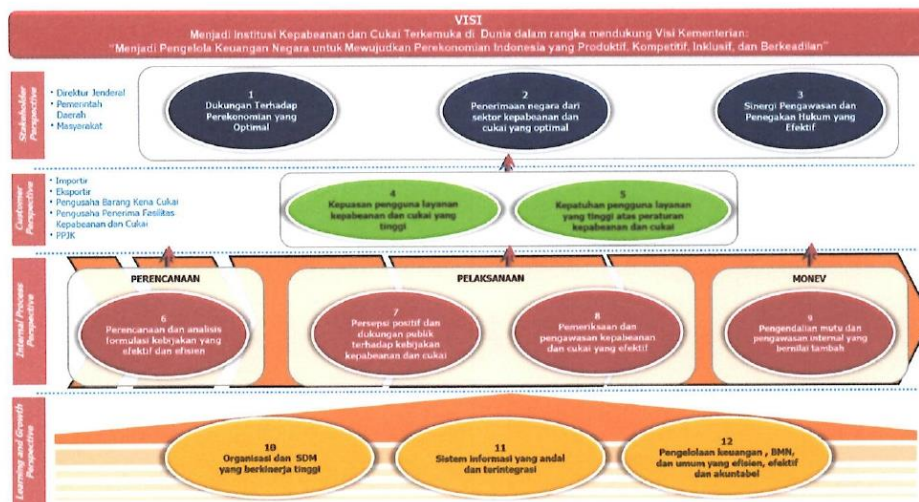


Pernyataan Kesanggupan

Dalam melaksanakan tugas sebagai Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap, saya akan:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh kesungguhan untuk mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam Kontrak Kinerja ini.
2. Bersedia untuk dilakukan evaluasi atas capaian kinerja kapanpun diperlukan.
3. Menerima segala konsekuensi atas capaian kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Peta Strategi



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA KPPBC TMP C CILACAP
KANTOR WILAYAH DJBC JAWA TENGAH DAN D.I. YOGYAKARTA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KEMENTERIAN KEUANGAN

No.	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1	Dukungan terhadap perekonomian yang optimal	1a-N	Persentase efektivitas asistensi ekspor dan ekstensifikasi NPPBKC	70,5%
2	Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang optimal	2a-CP	Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai	100%
3	Sinergi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif	3a-CP	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	78%
4	Kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai yang tinggi	4a-CP	Indeks kepuasan pengguna jasa	4,42 (skala 5)
5	Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas aturan kepabeanan dan cukai	5a-CP	Persentase piutang bea dan cukai yang diselesaikan	94,75%
6	Perencanaan dan analisis formulasi kebijakan yang efektif dan efisien	6a-CP	Persentase kualitas perencanaan dan penyelesaian program PRKC berkelanjutan	75%
7	Persepsi positif dan dukungan publik terhadap kebijakan kepabeanan dan cukai	7a-N	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	85 (skala 100)
		7b-N	Rata-rata persentase realisasi janji layanan kepabeanan dan cukai	106.51%
8	Pemeriksaan dan pengawasan kepabeanan dan cukai yang efektif	8a-CP	Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai	74%
		8b-CP	Persentase efektivitas patroli laut	73%
9	Pengendalian mutu dan pengawasan internal yang bernilai tambah	9a-CP	Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	83%
		9b-N	Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal	90.5%

No.	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
10	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi	10a-N	Persentase peningkatan kompetensi pegawai	78%
		10b-N	Persentase efektivitas manajemen organisasi	82,5%
		10c-N	Indeks Efektivitas Pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	90,1 (skala 100)
11	Sistem Informasi yang Andal dan Terintegrasi	11a-N	Persentase pengelolaan layanan TIK	80%
12	Pengelolaan Keuangan, BMN dan Umum yang Efisien, Efektif, dan Akuntabel	12a-N	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,51%

Kegiatan

1. Pengelolaan Penerimaan Negara
2. Dukungan Manajemen

Anggaran

Rp 367.647.000,00
Rp 1.589.709.000,00

Kepala Kantor Wilayah DJBC
Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta,



Muhammad Purwantoro
NIP 19660611 199202 1 001

Semarang, 27 Januari 2022
Kepala KPPBC TMP C Cilacap,



Wisnu Wibowo
NIP 19640208 199103 1 001

INISIATIF STRATEGIS
KEPALA KPPBC TMP C CILACAP
KANTOR WILAYAH DJBC JAWA TENGAH DAN D.I. YOGYAKARTA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2021

No.	Indikator Kinerja Utama	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab

Semarang, 27 Januari 2022

INS yang dinilai,



Wenu/Wibowo
NIP 19640208 199103 1 001

**RINCIAN TARGET KINERJA
KEPALA KPPBC TMP C CILACAP
KANTOR WILAYAH DJBC JAWA TENGAH DAN D.I. YOGYAKARTA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2022**

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
1	Dukungan terhadap perekonomian yang optimal							
1a-N	Persentase efektivitas asistensi ekspor dan ekstensifikasi NPPBKC	15%	35%	35%	55%	55%	70,5%	70,5%
2	Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang optimal							
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai	24,09%	48,85%	48,85%	73,63%	73,63%	100%	100%
3	Sinergi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif							
3a-CP	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	35%	47,5%	47,5%	65%	65%	78%	78%
4	Kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai yang tinggi							
4a-CP	Indeks kepuasan pengguna jasa	-	-	-	-	-	4.42	4.42 (skala 5)
5	Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai							
5a-CP	Persentase piutang bea dan cukai yang diselesaikan	-	70%	70%	-	70%	94,75%	94,75%
6	Perencanaan dan analisis formulasi kebijakan yang efektif dan efisien							
6a-CP	Persentase kualitas perencanaan dan penyelesaian program PRKC berkelanjutan	-	10%	10%	45%	45%	75%	75%
7	Persepsi positif dan dukungan publik terhadap kebijakan kepabeanan dan cukai							
7a-N	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	85	85	85	85	85	85	85 (Skala 100)
7b-N	Rata-rata persentase realisasi janji layanan kepabeanan dan cukai	106,51%	106,51%	106,51%	106,51%	106,51%	106,51%	106,51%

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
8	Pemeriksaan dan pengawasan kepabeanaan dan cukai yang efektif							
8a-CP	Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanaan dan cukai	25%	45%	45%	62%	62%	74%	74%
8b-CP	Persentase efektivitas patroli laut	10%	30%	30%	60%	60%	73%	73%
9	Pengendalian mutu dan pengawasan internal yang bernilai tambah							
9a-CP	Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	10%	30%	30%	60%	60%	83%	83%
9b-N	Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal	40%	55%	55%	70%	70%	90,5%	90,5%
10	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi							
10a-N	Persentase peningkatan kompetensi pegawai	78%	78%	78%	78%	78%	78%	78%
10b-N	Persentase efektivitas manajemen organisasi	47,5%	50%	50%	60%	60%	82,5%	82,5%
10c-N	Indeks Efektivitas Pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1 (skala 100)
11	Sistem Informasi yang Andal dan Terintegrasi							
11a-N	Persentase pengelolaan layanan TIK	25%	40%	40%	55%	55%	80%	80%
12	Pengelolaan Keuangan, BMN dan Umum yang Efisien, Efektif dan Akuntabel							
12a-N	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95.51%	95.51%	95.51%	95.51%	95.51%	95.51%	95.51%

Semarang, 27 Januari 2022
PNS yang dinilai,

Wibowo Wibowo
NIP 19640208 199103 1 001

SASARAN KINERJA PEGAWAI

DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN:
1 JANUARI S.D. 31 DESEMBER 2022

PEGAWAI YANG DINILAI		PEJABAT PENILAI KINERJA	
NAMA	Wisnu Wibowo	NAMA	Muhammad Purwantoro
NIP	19640208 199103 1 001	NIP	19651125 199103 1 001
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Tingkat I/ IV/b	PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama Madya / IV/d
JABATAN	Kepala Kantor	JABATAN	Kepala Kantor
UNIT KERJA	KPPBC TMP C Cilacap	UNIT KERJA	Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D. I. Yogyakarta
NO	RENCANA KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
A. KINERJA UTAMA			
1	Dukungan terhadap perekonomian yang optimal	Persentase efektivitas asistensi ekspor dan ekstensifikasi NPPBKC	70,5%
2	Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang optimal	Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai	100%
3	Sinergi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	78%
4	Kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai yang tinggi	Indeks kepuasan pengguna jasa	4.42 (skala 5)
5	Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai	Persentase piutang bea dan cukai yang diselesaikan	94,75%
6	Perencanaan dan Analisis Formulasi Kebijakan yang Efektif dan Efisien	Persentase kualitas perencanaan dan penyelesaian program PRKC berkelanjutan	75%
7	Persepsi positif dan dukungan publik terhadap kebijakan kepabeanan dan cukai	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	85 (skala 100)
		Rata-rata persentase realisasi janji layanan kepabeanan dan cukai	106,51%
8	Pengawasan kepabeanan dan cukai yang efektif	Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai	74%
		Persentase efektivitas patroli laut	73%
9	Pengendalian mutu dan pengawasan internal yang bernilai tambah	Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	83%
		Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal	90,5%

NO	RENCANA KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
10	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi	Persentase peningkatan kompetensi pegawai	78%
		Persentase efektivitas manajemen organisasi	82,5%
		Indeks Efektivitas Pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	90,1 (skala 100)
11	Sistem Informasi yang Andal dan Terintegrasi	Persentase pengelolaan layanan TIK	80%
12	Pengelolaan Keuangan, BMN dan Umum yang Efisien, Efektif dan Akuntabel	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95.51%
B. KINERJA TAMBAHAN			
-	-	-	-

Pegawai yang Dinilai,


 Wisnu Wibowo
 NIP 19640208 199103 1 001

Semarang, 27 Januari 2022
 Pejabat Penilai Kinerja,


 Muhammad Purwantoro
 NIP 19651125 199103 1 001



**KONTRAK KINERJA
NOMOR: 9A/BC.23/2022
KEPALA KPPBC TMP C CILACAP
KANTOR WILAYAH DJBC
JAWA TENGAH DAN D.I. YOGYAKARTA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2022**

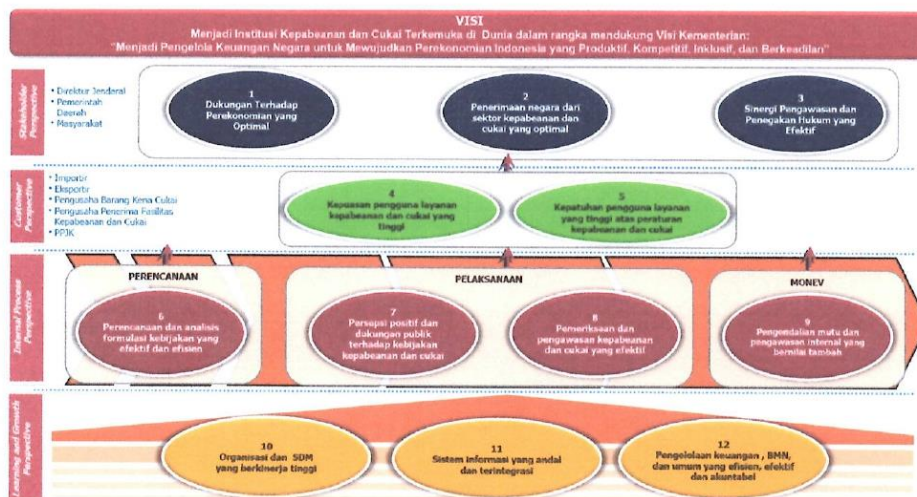


Pernyataan Kesanggupan

Dalam melaksanakan tugas sebagai Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap, saya akan:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh kesungguhan untuk mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam Kontrak Kinerja ini.
2. Bersedia untuk dilakukan evaluasi atas capaian kinerja kapanpun diperlukan.
3. Menerima segala konsekuensi atas capaian kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Peta Strategi



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA KPPBC TMP C CILACAP
KANTOR WILAYAH DJBC JAWA TENGAH DAN D.I. YOGYAKARTA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KEMENTERIAN KEUANGAN

No.	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1	Dukungan terhadap perekonomian yang optimal	1a-CP	Persentase Efektivitas Asistensi UMKM Berorientasi Ekspor Dalam Rangka PEN	80%
		1b-N	Persentase Efektivitas Asistensi Perusahaan Rokok dan ekstensifikasi NPPBKC	70%
2	Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang optimal	2a-CP	Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai	100%
3	Sinergi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif	3a-CP	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	78%
4	Kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai yang tinggi	4a-CP	Indeks kepuasan pengguna jasa	4,42 (skala 5)
5	Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas aturan kepabeanan dan cukai	5a-CP	Persentase piutang bea dan cukai yang diselesaikan	94,75%
6	Perencanaan dan analisis formulasi kebijakan yang efektif dan efisien	6a-CP	Persentase kualitas perencanaan dan penyelesaian program PRKC berkelanjutan	75%
7	Persepsi positif dan dukungan publik terhadap kebijakan kepabeanan dan cukai	7a-N	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	85 (skala 100)
		7b-N	Rata-rata persentase realisasi janji layanan kepabeanan dan cukai	106.51%
8	Pemeriksaan dan pengawasan kepabeanan dan cukai yang efektif	8a-CP	Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai	74%
		8b-CP	Persentase efektivitas patroli laut	73%
9	Pengendalian mutu dan pengawasan internal yang bernilai tambah	9a-CP	Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	83%

No.	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
		9b-N	Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal	90,5%
10	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi	10a-N	Persentase peningkatan kompetensi pegawai	78%
		10b-N	Persentase efektivitas manajemen organisasi	82,5%
		10c-N	Indeks Efektivitas Pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	90,1 (skala 100)
11	Sistem Informasi yang Andal dan Terintegrasi	11a-N	Persentase pengelolaan layanan TIK	80%
12	Pengelolaan Keuangan, BMN dan Umum yang Efisien, Efektif, dan Akuntabel	12a-N	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,51 %

Kegiatan

1. Pengelolaan Penerimaan Negara
2. Dukungan Manajemen

Anggaran

Rp 547.359.000,00
Rp 1.637.504.000,00

Kepala Kantor Wilayah DJBC
Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta,



Muhammad Purwantoro
NIP 19660611 199202 1 001

Semarang, 1 April 2022
Plt. Kepala KPPBC TMP C Cilacap,



Purwanto
NIP 19720110 199212 1 003

**RINCIAN TARGET KINERJA
KEPALA KPPBC TMP C CILACAP
KANTOR WILAYAH DJBC JAWA TENGAH DAN D.I. YOGYAKARTA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2022**

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
1	Dukungan terhadap perekonomian yang optimal							
1a-CP	Persentase Efektivitas Asistensi UMKM Berorientasi Ekspor Dalam Rangka PEN	-	30%	30%	50%	50%	80%	80%
1b-N	Persentase Efektivitas Asistensi Perusahaan Rokok dan ekstensifikasi NPPBKC	-	35%	35%	55%	55%	70%	70%
2	Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang optimal							
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai	-	48,85%	48,85%	73,63%	73,63%	100%	100%
3	Sinergi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif							
3a-CP	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	-	47,5%	47,5%	65%	65%	78%	78%
4	Kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai yang tinggi							
4a-CP	Indeks kepuasan pengguna jasa	-	-	-	-	-	4.42	4.42 (skala 5)
5	Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai							
5a-CP	Persentase piutang bea dan cukai yang diselesaikan	-	70%	70%	-	70%	94,75%	94,75%
6	Perencanaan dan analisis formulasi kebijakan yang efektif dan efisien							
6a-CP	Persentase kualitas perencanaan dan penyelesaian program PRKC berkelanjutan	-	10%	10%	45%	45%	75%	75%
7	Persepsi positif dan dukungan publik terhadap kebijakan kepabeanan dan cukai							
7a-N	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	-	85	85	85	85	85	85 (Skala 100)

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
7b-N	Rata-rata persentase realisasi janji layanan kepabeanan dan cukai	-	106,51%	106,51%	106,51%	106,51%	106,51%	106,51%
8	Pemeriksaan dan pengawasan kepabeanan dan cukai yang efektif							
8a-CP	Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai	-	45%	45%	62%	62%	74%	74%
8b-CP	Persentase efektivitas patroli laut	-	30%	30%	60%	60%	73%	73%
9	Pengendalian mutu dan pengawasan internal yang bernilai tambah							
9a-CP	Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	-	30%	30%	60%	60%	83%	83%
9b-N	Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal	-	55%	55%	70%	70%	90,5%	90,5%
10	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi							
10a-N	Persentase peningkatan kompetensi pegawai	-	78%	78%	78%	78%	78%	78%
10b-N	Persentase efektivitas manajemen organisasi	-	50%	50%	60%	60%	82,5%	82,5%
10c-N	Indeks Efektivitas Pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	-	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1 (skala 100)
11	Sistem Informasi yang Andal dan Terintegrasi							
11a-N	Persentase pengelolaan layanan TIK	-	40%	40%	55%	55%	80%	80%
12	Pengelolaan Keuangan, BMN dan Umum yang Efisien, Efektif dan Akuntabel							
12a-N	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	-	95.51%	95.51%	95.51%	95.51%	95.51%	95.51%

Semarang, 1 April 2022

PNS yang dinilai,



Parwanto

NIP 19720110 199212 1 003

INISIATIF STRATEGIS
KEPALA KPPBC TMP C CILACAP
KANTOR WILAYAH DJBC JAWA TENGAH DAN D.I. YOGYAKARTA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2022

No.	Indikator Kinerja Utama	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab

Semarang, 1 April 2022
PNS yang dinilai,



Purwanto
NIP 19720110 199212 1 003

SASARAN KINERJA PEGAWAI

DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN:
1 APRIL S.D. 31 DESEMBER 2022

PEGAWAI YANG DINILAI		PEJABAT PENILAI KINERJA	
NAMA	Purwanto	NAMA	Muhammad Purwantoro
NIP	19720110 199212 1 003	NIP	19651125 199103 1 001
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina/IV/a	PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama Madya / IV/d
JABATAN	Pelaksana Tugas Kepala Kantor	JABATAN	Kepala Kantor
UNIT KERJA	KPPBC TMP C Cilacap	UNIT KERJA	Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D. I. Yogyakarta
NO	RENCANA KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
A. KINERJA UTAMA			
1	Dukungan terhadap perekonomian yang optimal	Persentase Efektivitas Asistensi UMKM Berorientasi Ekspor Dalam Rangka PEN	80%
		Persentase Efektivitas Asistensi Perusahaan Rokok dan ekstensifikasi NPPBKC	70%
2	Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang optimal	Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai	100%
3	Sinergi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	78%
4	Kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai yang tinggi	Indeks kepuasan pengguna jasa	4.42 (skala 5)
5	Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai	Persentase piutang bea dan cukai yang diselesaikan	94,75%
6	Perencanaan dan Analisis Formulasi Kebijakan yang Efektif dan Efisien	Persentase kualitas perencanaan dan penyelesaian program PRKC berkelanjutan	75%
7	Persepsi positif dan dukungan publik terhadap kebijakan kepabeanan dan cukai	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	85 (skala 100)
		Rata-rata persentase realisasi janji layanan kepabeanan dan cukai	106.51%
8	Pengawasan kepabeanan dan cukai yang efektif	Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai	74%
		Persentase efektivitas patroli laut	73%
9	Pengendalian mutu dan pengawasan internal yang bernilai tambah	Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	83%
		Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal	90,5%

NO	RENCANA KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
10	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi	Persentase peningkatan kompetensi pegawai	78%
		Persentase efektivitas manajemen organisasi	82,5%
		Indeks Efektivitas Pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	90,1 (skala 100)
11	Sistem Informasi yang Andal dan Terintegrasi	Persentase pengelolaan layanan TIK	80%
12	Pengelolaan Keuangan, BMN dan Umum yang Efisien, Efektif dan Akuntabel	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95.51%
B. KINERJA TAMBAHAN			
-	-	-	-

Pegawai yang Dinilai,



Purwanto
NIP 19720110 199212 1 003

Semarang, 1 April 2022

Pejabat Penilai Kinerja,



Muhammad Purwantoro
NIP 19651125 199103 1 001

FORMULIR PENGUKURAN KINERJA UNIT ESELON III

Unit Organisasi : Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap
Tahun Anggaran : 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Dukungan terhadap perekonomian yang optimal	Persentase Efektivitas Asistensi UMKM Berorientasi Ekspor Dalam Rangka PEN	80%	94%	117.5
2		Persentase Efektivitas Asistensi Perusahaan Rokok dan ekstensifikasi NPPBKC	70,5%	120%	120
3	Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang optimal	Persentase realisasi penerimaan bea dan cukai	100%	121.03%	120
4	Sinergi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	78%	103.94%	120
5	Kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai yang tinggi	Indeks kepuasan pengguna jasa	4,42 (skala 5)	4.65	105.2
6	Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai	Persentase piutang bea dan cukai yang diselesaikan	94,75%	100%	105.54
7	Perencanaan dan Analisis Formulasi Kebijakan yang Efektif dan Efisien	Persentase Kualitas Perencanaan Satuan Kerja	75%	94.08%	120
8	Persepsi positif dan dukungan publik terhadap kebijakan kepabeanan dan cukai	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	85 (skala 100)	89.08	104.8
9		Rata-rata persentase realisasi janji layanan kepabeanan dan cukai	106.51%	116.3%	109.19
10	Pemeriksaan dan pengawasan kepabeanan dan cukai yang efektif	Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai	74%	92.96%	120
11		Persentase efektivitas patroli laut	73%	75.67%	103.66
12	Pengendalian mutu dan pengawasan internal yang bernilai tambah	Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	83%	N/A	N/A

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
13		Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal	90.5%	100%	110.5
14	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi	Persentase peningkatan kompetensi pegawai	78%	105.8%	120
15		Persentase efektivitas manajemen organisasi	82,5%	98.75%	119.7
16		Indeks Efektivitas Pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	90.1	99.65%	110.6
17	Sistem Informasi yang Andal dan Terintegrasi	Persentase pengelolaan layanan TIK	80%	96.06%	120
18	Pengelolaan Keuangan, BMN dan Umum yang Efisien, Efektif dan Akuntabel	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95.51%	96.4%	100.93

Jumlah anggaran kegiatan Tahun 2022 : Rp2.019.498.887

Jumlah realisasi kegiatan Tahun 2022 : Rp1.866.622.821

NILAI KINERJA ORGANISASI
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE
MADYA PABEAN C CILACAP
TAHUN 2022

Kode SS/ IKU	SS/IKU	Target				Realisasi				Polarisasi	V/C*	Bobot IKU	Indeks Capaian
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4				
Stakeholder													
1	Dukungan terhadap perekonomian yang optimal												
1a-CP	Persentase Efektivitas Asistensi UMKM Berorientasi Ekspor Dalam Rangka PEN		30	50.00	80.00		52.00	70.00	94.00	Maximize	P/M	14 %	117.5
1b-N	Persentase efektivitas asistensi ekspor dan ekstensifikasi NPPBKC	15.00	35	55.00	70.00	20.00	60.00	120.00	120.00	Maximize	P/M	14 %	120
2	Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang optimal												
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan bea dan cukai	24.09	48.85	69.98	88.36	52.01	67.28	68.42	121.03	Maximize	E/M	21 %	120
3	Sinergi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif												
3a-CP	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	35.00	47.5	65.00	78.00	87.08	102.17	101.39	103.94	Maximize	P/M	14 %	120
Customer													
4	Kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai yang tinggi												
4a-CP	Indeks kepuasan pengguna jasa				4.42				4.65	Maximize	E/M	21 %	105.2
5	Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai												
5a-CP	Persentase piutang bea dan cukai yang diselesaikan		70	70.00	94.75		100.00	100.00	100.00	Maximize	P/M	14 %	105.54
Internal Process													
6	Perencanaan dan Analisis Formulasi Kebijakan yang Efektif dan Efisien												
6a-CP	Persentase kualitas perencanaan dan penyelesaian program PRKC berkelanjutan		10	45.00	75.00		56.35	83.50	94.08	Maximize	P/M	14 %	120
7	Persepsi positif dan dukungan publik terhadap kebijakan kepabeanan dan cukai												
7a-N	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	85.00	85	85.00	85.00	89.38	89.38	88.18	89.08	Maximize	P/M	14 %	104.8
7b-N	Rata-rata persentase realisasi janji layanan kepabeanan dan cukai	106.51	106.51	106.51	106.51	119.03	118.20	116.65	114.05	Maximize	P/H	11 %	109.19
8	Pemeriksaan dan pengawasan kepabeanan dan cukai yang efektif												
8a-CP	Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai	25.00	45.00	62.00	74.00	70.56	86.18	90.84	92.96	Maximize	P/M	14 %	120
8b-CP	Persentase efektivitas patroli laut	10.00	30.00	60.00	73.00	26.25	42.50	69.58	75.67	Maximize	P/M	14 %	103.66
9	Pengendalian mutu dan pengawasan internal yang bernilai tambah												
9a-CP	Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	10	30	60	83					Maximize	P/M	14 %	N/A

Kode SS/IKU	SS/IKU	Target				Realisasi				Polarisasi	V/C*	Bobot IKU	Indeks Capaian
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4				
9b-N	Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal	40.00	55.00	70.00	90.50	100.00	100.00	100.00	100.00	Maximize	P/M	14 %	110.5
Learning and Growth													
10	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi												
10a-N	Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai	78.00	78.00	78.00	78.00	93.47	97.81	98.37	105.80	Maximize	P/M	14 %	120
10b-N	Persentase efektivitas Manajemen Organisasi	47.50	50.00	60.00	82.50	68.88	88.00	90.00	98.75	Maximize	P/M	14 %	119.7
10c-N	Indeks Efektivitas Pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	90.10	90.10	90.10	90.10				99.65	Maximize	P/M	14 %	110.6
11	Sistem Informasi yang Andal dan Terintegrasi												
11a-N	Persentase pengelolaan layanan TIK	25.00	40.00	55.00	80.00	79.44	79.44	90.65	96.06	Maximize	P/M	14 %	120
12	Pengelolaan Keuangan, BMN dan Umum yang Efisien, Efektif dan Akuntabel												
12a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95.51	95.51	95.51	95.51	100.00	100.00	100.00	96.40	Maximize	P/M	14 %	100.93
Capaian Kinerja Pegawai (CKP)													113.15

*Validitas/Tingkat Kontrol

Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai



Ditandatangani secara elektronik
Muhamad Irwan



Survei Kepuasan Pengguna Jasa KPPBC Cilacap Tahun 2022



Indikator		Indeks	Kategori	Tren	IPA
Sistem dan Prosedur Pelayanan					
	:	4,65	Sangat Puas	➡ -0,06	
Kejelasan Persyaratan Administrasi	:	4,65	Sangat Puas	➡ -0,06	II
Kejelasan Prosedur Pelayanan	:	4,65	Sangat Puas	➡ 0,00	II
Kemudahan Prosedur Pelayanan	:	4,59	Sangat Puas	➡ -0,12	II
Kejelasan Biaya Pelayanan	:	4,71	Sangat Puas	➡ 0,00	I
Kecepatan Waktu Pelayanan	:	4,65	Sangat Puas	➡ -0,11	II
Pegawai dan Petugas Pelayanan					
	:	4,71	Sangat Puas	➡ -0,04	
Keramahan dan Kesopanan Pegawai	:	4,75	Sangat Puas	➡ -0,15	I
Kedisiplinan Pegawai	:	4,75	Sangat Puas	➡ -0,05	I
Kecepatan Petugas Pelayanan	:	4,67	Sangat Puas	➡ -0,03	I
Keahlian dan Pengetahuan Petugas Pelayanan	:	4,67	Sangat Puas	➡ 0,07	I
Keadilan Petugas Pelayanan	:	4,75	Sangat Puas	➡ -0,05	I
Integritas Pegawai	:	4,67	Sangat Puas	➡ -0,05	I
Sarana dan Prasarana Kantor					
	:	4,65	Sangat Puas	➡ -0,12	
Kenyamanan Loker Pelayanan	:	4,67	Sangat Puas	➡ -0,13	IV
Kebersihan Kantor	:	4,67	Sangat Puas	➡ -0,13	IV
Kenyamanan Ruang Tunggu	:	4,67	Sangat Puas	➡ -0,13	IV
Kenyamanan Toilet	:	4,58	Sangat Puas	➡ -0,12	III
Kejelasan Tata Ruang	:	4,67	Sangat Puas	➡ -0,13	IV
Ketersediaan Sarana Pendukung Lainnya	:	4,67	Sangat Puas	➡ -0,03	IV
Layanan Informasi					
	:	4,59	Sangat Puas	➡ -0,15	
Ketersediaan Layanan Informasi	:	4,59	Sangat Puas	➡ -0,12	III
Kejelasan Layanan Informasi	:	4,59	Sangat Puas	➡ -0,17	III
Kemudahan Mendapatkan Informasi	:	4,59	Sangat Puas	➡ -0,17	II
Kemudahan Menyampaikan Pengaduan	:	4,59	Sangat Puas	➡ -0,12	III
Indeks Kepuasan					
	:	4,65	Sangat Puas	➡ -0,09	
Faktor Koreksi					
	:	0,00		➡ 0,00	
Indeks Akhir					
	:	4,65	Sangat Puas	➡ -0,09	







**DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI
TIPE MADYA PABEAN C CILACAP**